

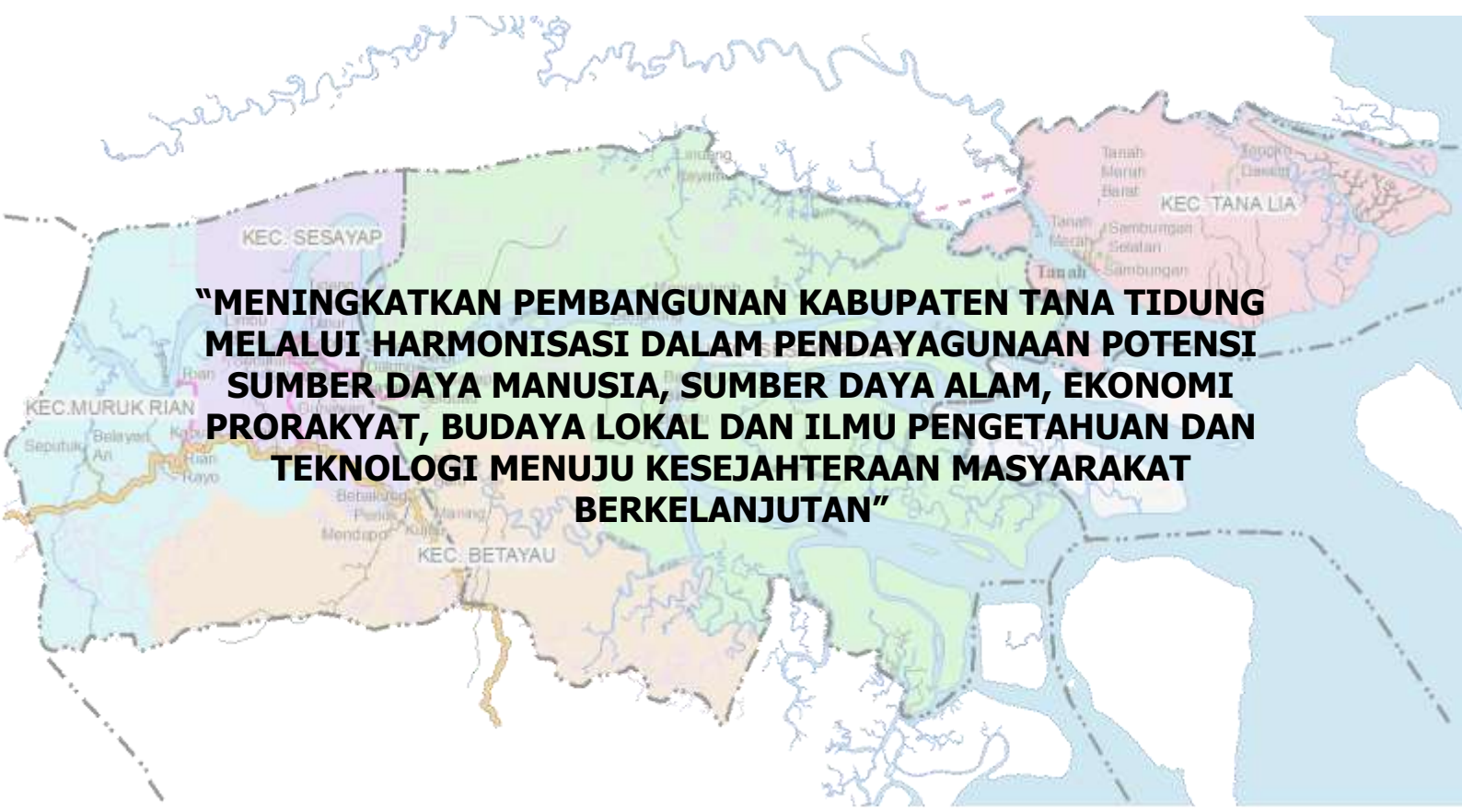


BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR     TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2016-2021**



**“MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG  
MELALUI HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI  
PRORAKYAT, BUDAYA LOKAL DAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
BERKELANJUTAN”**



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung serta perubahan sasaran dan indikator tahunan dan target pencapaian yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik In
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2);

16. Peraturan Daerah.....

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 200);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung)

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
dan  
BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016-2021

Pasal I.....

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 2, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 – 2021.
  11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
  12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
  15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
  - BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
  - BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
  - BAB IX PENUTUP
- (2) Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tidung Pale  
pada tanggal

BUPATI TANA TIDUNG

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG

H.M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019  
NOMOR ...  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG:  
.../.../...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mendorong dilakukannya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016–2021. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2017 memberi kesimpulan bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012–2021 tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah.

Alasan utama perlunya dilakukan perubahan RPJMD adalah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Alasan lain yang tak kalah penting dan melandasi dilakukannya perubahan adalah karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perubahan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana antara lain dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016–2021 pada prinsipnya menyesuaikan dan mensinkronkan materi pada masing-masing Bab meliputi:

1. BAB I Pendahuluan (penajaman latar belakang dan penyebutan alasan perubahan, melengkapi dasar hukum dengan peraturan perundangan terbaru yang relevan untuk dirujuk, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan);

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (memperbaharui data kinerja sampai dengan tahun 2016);
3. BAB III Gambaran Keuangan Daerah (memperbaharui data-data realisasi keuangan hingga tahun 2016);
4. BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis (memperbaharui permasalahan pembangunan daerah, menganalisis/memasukkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dan memperbaharui isu strategis);
5. BAB V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran (menyesuaikan Sasaran, indikator sasaran dan target pada tiap sasaran RPJMD);
6. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah (penajaman arah kebijakan dengan strategi disertai target capaian indikator);
7. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (memperbaharui kapasitas kemampuan riil dengan pencapaian indikator kinerja, pagu indikatfi dari perangkat daerah);
8. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (memperbaharui indikator dan target dalam pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah);
9. BAB IX Penutup

Perubahan tersebut difokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (empat) tahun perideo RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 yaitu Tahun 2017 sampai Tahun 2021. Sedangkan RPJMD untuk 1 (satu) tahun awal periode RPJMD yaitu Tahun 2016 menjadi acuan dasar, Tahun 2017-2021 masih berlaku dan capaian akhir program prioritas Perubahan RPJMD 2016-2021.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, merumuskan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan target sasaran yang akan dicapai pada Periode 2017 -2021 serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan target pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaan selama Tahun 2017-2021.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR ....



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR   TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2016-2021

**MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG MELALUI  
HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA  
MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI PRORAKYAT, BUDAYA  
LOKAL DAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MENUJU  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas perkenan-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan. Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung ini akan menjadi salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tana Tidung untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang berisikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung beserta Agenda Pembangunan Kabupaten Tana Tidung dan Program Prioritas Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 turut pula mengakomodir seluruh potensi, kondisi dan permasalahan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang berkembang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, Perubahan RPJMD merupakan penyesuaian terhadap susunan perangkat daerah baru setelah RPJMD ditetapkan. Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui rangkaian proses kegiatan (Sinkronisasi dan Musrenbang Perubahan RPJMD) dengan substansi yang diperoleh dari masukan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pemangku kepentingan dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *topdown*, *bottom up*.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen ini tak lupa diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, merestui semua upaya dan karya kita bersama.

Tideng Pale, Januari 2019

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1-1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	1-3
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	1-6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN .....	1-8
1.4.1 MAKSUD .....	1-8
1.4.2 TUJUAN .....	1-8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .....	1-9
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	2-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....	2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	2-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	2-11
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	2-18
2.1.4 Demografi .....	2-20
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....	2-13
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	2-1
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	2-10
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	2-12
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM .....	2-13
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH .....	2-13
<b>BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	3-1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....	3-1

3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD .....	3-1
3.1.2	Neraca Daerah .....	3-8
3.2	KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2010-2016 .....	3-15
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	3-16
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	3-18
3.3	KERANGKA PENDANAAN .....	3-21
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	3-21
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	3-28
<b>BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....</b>		<b>4-1</b>
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	4-16
4.2	ISU STRATEGIS.....	4-16
<b>BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>		<b>5-1</b>
5.1	VISI DAN MISI .....	5-1
5.1.1	Visi .....	5-2
5.1.2	Misi .....	5-4
5.2	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	5-8
5.2.1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.....	5-8
5.2.2	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah dan Berwawasan Lingkungan .....	5-8
5.2.3	Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat .....	5-9
5.2.4	Menjadikan Budaya Lokal Sebagai Fondasi Pemanfaatan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Konservasi Nilai-nilai Luhur Budaya Lokal.....	5-9
5.2.5	Meningkatkan Kualitas dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Serta Infrastruktur Berbasis Iptek .....	5-9
5.2.6	Mengembangkan Kapasitas, Daya Inovasi dan Kreativitas.....	5-10

5.2.7	Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai Pusat Keunggulan dan Daya Saing di Provinsi Kalimantan Utara .....	5-10
5.2.8	Memberikan Pelayanan Publik yang Cepat, Mudah, Mudah, Adil dan Transparan .....	5-10
5.2.9	Mengembangkan Agroindustri Pertanian .....	5-11

## **BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

	<b>PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>6-1</b>
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH .....	6-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN .....	6-8
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....	6-11

## **BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

	<b>DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7-1</b>
--	--	------------

## **BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH .....**

<b>BAB 9 PENUTUP</b>	<b>.....</b>	<b>9-1</b>
----------------------	--------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	1-3
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung .....	2-3
Tabel 2.2	Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung .....	2-6
Tabel 2.3	Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung .....	2-7
Tabel 2.4	Pulau-pulau di Kabupaten Tana Tidung .....	2-6
Tabel 2.5	Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016 .....	2-9
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 .....	2-11
Tabel 2.7	Bencana Alam Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2017 .....	2-19
Tabel 2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016 .....	2-21
Tabel 2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Per Kecamatan Tahun 2012-2017 .....	2-22
Tabel 2.10	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tana Tidung Menurut Kecamatan Tahun 2012-2017 .....	2-22
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Data Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017 .....	2-23
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017 .....	2-24
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Berdasarkan Pemeluk Agama Tahun 2017 .....	2-25
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 .....	2-28
Tabel 2.15	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PRDB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016 .....	2-29
Tabel 2.16	Nilai Inflasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016 .....	2-30
Tabel 2.17	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tana Tahun 2012-2016 .....	2-31



Tabel 2.18	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-31
Tabel 2.19	Persentase Distribusi Pengeluaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-32
Tabel 2.20	Perkembangan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-32
Tabel 2.21	Angka Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-33
Tabel 2.22	Angka Melek Huruf Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 ....	2-34
Tabel 2.23	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-34
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-36
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tana Tidung Thun 2010-2016 .....	2-37
Tabel 2.26	Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 10 tahun Ke atas di Tahun 2010-2016 .....	2-38
Tabel 2.27	Angka Kematian Bayi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016 .....	2-38
Tabel 2.28	Angka Kematian Balita Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016 .....	2-39
Tabel 2.29	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016 .....	2-40
Tabel 2.30	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-40
Tabel 2.31	Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-41
Tabel 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-42

Tabel 2.33	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2010-2016 .....	2-43
Tabel 2.34	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Non Pelayanan Dasar Tahun 2010-2016 .....	2-46
Tabel 2.35	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2010-2016 .....	2-48
Tabel 2.36	Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2010-2016 .....	2-49
Tabel 2.37	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-51
Tabel 2.38	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-52
Tabel 2.39	Perkembangan Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur Tahun 2010-2016 .....	2-53
Tabel 2.40	Perkembangan Capaian Kinerja Fokus Berinvestasi Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-54
Tabel 2.41	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tana Tidung Di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-55
Tabel 2.42	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-56
Tabel 3.1	Perkembangan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-5

Tabel 3.3	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-9
Tabel 3.4	Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-9
Tabel 3.5	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-10
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016.....	3-18
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Kabupatn Tana Tidung Tahun 2010-2016.....	3-18
Tabel 3.8	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016.....	3-19
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	3-22
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016.....	3-25
Tabel 5.1	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Tana Tana Tidung Tahun 2016-2021.....	5-3
Tabel 5.2	Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	5-12
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	5-14
Tabel 5.4	Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	5-15
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.....	6-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.....	6-5
Tabel 6.3	Rancangan Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021 .....	6-6

Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	6-9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	7-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.....	7-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.....	7-3
Tabel 8.1	Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	8-2
Tabel 8.2	Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 .....	8-3
Tabel 8.3	Proyeksi Capaian Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021...	8-5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	1-8
Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung .....	2-4
Gambar 2.2 Persentase Kelas Ketinggian di Kabupaten Tana Tidung .....	2-6
Gambar 2.3 Persentase Kelas Kemiringan di Kabupaten Tana Tidung .....	2-7
Gambar 2.4 Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017.....	2-24
Gambar 2.5 Distribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 (%) .....	2-26
Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016.....	2-27
Gambar 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-34
Gambar 2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 .....	2-35
Gambar 3.1 Perkembangan APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016.....	3-1



WELCOME  
to

# TIDENG PALE

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi kerakyatan. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dalam suatu sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek seperti diuraikan di bawah ini.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari pada visi, misi, dan program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, serta memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum daerah, program dan indikator sasaran disertai dengan kerangkependanaan yang bersifat indikatif;
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021, telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, 2018 dan 2019. RPJMD juga telah memasuki tahun ketiga (RKPD 2019) yang segera akan dilaksanakan melalui APBD tahun 2019 untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, maka substansi dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 telah berubah karena adanya perangkat daerah baru yang tidak sesuai dengan RPJMD yang ada, sehingga perlu untuk melakukan perubahan RPJMD tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dan hanya dapat dilakukan apabila a). Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana

pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini; b). hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; c). terjadi perubahan yang mendasar.

Secara ringkas, Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dilakukan dengan perbaikan perumusan dan penyajian dokumen sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rincian Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

PENYAJIAN PER BAB	PERUBAHAN RPJMD
BAB 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penajaman Latar Belakang dan Penyebutan Alasan Perubahan</li> <li>• Melengkapi Dasar Hukum dengan Peraturan Perundangan Terbaru yang Relevan untuk Dirujuk</li> </ul>
BAB 2	Memperbaharui Data Kinerja Sampai dengan Tahun 2016
BAB 3	Memperbaharui Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2017 sampai dengan 2021
BAB 4	Penyempurnaan Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategi Pembangunan Daerah Sesuai dengan Pembaharuan Data dan Informasi BAB 2
BAB 5	Memperbaharui Indikator Tujuan, Sasaran dengan Target Kinerjanya
BAB 6	Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan dengan Sasaran
BAB 7	Penajaman Program Pembangunan Daerah
BAB 8	Memperbaharui Program, Indikator, Target dan Pagu sesuai Dengan Nomenkelatur Perangkat Daerah Penanggungjawab
BAB 9	Memperbaharui Indikator Kinerja Daerah
BAB 10	Memperbaharui Kaidah Pelaksanaan

Dengan demikian, Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan fokus



dilakukannya perubahan ini adalah menentukan agenda pembangunan sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada akhir periode pembangunan jangka menengah

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4750);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 16)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4).

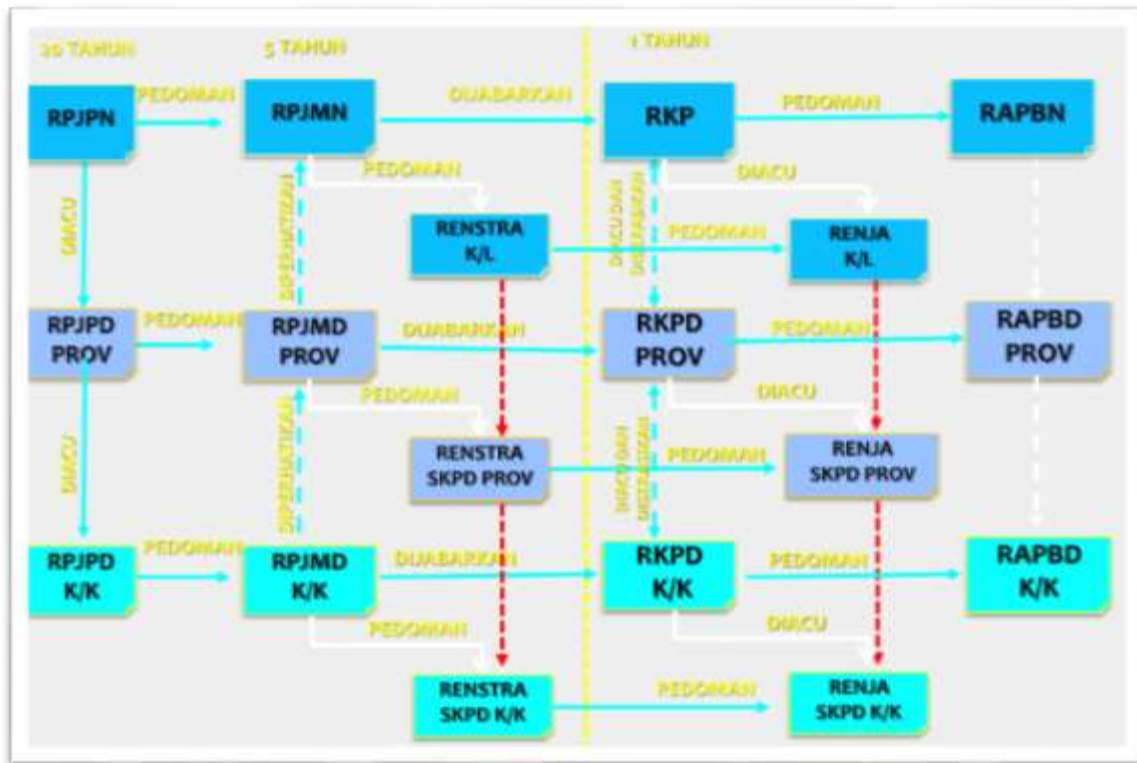
### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Hirarki perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bagi setiap daerah untuk menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD (5 tahun) disesuaikan dengan waktu Kepala Daerah terpilih yang memuat visi, misi, program KDH, renstra dan arah kebijakan Kepala Daerah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Tana Tidung dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung serta berfungsi bagi segenap pelaku pembangunan (Pemerintah Daerah dan DPRD, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat) untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan menyerasikan pengelolaan pembangunan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan memperhatikan RPJMD Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan strategi kebijakan program-program, serta kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Rencana Strategis SKPD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)

yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tahunan. Rencana Kerja SKPD yang telah disusun selanjutnya dirangkum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan prioritas pembangunan daerah, rencana ekonomi makro daerah, arah kebijakan keuangan daerah, program SKPD, lintas SKPD serta kewilayahan dan lintas kewilayahan.



**Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

## **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.4.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 dimaksudkan menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dengan peraturan perundangan yang berlaku, fenomena pembangunan serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling *update*. Dokumen ini nantinya akan menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif; menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan baik tingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

### **1.4.2 Tujuan**

Tujuan Perubahan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Perbaiki sistematika dan substansi RPJMD Kabupaten Tana Tidung.
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangka forum musyawarah pembangunan daerah secara berjenjang.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian dan evaluasi.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dalam menentukan program-program pembangunan yang

ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator.

7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan seperti diuraikan di bawah ini.

***Bab I Pendahuluan***, berisi tentang: latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan.

***Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah***, menguraikan tentang: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

***Bab III Gambaran Keuangan Daerah***, mencakup gambaran tentang: kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

***Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis***, menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

***Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran***, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran.

***Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah***, menguraikan tentang arah kebijakan dan strategi yang dilakukan berdasar strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

**Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah,** menguraikan tentang program prioritas dalam pencapaian keberhasilan pencapaian visi dan misi yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pencapaian indikator kinerja, pagu indikatif dan Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.

**Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,** menguraikan tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja daerah.

**Bab IX Penutup,** menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah





## **BAB 2**

### **GAMBARAN KONDISI DAERAH**

#### **2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Kondisi geografi dan demografi merupakan dua faktor penting dan mendasar yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kondisi geografi akan memberikan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya alam, mulai dari luas lahan, mineral dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, hingga fisiografi lahan beserta flora dan fauna yang berada di atasnya. Sedangkan, kondisi demografi merupakan gambaran tentang ketersediaan sumberdaya manusia, baik ditinjau dari aspek kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung.

##### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

###### **A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012 tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara tersebut.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km<sup>2</sup>, dengan ibukota kabupaten terletak di Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, terdiri dari 3 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Tana Tidung, maka dipandang perlu pemekaran wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2012, wilayah kecamatan Kabupaten Tana Tidung bertambah menjadi 5 wilayah kecamatan. Sehingga Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 29 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia Kecamatan Betayau dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 kecamatan atau 32 Desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km<sup>2</sup> membawahi 7 Desa, yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale Timur, Gunawan dan Sebangang.
2. Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km<sup>2</sup> membawahi 8 Desa, yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, Badan Bikis, Sepala Dalung, Seludau, Menjeletung, dan Sesayap Selor.
3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km<sup>2</sup> membawahi 5 Desa, yaitu Desa Tanah Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan.
4. Kecamatan Betayau, dengan luas 1.007,65 Km<sup>2</sup> membawahi 6 Desa, yaitu Desa Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan Periuk.

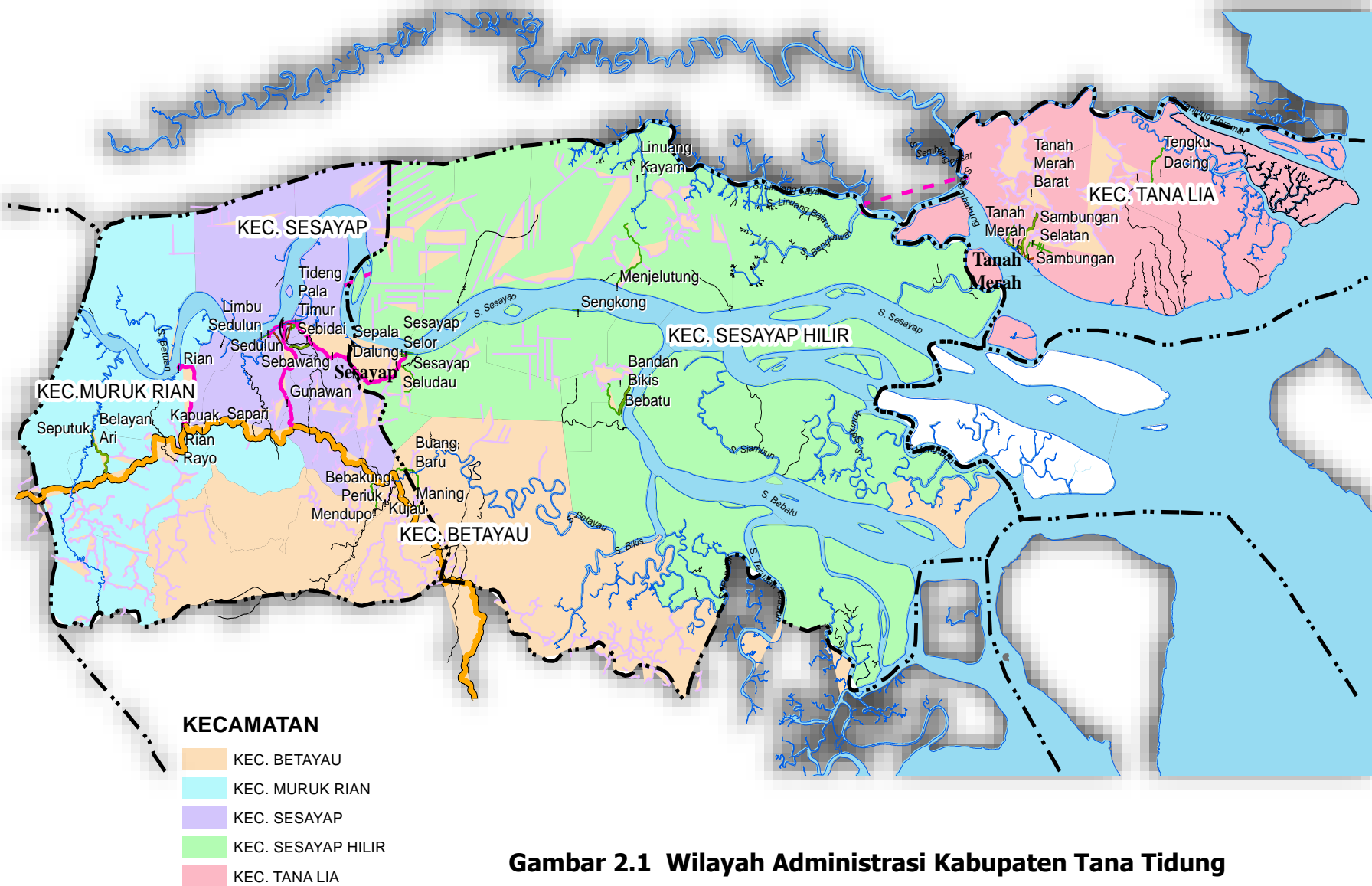
5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas 608,62 Km<sup>2</sup> membawahi 6 Desa, yaitu Seputuk, Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, Sapari

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa
1	Sesayap	1.016,92	7
2	Sesayap Hilir	1.317,53	8
3	Tana Lia	877,86	5
4	Betayau	1.007,65	6
5	Muruk Rian	608,62	6
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,58</b>	<b>32</b>

*Sumber: Perda No. 5 Tahun 2011 dan Perda No. 10 Tahun 2012*

Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung**

## **B. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara, secara astronomi terletak diantara  $116^{\circ} 42' 50''$  -  $117^{\circ} 49' 50''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ} 12' 02''$  -  $3^{\circ} 46' 41''$  Lintang Utara. Kabupaten Tana Tidung berada di tengah-tengah antara Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang merupakan jalur strategis perekonomian. Berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau, dan Nunukan. Gambaran karakteristik wilayah Kabupaten Tana Tidung dapat dideskripsikan berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada. Wilayah Kabupaten Tana Tidung terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu: kawasan perbukitan dan kawasan non perbukitan. Kawasan perbukitan termasuk hutan, hutan lindung, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis. Sedangkan kawasan Non perbukitan meliputi daerah pemukiman penduduk, zona pertanian, dan kawasan-kawasan lain yang sejenis.

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);
- b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;
- c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).

## **C. Topografi**

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap.

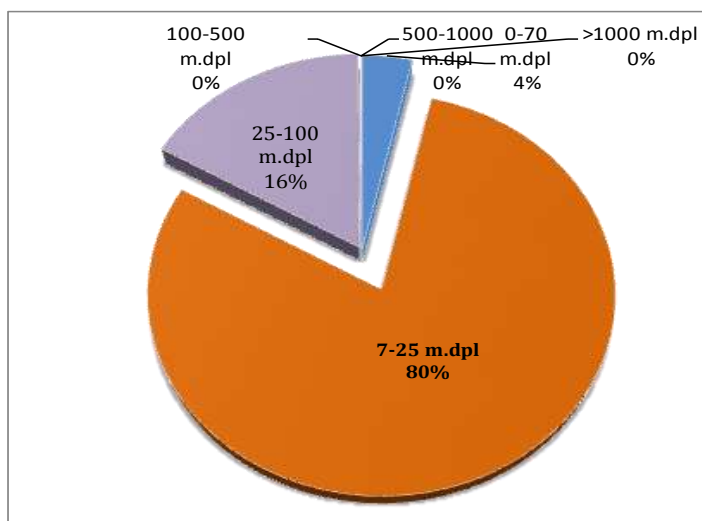
Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m.

Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian  $\pm$  500 m di atas permukaan laut.

**Tabel 2.2**  
**Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung**

No	Ketinggian	Kelas Ketinggian	Persentase (%)
1	0-70 m.dpl	11.034	3,57
2	7-25 m.dpl	246.733	79,80
3	25-100 m.dpl	51.029	16,51
4	100-500 m.dpl	22	0,01
5	500-1000 m.dpl	302	0,10
6	>1000 m.dpl	0	0

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017



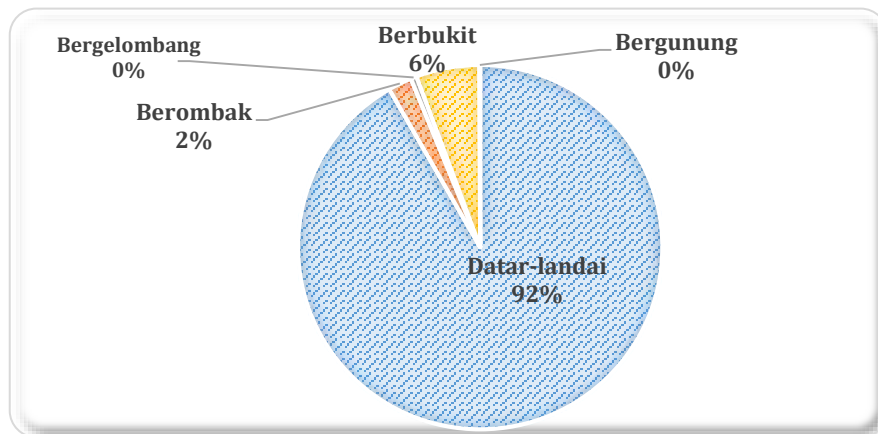
**Gambar 2.2** Persentase Kelas Ketinggian di Kabupaten Tana Tidung  
(Sumber: Analisis Data, 2017)

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

**Tabel 2.3**  
**Kelas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung**

No	Kemiringan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Datar-landai	4.426,578	91,686
2	Berombak	101,395	2,100
3	Bergelombang	25,368	0,525
4	Berbukit	271,192	5,617
5	Bergunung	3,467	0,072
Jumlah		4.828	100,00

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017*



**Gambar 2.3** Persentase Kelas Kemiringan di Kabupaten Tana Tidung  
(Sumber: Analisis Data)

#### **D. Geologi**

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian Dan Gunung Aung.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

**Tabel 2.4**  
**Pulau-pulau di Kabupaten Tana Tidung**

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	No.	Nama Pulau	Luas (Ha)
1	Baru	92,78	21	Sebidai Selatan	46,08
2	Baru Lumot	81,95	22	Sebidai Utara	18,96
3	Bekaro	102,80	23	Sekabat	51,50
4	Bengkalung	184,65	24	Sekapal	84,46
5	Fani	264,02	25	Sengato	3.484,85
6	Ijap	2.883,18	26	Sengato Tengah	88,47
7	Iting-iting	972,08	27	Sepakang	13,61
8	Kranggasan Barat	355,40	28	Sesayap	119,83
9	Kranggasan Timur	331,24	29	Siambun	74,53
10	Linuang Bujung	1.908,88	30	Sida	4.598,80
11	Lisan	17,72	31	Singa	78,19
12	Mandul	35.291,76	32	Sumbing	76,83
13	Mandul Lumot	3.397,90	33	Tembalang	220,58
14	Mangkudulis Besar	26.127,22	34	Tembangan	1.150,86
15	Mangkudulis Kecil	3.942,14	35	Tempodus	48,91
16	Mengkasak	1.696,90	36	Tengku Dacing	1.760,39
17	Mensatul	851,90	37	Tiga	516,86
18	Saka	19,50	38	Tiram	29,84
19	Sapunti	147,88	39	Umbus	38,2
20	Sebidai	173,16			

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batuan termalihkan dan batuan hasil prodak gunungapi ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatannya sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatannya logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatannya minyak bumi dengan



bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

## E. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–500 m. Kabupaten Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km (termasuk yang erada di wilayah Malinau), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai Betayau.

## F. Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 221 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 18 hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 adalah 27,4 °C, berkisar antara 21,3°C- 36,4°C. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 44% sampai 100% dengan rata-rata selama tahun 2016 adalah 84%.

**Tabel 2.5**  
**Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016**

Tahun	Curah Hujan (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahun)
2012	2.738,0
2013	3.154,3
2014	2.654,6
2015	2.473,0
2016	3.598,1

Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

## **G. Penggunaan Lahan**

Sumberdaya lahan di Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 – 2032, tentang status kawasan hutan, seluas 4.828,58 Km<sup>2</sup> atau 482.858 Ha, secara garis besar terbagi menjadi kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/KPTS-II/2001 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 554/Menhut-II/2013, Kawasan budidaya kehutanan (KBK) mencakup luasan 170.340,64 Ha (53%) yang terbagi lagi terdiri dari hutan produksi (HP) seluas 151.378,24 Ha, hutan produksi terbatas (HPH) seluas 9.058,58 Ha serta hutan produksi konversi (HPK) seluas 9.876,82 Ha. Sedangkan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang terdiri dari areal penggunaan lain (APL) seluas 163.771,70 Ha (41%) dan Tubuh Air seluas 23.402,22 Ha (7%).

Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah hutan, karena itu dari penggunaan lahan di Kabupaten Tana Tidung didominasi oleh sektor kehutanan. Sekitar 53 % adalah hutan, baik itu hutan lindung, hutan negara, sebagian digunakan untuk pertanian melalui pola pengelolaan konsesi. Disamping peruntukan tersebut, peruntukan lahan digunakan sebagai pemukiman, kawasan konservasi, buffer zone, pusat pemerintahan, pemukiman desa, hutan lindung, dan lain-lain. Selain digunakan kawasan pertanian dan perkebunan, lahan di Kabupaten Tana Tidung juga digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pemukiman warga.

**Tabel 2.6**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016**

No	Tutupan Lahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Prosentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	158,95	0,47
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	897,66	19,00
3	Hutan Mangrove Primer	9,76	0,35
4	Hutan Mangrove Sekunder	102,40	5,86
5	Hutan Rawa Primer	122,49	4,66
6	Hutan Rawa Sekunder	505,00	24,09
7	Hutan Tanaman	5,24	0,11
8	Lahan Terbuka/Kosong	23,33	1,11
9	Pemukiman	24,78	0,08
10	Perkebunan	812,76	0,14
11	Pertambangan	59,86	0,22
12	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	68,18	1,58
13	Semak Belukar	470,16	11,34
14	Semak Belukar Rawa	840,61	20,04
15	Tambak	727,40	10,96
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,58</b>	<b>100</b>

*Sumber : Interpretasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS Tahun 2016*

Sebagai daerah pemekaran, kondisi awal kabupaten tana tidung masih sangat terbatas terutama dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung pada pelayanan masyarakat, antara lain belumnya terbangun kantor pemerintahan yang representatif, sarana dan prasarana transportasi darat dengan status lahan masih pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sulitnya mendapatkan lahan produktif untuk aktifitas pertanian masyarakat, serta status kepemilikan lahan yang secara riil dimiliki masyarakat belum mempunyai aspek legalitas.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, adapun potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

1. Sistem Pusat Pelayanan dengan potensi Pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan adanya ketersediaan fasilitas. Pusat pelayanan tersebut yang akan menentukan hierarki pusat pelayanan sesuai dengan konsepsi perwilayahan dan visi pembangunan kabupaten. Orientasi pusat pelayanan permukiman adalah ke

wilayah Tideng Pale, Sedulun dan Tideng Pale Timur. Pemekaran Kabupaten Tana Tidung secara langsung diikuti pembangunan sarana prasarana pendukung dan akan menarik pertumbuhan permukiman baru.

2. Sistem Perwilayahan Pembangunan dengan potensi Penentuan sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi yang besar untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya pembagian Wilayah Pengembangan (WP) yang tersebar merata mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka distribusi fasilitas pelayanan umum tidak hanya akan terpusat di salah satu wilayah saja, namun dapat merata ke semua Wilayah Pengembangan (WP) yang melingkupi beberapa kecamatan di dalamnya. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi di tiap sub satuan wilayah pengembangan berpotensi meningkatkan aktifitas masyarakat di dalam wilayah tersebut. Pembentukan wilayah pengembangan (WP) barat mutlak dilakukan mengingat wilayah ini merupakan jantung Kabupten Tana Tidung dengan fungsi utamanya sebagai pusat pemerintahan serta pusat perekonomian (jasa dan perdagangan).
3. Secara hirarki WP ini terdiri dari kota-kota hiraki I dan hiraki II, yang diharapkan dapat menjadi pemicu terhadap perkembangan WP lainnya, karena memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Orientasi kegiatan lainnya pada wilayah pengembangan ini adalah pertanian, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Untuk pembentukan wilayah Tengah dan Timur disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang berorientasi pada kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Penetapan pusat pertumbuhan utama tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerataan perkembangan menuju setiap bagian wilayah (*spread effect*).
4. Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan dengan potensi Kawasan Ibukota Kabupaten Tana Tidung merupakan permukiman dengan segala aktivitasnya. Pusat-pusat permukiman akan membentuk nodes atau simpul wilayah yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pelayanan sosial ekonomi. Pusat permukiman di Kabupaten Tana Tidung baik permukiman

perdesaan maupun permukiman perkotaan memiliki potensi sebagai kawasan permukiman yang berkembang memiliki skala pelayanan dan hirarki tertentu. Permukiman perdesaan memiliki pusat pelayanan mulai dari Pusat Desa, Desa Pusat pertumbuhan, dan perkotaan terdapat perkotaan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL).

5. Pengembangan prasarana wilayah yang dilihat dari aspek transportasi darat, sungai/laut, telekomunikasi, prasarana lingkungan, air bersih dan prasarana irigasi. Adapun potensi tersebut yaitu : Prasarana transportasi Untuk akses masuk ke dalam dan ke luar Kabupaten Tana Tidung dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu melalui jalur darat (jalan raya) dan jalur perairan (sungai). Transportasi darat dengan *potensi* : adanya jaringan jalan arteri primer sebagai Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan beberapa daerah, yang terbentang dari perbatasan Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, ke arah barat menuju Kabupaten Malinau-Simanggaris dan ke arah selatan menuju Tanjung Selor-Samarinda. Adanya jaringan jalan tersebut menjadi penghubung antar wilayah sebagai transformasi aliran barang dan penumpang yang mempunyai komposisi sebagai pembuka keterhubungan antar kawasan.

Transportasi Laut/ Perairan dengan potensi : Angkutan laut dan sungai mempunyai peranan penting dalam hal transportasi di Kabupaten Tana Tidung. Hal tersebut dikarenakan akses angkutan laut dan sungai lebih mudah daripada melalui darat. Adanya Pelabuhan Tideng Pale memudahkan penduduk untuk mengakses daerah lain. Adanya pelabuhan tersebut didukung pula oleh aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Tideng Pale cukup tinggi. Adanya potensi tersebut, maka perlu pengembangan agar akses ke suatu wilayah dengan transportasi sungai/laut ditingkatkan.

Prasarana Energi/ Listrik dengan potensi : Wilayah Kabupaten Tana Tidung telah terlayani oleh jaringan listrik, terutama pada kawasan permukiman dan sarana umum. Prasarana kelistrikan dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas dan kegiatan, seperti penerangan, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Sambungan listrik di Kabupaten Tana Tidung menggunakan listrik

PLN dan non-PLN. Selain itu, adanya PLTD akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan listrik Kabupaten Tana Tidung.

Prasarana Air Bersih dengan potensi : Pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tana Tidung dengan memanfaatkan air permukaan (sungai) sebagai sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Tana Tidung. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Tana Tidung terutama sungai relatif berlimpah. Hal tersebut memberikan alternatif pemanfaatan sumber daya air yang relatif murah. Sistem perpipaan yang telah ada membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya, sehingga kuantitas air bersih telah tercukupi. Selain itu, masyarakat juga menampung air di tandon-tandon untuk mengantisipasi kekurangan air.

Prasarana Irigasi dengan potensi : Luas tanah sawah di Kabupaten Tana Tidung relatif kecil yaitu sebesar 335 hektar, dari luas lahan tersebut sebesar 55 hektar beririgasi setengah teknis. Jenis pengairan yang masih mendominasi adalah sawah pasang surut. Walaupun jumlah sawahnya yang relatif kecil, prasarana irigasi tersebut memiliki potensi bagi produksi pertanian sebagai pendukung sektor pertanian di Kabupaten Tana Tidung. Selain itu, adanya sungai di Kabupaten Tana Tidung membantu untuk mengairi tanah pertanian sawah.

Prasarana Telekomunikasi dengan potensi : Sarana komunikasi yang tersedia di Kabupaten Tana Tidung yaitu kantor pos dan giro. Selain itu, adanya sambungan telepon kabel, telepon seluler memudahkan masyarakat untuk melakukan komunikasi ke daerah lain. Mengingat, kegiatan masyarakat dalam hal bisnis dan orientasi kegiatan masyarakat pada sektor-sektor tertentu juga tinggi. Ketersediaan jaringan telekomunikasi tersebut akan berdampak pada aktivitas masyarakat.

Prasarana Lingkungan dengan potensi : Pengembangan prasarana lingkungan yaitu dengan peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, limbah padat berupa persampahan harus ditanggulangi, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Seluruh produksi sampahnya harus dikelola secara terpadu, yaitu melalui mekanisme pewadahan,

pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan peran serta masyarakat. Selain itu prinsip 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*) harus disosialisasikan ke masyarakat yaitu menggunakan kembali bahan-bahan sisa yang dapat dimanfaatkan kembali (seperti plastik pembungkus, kertas-kertas untuk pembungkus), mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa menimbulkan sampah serta mendaur ulang sampah (pengolahan sampah organik untuk kompos).

6. Pola ruang Kawasan Lindung memiliki potensi untuk perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan.

Kawasan Perlindungan Bawahannya Potensi : Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi untuk melindungi atau memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. Adanya kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Tidung akan memberi perlindungan pada kawasan bawahannya

Kawasan Perlindungan Setempat Potensi : Kawasan perlindungan setempat terdiri dari perlindungan kawasan kawasan sekitar sempadan sungai, dan sempadan pantai. Pengamanan sekitar sempadan sungai dan pantai akan mengurangi erosi dan abrasi yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut.

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Potensi : Kawasan suaka alam dan cagar budaya di Kabupaten Tana Tidung meliputi kawasan pantai berhutan bakau (mangrove). Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Ekosistem mangrove mempunyai makna dan peranan dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai, dan sumber daya pantai yang terkait termasuk perikanan, dan melalui produk yang dihasilkan dari

ekosistem tersebut sebagai suatu sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan di sekitar

**Kawasan Rawan Bencana Potensi :** Bencana alam di daerah rawan sering terjadi akibat kurang memperhatikan wawasan lingkungan, potensi bencana di area kawasan lindung seperti terjadinya banjir atau longsor. Potensi rawan banjir terjadi pada daerah-daerah yang memiliki ketinggian lebih rendah dari permukaan sungai jika terjadi luapan sungai yang besar pada musim hujan. Kawasan ini dijumpai pada kawasan hutan rawa gambut sekitar Desa Tidung Pale Timur dan daerah bantaran Sungai Sesayap. Kawasan longsor rawan terjadi pada daerah-daerah yang memiliki kemiringan lahan 40% yang seharusnya merupakan kawasan non budidaya, seperti pada kawasan perbukitan di Tidung Pale. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.

**Kawasan Budidaya Hutan Produksi Potensi :** Potensi kehutanan merupakan potensi yang amat menonjol di Kabupaten Tana Tidung, disamping potensi pertambangan. Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi kehutanan yang cukup besar dan memiliki areal yang sangat potensial, baik ditinjau dari segi luas maupun dari segi kualitas hasil hutan adalah :

**Pertanian Potensi :** Pengembangan lahan pertanian tanaman dikembangkan sesuai dengan kondisi jaringan irigasi. Walau, luas lahan pertanian relatif kecil, Kabupaten Tana Tidung memiliki potensi pertanian untuk pengembangan sektor pertanian, sehingga memiliki produksi pertanian yang mendukung sektor pertanian Kabupaten Tana Tidung.

**Perkebunan Potensi :** Kondisi fisik di Kabupaten Tana Tidung yang terdiri atas dataran tinggi dan dataran rendah menjadikan Tana Tidung secara alamiah memiliki potensi besar untuk pengembangan perkebunan, seperti kelapa, kopi, kakao, dan lada.

**Peternakan Potensi :** Potensi ternak besar, kecil maupun unggas juga ada di Kabupaten Tana Tidung. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Peran serta masyarakat



dan pelaku ekonomi bidang ternak menjadikan ternak memiliki potensi untuk berkembang di Tana Tidung.

**Perikanan Potensi :** perikanan di Kabupaten Tana Tidung mencakup potensi budidaya air tawar, air payau, budidaya laut, dan perikanan tangkap. Potensi tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Tana Tidung yang dilalui sungai yang memiliki lebar permukaan terpanjang di Kalimantan mencapai 2,5 km. Komoditas perikanan yaitu udang windu, ikan bandeng, dan kepiting bakau.

**Pertambangan Potensi :** Sektor pertambangan merupakan sektor yang berperan cukup besar sebagai sumber penerimaan devisa terutama yang datang dari pendapatan ekspor minyak dan gas, batubara, serta methanol. Kawasan pertambangan yang terbesar yaitu tambang batu bara yang tersebar.

**Permukiman Potensi :** Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya.

**Industri Potensi :** Adanya industri pemotongan kayu juga menyumbang kontribusi bagi PDRB Kabupaten Tana Tidung. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Tana Tidung, maka pada dasarnya setiap wilayah akan dikembangkan kawasan industri sesuai dengan potensi setiap kawasan. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri pertanian, industri perikanan, dan industri pertambangan.

**Pariwisata Potensi :** Kawasan pariwisata di Kabupaten Tana Tidung dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu wisata pantai, wisata alam, dan wisata budaya. Wisata pantai terdapat di Kecamatan Tana Lia, wisata alam terdapat di Gunung Rian, dan wisata budaya di semua kecamatan. Adanya sektor pariwisata tersebut perlu adanya pengembangan sehingga bisa memberikan masukan bagi pendapatan kabupaten.

## 7. Pengembangan Kawasan Strategis meliputi :

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Potensi : Potensi ekonomi Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari perkembangan PDRB dan sektor ekonomi basis. Berdasarkan PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016, lapangan usaha pertanian menjadi sektor unggulan yang memberikan sumbangan terbesar bagi pembentukan PDRB Kabupaten Tana Tidung. Pertanian saat ini merupakan sektor yang masih berperan terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tana Tidung, hal ini dari ditinjau sumbangan per sektor terhadap besaran PDRB Kabupaten Tana Tidung atas dasar harga berlaku di tahun 2016, sektor pertanian menyumbang nilai Rp 1.290,16 (dalam milyar) dari total nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung. Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Tana Tidung. Sampai tahun 2014, luas lahan pertanian baik pertanian lahan basah maupun lahan kering di Kabupaten Tana Tidung adalah sebesar 1.822 Ha.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Potensi Di Kabupaten Tana Tidung terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu, juga masih terdapat upacara-upacara adat yang masih mengindahkan kearifan lokal.

Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Potensi : Penataan kawasan menuju kualitas yang lebih baik sebagai kawasan yang dikembangkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Dengan demikian, program pembangunan fisik maupun nonfisik secara bertahap diimplementasikan sesuai rekomendasi Kepala Daerah/Bupati Tana Tidung.

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, Kabupaten Tana Tidung termasuk potensi rawan bencana longsor, banjir dan kebakaran skala ringan. Daerah tertentu merupakan daerah rawan bencana skala menengah. Longsor kemungkinan terjadinya berskala kecil terutama pada tebing sungai akibat erosi

lateral sungai Daerah rawan bencana tanahh longsor skala menengah lebih banyak oleh aktivitas manusia seperti potongan lereng tanpa perhitungan dan perubahan batas peralihan litologi karena adanya penggundulan hutan dan terjadi di musim hujan diatas normal.

Berdasarkan peta potensi bencana Kabupaten Tana Tidung terdapat kawasan potensi bencana tanah longsor dan banjir: (perlu peta utuk sebarannya)

- a. Kawasan potensi bencana longsor, meliputi kawasan yang berada di sekitar Kecamatan Sesayap dan Kawasan Gunung Rian dan sekitarnya
- b. Kawasan potensi banjir, meliputi Desa Sengkong, Bandan Bikis, Bebatu dan Menjelutung.

**Tabel 2.7**  
**Bencana Alam Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2017**

No.	Kecamatan	Jenis Bencana	Kerusakan	Jumlah Korban	Perkiraan Kerugian (Rp)
1.	Sesayap a. Tideng Pale	Kebakaran Pemukiman	1 Unir Rumah (Rusak Ringan)	-	-
	b. Tideng Pale Timur	Puting Beliung dan Kebakaran Pemukiman	5 Unit Rumah (Rusak Ringan)	5 KK	
	c. Limbu Sedulun	Kebakaran Kantor Desa	1 Unit Bangunan (Rusak Berat)	-	
3	Sesayap Hilir a. Sesayap	Puting Beliung	-	1 KK	
	b. Sepala Dalung	Kecelakaan Speedboat	-	17 Orang Dewasa dan 2 Balita	
	c. Bebatu	Kebakaran Pemukiman	1 Unit Rumah (Rusak Berat)	1 KK	
2.	Betayau Buang Baru	Kebakaran Pemukiman	1 Unit Rumah (Rusak Ringan), 2 Unit (Rusak Ringan)	3 KK	-
3.	Tana Lia Tanah Merah	Kebakaran Pemukiman	2 Unit Rumah (Rusak Ringan), 1 Unit Rumah (Rusak Berat)	3 KK	-

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung, Podes 2014-2017

Banjir lebih dominan di *landform group* gambut dan sebagian group fluviomarin atau lebih spesifik di daerah delta dengan kejadian di musin hujan (curah hujan diatas normal).

Gempa bumi sempat melanda Kabupaten Tana Tidung pada akhir Tahun 2015. Sebelumnya wilayah ini tidak disebutkan termasuk daerah rawan gempa. Pada Senin dinihari, 21 Desember 2015. Gempa dengan kekuatan 6,1 skala

Richter terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara, Terjadi di 3,61 Lintang Utara, dan 117.71 Bujur Timur. Jika lihat di peta terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Tanah Lia dengan kedalaman 10 Kilometer, tepatnya di sekitar perairan dekat Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Gempa ini dirasakan juga oleh masyarakat Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kota Tarakan menyebutkan bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan aktivitas gempa bumi kerak dangkal (*shallow crustal earthquake*) jenis *intraplate* dengan *hiposenter* dangkal. Itu terjadi karena sesar yang aktif, yang merupakan patahan mendatar (*strike-slip fault*). Kondisi tektonik di bagian timur Pulau Kalimantan yang cukup kompleks, sehingga zona ini merupakan kawasan paling rawan gempa bumi di Pulau Kalimantan. Selain disebabkan adanya beberapa struktur geologi sesar turun kerawanan, gempa bumi di zona ini juga terjadi karena adanya beberapa struktur sesar mendatar. Zona Nunukan-Tarakan dan sekitarnya secara tektonik diapit tiga sistem sesar mendatar. Di sebelah selatan terdapat dua sistem sesar yang berarah barat daya-tenggara, yaitu zona Sesar Mangkalihat (*Mangkalihat fault zone*) dan zona Sesar Maratua (*Maratua fault zone*). Zona Sesar Mangkalihat merupakan sesar kelanjutan dari Sesar Palu-Koro yang melintas dekat Kota Tanjung Redeb. Keberadaan zona Sesar Maratua juga tidak kalah penting untuk diperhatikan karena ujung sesar ini terletak di lautan yang lokasinya berdekatan dengan Kota Tanjung Selor. Adapun di sebelah utara Pulau Tarakan juga terdapat zona Sesar Sempurna (*Sempurna fault zone*) yang melintas dari Laut Sulawesi hingga Sabah Malaysia, dan melintasi kawasan yang berdekatan dengan Pulau Sebatik.

Akibat terjadinya gempa tersebut, menyebabkan kerusakan ringan pada beberapa bangunan permanen dan semi permanen. Meskipun akibat gempa bumi ini, tidak menimbulkan kerugian materiil yang relatif kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi perlu mendapat perhatian dan cepat tanggap untuk penanganan pascabencana.

#### 2.1.4 Demografi

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai sunjek dan objek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

##### A. Perkembangan Jumlah Penduduk

Indikator perkembangan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 tercatat sebesar 23.497 jiwa, meningkat 7,34 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2015.

**Tabel 2.8**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
1.	2012	17.079	4,42
2.	2013	18.985	11,16
3.	2014	20.400	7,45
4.	2015	21.891	7,31
5.	2016	23.497	7,34
6.	2017	25.084	6,75
Rata-rata Pertumbuhan (%)			7,99

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung*

Pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir rata-rata adalah sebesar 7,99 persen. Angka ini cukup tinggi, mungkin disebabkan karena Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonom baru, yang menyebabkan migrasi masuk ke wilayah ini meningkat.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Per**  
**Kecamatan Tahun 2012-2017**

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)						Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Sesayap	9.575	7.864	8.226	8.828	9.479	10.118	1,39
2.	Sesayap Hilir	5.102	5.279	5.680	6.093	6.536	6.979	8,15
3.	Tana Lia	2.402	2.665	2.863	3.073	3.299	3.522	10,04
4.	Betayau	tad	2.072	2.225	2.388	2.563	2.736	9,71
5.	Muruk Rian	tad	1.105	1.406	1.509	1.620	1.729	16,09
Jumlah		17.079	18.985	20.400	21.891	23.497	25.084	8,30

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017*  
*tad/bt =tidak ada data/belum terbentuk*

## B. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Secara demografi penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data BPS pada tahun 2016 sebanyak 20.400 jiwa, penyebaran penduduk dari lima kecamatan tidak merata seperti tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sesayap sebanyak 8.226 jiwa sedangkan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Muruk Rian sebanyak 1.406 jiwa.

Pola persebaran penduduk Kabupaten Tana Tidung per kecamatan dilihat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya. Kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Tana Tidung adalah 4,22 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.10**  
**Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk kabupaten Tana Tidung Menurut**  
**Kecamatan Tahun 2012-2017**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sesayap	1.016,92	9,42	7,73	8,09	8,68	9,32	9,95
2.	Sesayap Hilir	1.317,53	3,87	4,01	4,31	4,62	4,96	5,30
3.	Tana Lia	877,86	2,74	3,04	3,26	3,50	3,76	4,01
4.	Betayau	1.007,65	tad	2,06	2,21	2,37	2,54	2,72
5.	Muruk Rian	608,62	tad	1,82	2,31	2,48	2,66	2,84
<b>Jumlah</b>		<b>4.828,58</b>	3,54	3,93	4,22	4,53	4,87	5,19

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung*  
*tad/bt =tidak ada data/belum terbentuk*

Sedangkan berdasarkan pemuktahiran data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, jumlah penduduk tahun 2017 per 1 Januari 2018 sebanyak 23.783 jiwa.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan data**  
**Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah			Jumlah Jiwa		
		Desa	RT	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sesayap	7	28	2.951	5.173	4.685	9.858
2.	Sesayap Hilir	8	31	1.896	3.531	3.102	6.633
3.	Tana Lia	5	26	933	1.804	1.499	3.303
4.	Betayau	6	21	695	1.342	1.234	2.576
5.	Muruk Rian	6	12	419	737	676	1.413
	<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>118</b>	<b>6.897</b>	<b>12.587</b>	<b>11.196</b>	<b>23.783</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, 31 Desember 2017*

Dari data diatas, menunjukkan bahwa sebaran penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang paling banyak adalah di Kecamatan Sesayap yaitu sebesar 41,45 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk. Kecamatan Sesayap merupakan daerah perkotaan kabupaten dimana ibukota Kabupaten terletak di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Terdapat pusat pemerintahan dan jasa. Sedangkan proporsi sebaran penduduk yang terkecil adalah di Kecamatan Betayau dan Muruk Rian. Dua kecamatan ini merupakan kecamatan baru yang dimekarkan pada tahun 2012 lalu.

### **C. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017 sebanyak 13.800 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 11.284 jiwa. Struktur umur penduduk pada tahun 2017 memperlihatkan penduduk tertinggi terdapat pada usia 0 – 4 tahun yaitu 3.331 jiwa, dan penduduk terendah terdapat pada usia > 75 tahun yaitu 158 jiwa.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, Kabupaten Tana Tidung dapat dikatakan sebagai daerah dalam transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah pada usia tua. Komposisi penduduk tersebut dapat diasumsikan karena Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah terbuka dimana mobilitas penduduk tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana

Tidung terus meningkat. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.12

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2017**

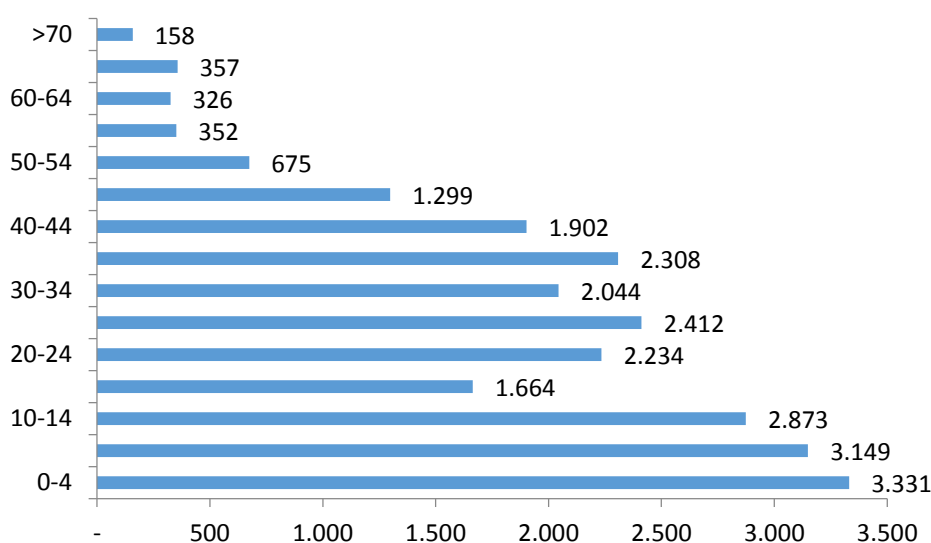
No	Kecamatan	Penduduk			Rasio L/P
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sesayap	5.411	4.707	10.118	114,96
2	Sesayap Hilir	4.154	2.825	6.979	147,04
3	Tana Lia	1.908	1.614	3.522	118,22
4	Betayau	1.436	1.300	2.736	110,46
5	Muruk Rian	891	838	1.729	106,32
<b>Jumlah</b>		<b>13.800</b>	<b>11.284</b>	<b>25.084</b>	<b>122,30</b>

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

#### D. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa penduduk dengan kelompok usia 0-4, 5-9 dan 10-14 mempunyai jumlah paling tinggi di Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2017.

Piramida penduduk Kabupaten Tana Tidung mengembang dibagian atas, yang berarti penduduk usia muda cukup dominan di Kabupaten ini. Komposisi penduduk menurut umur ini memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga sudah tidak/belum produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia produktif, maka semakin besar yang ditanggung pemerintah.



**Gambar 2.4** Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017 (Sumber : Analisis Data, 2017)



## E. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Gambaran komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai bahan untuk perencanaan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan agama yang dianut pada Tahun 2016, mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 77,30 persen, kemudian diikuti pemeluk agama Protestan sebanyak 15,01 persen dan pemeluk Katolik sebanyak 8,03 persen.

## F. Komposisi Penduduk Menurut Suku

Keanekaragaman suku di Kabupaten Tana Tidung cukup beragam. Suku Tidung, Berusu, Lundayeh merupakan penduduk asli, sedangkan suku Jawa, Bugis, Banjar dan Toraja merupakan penduduk pendatang.

**Tabel 2.13**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan**  
**Pemeluk Agama Tahun 2016**

No	Agama	Jumlah Penduduk	
		Jiwa	%
1.	Islam	18.512	78,52
2.	Katholik	1.973	8,40
3.	Protestan	3.038	12,93
4.	Hindu	3	0,01
5.	Budha	33	0,14
	<b>Jumlah</b>	<b>23.497</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017*

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

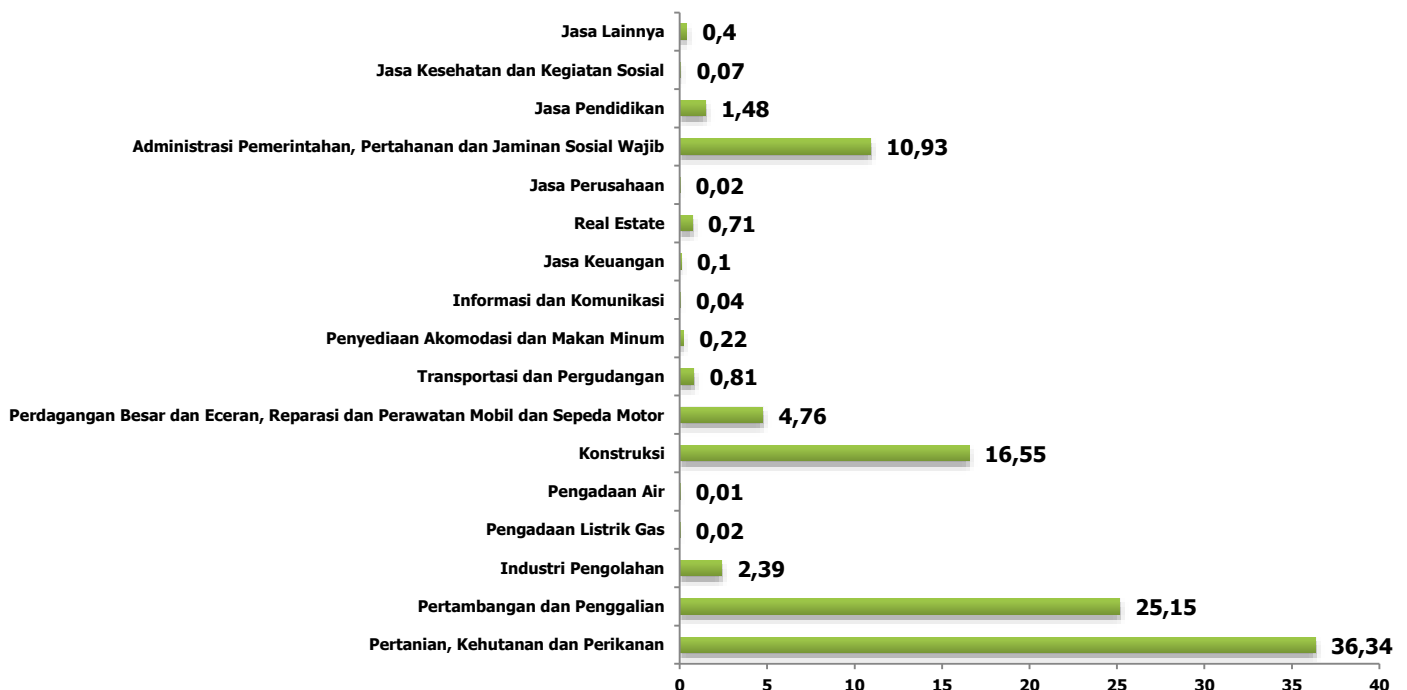
### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan meminimalkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Adapun indikator yang digunakan pada fokus ini meliputi :

## 1. Produk Domestik Bruto Regional

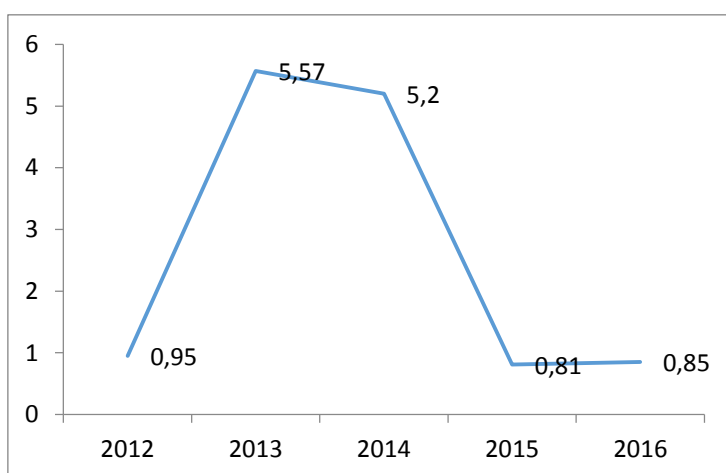
Perekonomian Kabupaten Tana Tidung sangat didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA), terutama dari sektor pertambangan dan penggalian, serta pertanian. Jumlah seluruh nilai tambah yang tercipta akibat kegiatan ekonomi (PDRB) harga konstan di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 adalah sebesar 3.262.604,00 juta rupiah.

Distribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2016 terbesar sekitar 36,34% berasal dari nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Terbesar kedua sebesar 25,15% dari nilai tambah yang berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian, selanjutnya disusul oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 16,55%, berikutnya sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,93%, dan sektor lainnya secara keseluruhan hanya memberikan kontribusi dibawah 5%. Distribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 seperti disajikan pada Gambar 2.5



**Gambar 2.5** Distribusi PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 (%)  
(Sumber: Analisis Data, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Berdasarkan tabel 2.15 di tahun 2012 PDRB ADHB Rp 3,19 triliun meningkat menjadi Rp 4,22 triliun pada tahun 2016. Sedang capaian PDRB ADHK pada tahun 2012 Rp 2,88 triliun meningkat menjadi Rp 3,26 triliun pada tahun 2016. Dengan dua jenis penilaian PDRB yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini dan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Hasil analisis pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 disajikan dalam Tabel 2.14 dan Tabel 2.15.



**Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Tidung tahun 2012-2016**  
(Sumber: Analisis Data, 2017)

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2012-2016, menunjukkan penguatan. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 hingga 2014 tercatat masing-masing sebesar 0,95% dan 5,2%. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2015 hingga 2016 menguat pada angka 0,81% dan

0,85%. Seperti pada umumnya daerah non perkotaan, penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tana Tidung ini sebagian besarnya ditopang oleh hasil sumber daya alam. Dengan adanya perubahan tahun dasar perhitungan yang sebelumnya menggunakan tahun 2000, mulai tahun 2010 menggunakan perhitungan tahun dasar 2010, sehingga pertumbuhan ekonomi terkesan rendah akibat penyesuaian perhitungan tahun dasar, dengan kondisi mengalami peningkatan dan penurunan sebagaimana pada gambar 2.12

**Tabel 2.14**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Tidung atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016**

No	Lapangan Usaha	2012 Rp (Juta)		2013 Rp (Juta)		2014 Rp (Juta)		2015 Rp (Juta)*		2016 Rp (Juta)**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	980.517,86	911.092,27	1.105.127,58	969.504,92	1.261.383,22	1.045.456,23	1.429.367,83	1.067.750,00	1.534.251,41	1.057.749,35
2	Pertambangan & Galian	1.174.629,63	1.040.468,99	1.238.972,94	1.093.997,87	1.233.121,63	1.120.139,00	1.123.691,92	1.086.240,00	1.061.692,46	1.055.614,00
3	Industri Pengolahan	69.874,42	64.395,22	74.253,49	66.396,62	82.055,04	69.506,44	90.298,01	73.470,00	101.074,75	77.820,08
4	Pengadaan Listrik, Gas	121,51	132,23	192,84	218,62	303,89	347,39	440,63	424,32	654,90	533,04
5	Pengadaan Air	326,82	338,01	402,37	394,59	457,94	441,53	495,57	462,75	573,64	506,73
6	Konstruksi	439.175,15	380.177,34	505.111,39	401.777,76	563.344,67	425.161,56	612.948,60	434.162,86	698.742,10	474.980,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	128.145,72	117.467,07	141.781,67	122.990,29	153.119,41	128.998,00	173.964,02	136.796,00	201.124,33	145.648,00
8	Transportasi dan Pengudangan	23.119,01	21.254,36	24.964,52	22.091,98	28.121,31	23.265,91	31.171,69	24.097,31	34.326,55	25.159,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.963,19	5.330,48	6.650,68	5.499,74	7.417,83	5.730,30	8.160,80	6.007,00	9.084,77	6.385,83
10	Informasi dan Komunikasi	1.178,61	1.120,62	1.236,84	1.160,02	1.333,23	1.184,82	1.442,59	1.225,68	1.539,14	1.266,54
11	Jasa Keuangan	3.182,48	3.016,16	3.381,04	3.147,34	3.545,79	3.217,00	3.753,68	3.308,00	4.236,34	3.460,00
12	Real Estate	19.518,38	17.351,68	21.626,33	18.216,52	24.107,83	19.316,92	26.384,30	20.306,42	30.188,32	21.379,59
13	Jasa Perusahaan	585,80	546,32	637,77	558,90	690,85	582,00	747,00	588,00	830,30	605,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	293.137,66	271.067,84	331.872,41	287.221,89	368.965,54	305.457,98	419.726,70	318.323,17	461.699,37	327.044,35
15	Jasa Pendidikan	44.145,22	41.407,50	47.111,22	42.659,21	51.709,64	45.511,71	57.403,25	46.667,86	62.366,53	48.665,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.163,52	2.062,21	2.308,31	2.126,25	2.374,17	2.182,21	2.542,20	2.238,16	2.768,23	2.322,09
17	Jasa Lainnya	12.677,60	12.166,79	13.475,87	12.473,21	14.146,45	12.627,89	15.432,88	12.915,71	17.078,05	13.464,05
	<b>PDRB</b>	<b>3.198.462,58</b>	<b>2.889.395,09</b>	<b>3.519.107,27</b>	<b>3.050.435,73</b>	<b>3.796.198,44</b>	<b>3.209.126,89</b>	<b>3.997.971,67</b>	<b>3.234.558,92</b>	<b>4.222.231,19</b>	<b>3.262.604,10</b>

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2017

Keterangan: \*) = Angka Sementara. \*\*) = Angka Sangat Sementara

**Tabel 2.15**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PRDB Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2012-2016**

No	Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015*		2016**	
		Laju Pertumbuhan	Persentase (%)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)	Laju Pertumbuhan	Persentase (%)
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	-1,52	30,66	6,41	31,4	7,83	33,23	2,13	35,75	-0,94	36,34
2	Pertambangan & Galian	-1,3	36,72	5,14	35,21	2,39	32,48	-3,03	28,11	-2,82	25,15
3	Industri Pengolahan	2,54	2,18	2,93	2,11	4,68	2,16	5,74	2,26	5,89	2,39
4	Pengadaan Listrik, Gas	57,36	0,00	65,33	0,01	58,9	0,01	22,15	0,01	25,62	0,02
5	Pengadaan Air	16,5	0,01	16,74	0,01	11,9	0,01	4,81	0,01	9,5	0,01
6	Konstruksi	9,52	13,73	5,68	14,34	5,82	14,84	2,12	15,33	9,4	16,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3,3	4,01	4,7	4,03	4,88	4,03	6,04	4,35	6,47	4,76
8	Transportasi dan Pengudangan	3,42	0,72	3,94	0,71	5,31	0,74	3,57	0,78	4,41	0,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	0,19	3,18	0,19	4,19	0,2	4,83	0,2	6,31	0,22
10	Informasi dan Komunikasi	1,52	0,04	3,52	0,04	2,14	0,04	3,45	0,04	3,33	0,04
11	Jasa Keuangan	3,89	0,10	4,35	0,1	2,23	0,09	2,81	0,09	4,59	0,1
12	Real Estate	5,6	0,61	4,98	0,61	6,04	0,64	5,12	0,66	5,28	0,71
13	Jasa Perusahaan	1,17	0,02	2,3	0,02	4,17	0,02	1	0,02	2,97	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,43	9,16	5,96	9,43	6,35	9,72	4,21	10,5	2,74	10,93
15	Jasa Pendidikan	1,26	1,38	3,02	1,34	6,69	1,36	2,54	1,44	4,28	1,48
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,38	0,07	3,11	0,07	2,63	0,06	2,56	0,06	3,75	0,07
17	Jasa Lainnya	2,02	0,40	2,52	0,38	1,24	0,37	2,28	0,39	4,25	0,4
	<b>PDRB</b>	0,95	100,00	5,57	100,00	5,2	100,00	0,81	100,00	0,85	100,00

Sumber : Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2017

Keterangan: \*) = Angka Sementara. \*\*) = Angka Sangat Sementara

## 2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang berkaitan erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk dalam suatu wilayah. Kenaikan dan/atau penurunan laju inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga indikator ini merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, disajikan dalam Tabel 2.16

**Tabel 2.16**  
**Nilai Inflasi Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016**

Uraian	Nilai Inflasi Rata-Rata							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Tana Tidung	5,71	5,48	5,20	5,18	5,42	10,35		4,23
Provinsi Kaltara	7,21	7,92	6,43	5,99	10,35	11,91	3,42	4,31
Nasional	2,78	5,1	5,4	4,3	8,4	8,4	5,0	4,7

Sumber : *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten Tana Tidung, 2017*

Tingkat laju inflasi di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun seiring kecenderungan penurunan inflasi nasional. Inflasi tertinggi di tahun 2008 sebesar 6,36 persen, dimana saat itu merupakan awal pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Tana Tidung, seiring dengan perkembangan daerah inflasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai pada level 5,20 di tahun 2016

## 3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tana Tidung setiap tahunnya mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan nilai PDRB yang tercipta. Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah yang struktur perekonomiannya berbasis ekonomi kerakyatan dimana sektor yang paling dominan adalah sektor pertanian. PDRB per-kapita Kabupaten Tana Tidung menunjukkan penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2016, dengan demikian pertumbuhan PDRB per-kapita secara "riil" mengalami penurunan.

Pada tahun 2012 angka PDRB per kapita kabupaten Tana Tidung tercatat sekitar Rp 187,27 juta yang mengandung maksud bahwa dari seluruh penduduk Kabupaten Tana Tidung diperkirakan mempunyai pendapatan sebesar tersebut. Angka pendapatan per kapita ini turun sekitar 4,04 persen bila dibandingkan

dengan angka PDRB perkapita tahun 2016, maka artinya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung sebesar 0,013 persen.

**Tabel 2.17**  
**PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)
2012	17.079	187,27
2013	18.985	185,36
2014	20.040	186,09
2015	21.891	182,63
2016	23.497	179,69

*Sumber : PDRB Kabupaten Tana Tidung Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016*

#### 4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan hasil perhitungan untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari suatu kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan nonpangan). Rentang angka dalam indeks gini adalah 0-1, semakin mendekati 0 maka diartikan bahwa pemerataan semakin baik, namun sebaliknya apabila semakin mendekati angka 1 maka disimpulkan ketimpangan di dalam masyarakat semakin besar. Indeks Gini Kabupaten Tana Tidung dari tahun 2010-2016 secara umum berada di bawah angka 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tana Tidung adalah rendah atau dapat dikatakan distribusi pendapatan (distribusi pengeluaran) relatif cukup merata.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Indeks Gini**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

Uraian	Prosentase Gini Rasio						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Gini	0,258	0,191	0,296	0,242	0,270	0,23	0,26

*Sumber: Analisis IPM Kabupaten Tana Tidung, 2010-2014*

#### 5. Indeks Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Seperti halnya Indeks Gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat guna mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu 1) ketimpangan

pembagian pendapatan disebut serius jika 40 persen penduduk termiskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan, 2) ketimpangan pembagian pendapatan disebut menengah jika 40 persen penduduk termiskin menerima 12-17 persen pendapatan dan 3) ketimpangan pembagian pendapatan disebut rendah jika 40 persen penduduk termiskin menerima lebih dari 17 persen pendapatan

**Tabel 2.19**  
**Persentase Distribusi Pengeluaran**  
**Penduduk Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

Tahun	40% Rendah	40% Sedang	20% Tinggi
2010	14,05	35,18	50,77
2011	9,76	27,98	62,26
2012	22,35	36,57	41,08
2013	24,51	40,53	34,96
2014	23,03	39,64	37,33
2015	25,10	40,58	34,32
2016	24,40	38,70	36,88

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung*

#### 6. Persentase Penduduk Miskin

Salah satu aspek penting dalam indikator kesejahteraan masyarakat adalah data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan. Indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan merupakan lanjutan dari analisa kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemertaan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah di garis kemiskinan.

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Tana Tidung tahun 2011-2016**

No.	Tingkat Kemiskinan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kabupaten Tana Tidung	tad	11,41	9,81	10,21	9,50	6,35	6,11

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung*

Dari tabel diatas pada tahun 2011, persentase penduduk miskin masih relative besar yaitu 11,41 persen. Angka ini terus mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai 2016 secara signifikan sampai pada angka 6,11 persen di



tahun 2016, yang berarti proporsi penduduk miskin semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan perkembangan PDRB perkapita yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Namun bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Utara, tingkat kemiskinan Kabupaten Tana Tidung masih lebih besar.

## 7. Angka Kriminalitas

Indikator angka kriminalitas yang tertangani digunakan sebagai langkah mengidentifikasi permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang dilihat dari angka kriminal. Berdasarkan data dibawah, dalam beberapa tahun terakhir angka penanganan tindak kriminal di Kabupaten Tana Tidung cenderung menurun dan tergolong rendah.

**Tabel 2.21**  
**Angka Tindak Kriminal Tertangani dalam 1 Tahun**  
**di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

Kepolisian Sektor	Jumlah dalam 1 tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sesayap	0	0	0	18	15	29	10
Sesayap Hilir	0	0	0	5	3	3	4
Tana Lia	0	0	0	0	0	0	3
Betayau	0	0	0	1	1	4	0
Muruk Rian	0	0	0	1	1	2	0
<b>Jumlah</b>	0	0	0	25	20	38	17

*Sumber : Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung*

### 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Gambaran atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi

#### 1. Angka Melek Huruf,

Indikator Angka Melek Huruf menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan yaitu dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Capaian Angka Melek Huruf meningkat dari 89,05 tahun pada tahun 2010 menjadi 94,74 tahun di tahun 2016.

**Tabel 2.22**  
**Angka Melek Huruf**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

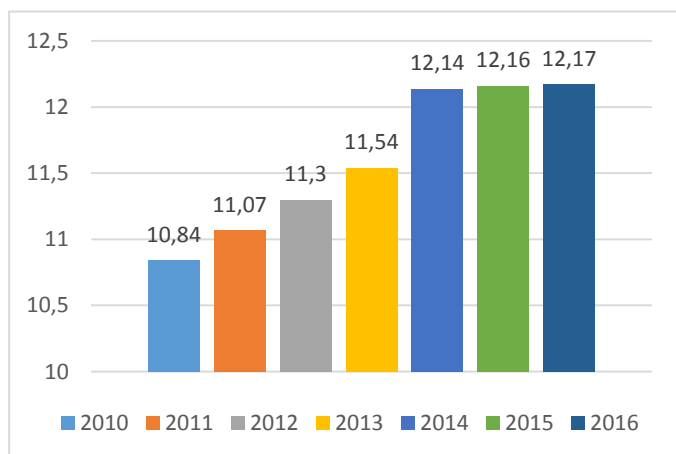
Angka Melek Huruf	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi Kalimantan Utara	%	97,05*	97,26*	97,81*			97,66	97,92
Kabupaten Tana Tidung		89,05	89,93	90,39	91,39	98,3	93,59	94,74

Sumber : IPM Kabupaten Tana Tidung

\* Provinsi Kalimantan Timur

## 2. Harapan Lama Sekolah (HLS)(Expected Years of Schooling-EYS)

Aspek pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia dicerminkan oleh Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan RLS dan HLS adalah indikator yang menggambarkan mutu sumber daya manusia yang diukur dalam aspek pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) penduduk kabupaten Tana Tidung meningkat dari 10,84 tahun pada tahun 2010 menjadi 12,17 tahun pada tahun 2016. Angka ini mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kabupaten Tana Tidung usia 7 tahun ke atas pada tahun 2016 berkisar antara 11 sampai dengan 12 tahun.



**Gambar 2.7**

**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

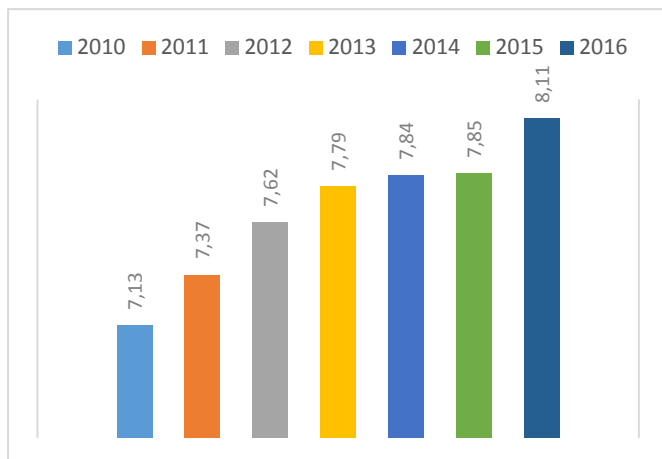
(Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung)

**Tabel 2.23**  
**Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	10,84	11,07	11,38	11,54	12,14	12,16	12,17

Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung

## 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)



**Gambar 2.8** Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016 (Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah lima tahun terakhir tampak ada peningkatan, hal ini berarti program pembangunan di bidang pendidikan mengalami peningkatan, sebagai akibat atas percepatan dalam mengupayakan capaian dari program pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri, walaupun masih jauh dari target yaitu 9-12 tahun.

## 3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK Kabupaten Tana Tidung dalam 7 (tujuh) tahun terakhir untuk tiap jenjang umur relatif naik. Hal ini diperlihatkan pada Tabel 2.25 Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah anak yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan atau umur usia sekolah pada level masing-masing semakin baik. Angka di atas 100% pada usia 7 – 12 Tahun menunjukkan murid SD yang tercatat ada yang berusia kurang dari 7 tahun dan ada juga murid berumur lebih

dari 12 tahun, dan angka di atas 100% pada usia 13 – 15 Tahun menunjukkan murid SMP yang tercatat ada yang berusia kurang dari 13 tahun dan ada juga murid berumur lebih dari 15 tahun.

**Tabel 2.24**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No.	Usia Sekolah/ Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	7 – 12 Tahun / SD	%	115,43	105,91	110,24	113,72	115,24	115,65	117,49
2	13 – 15 Tahun / SMP		105,42	99,67	93,89	80,32	104,36	82,39	85,87
3	16 – 18 Tahun / SMA		45,45	73	73,82	70,01	85,47	104,77	104,82

*Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung*

Jika melihat dari data diatas, kecenderungan perkembangan APK Kabupaten Tana Tidung terjadi penurunan pada tingkat SMP, sedangkan APK tingkat SD dan SMA cenderung naik. APK SMP terjadi penurunan dari 105,42 % di tahun 2010 menjadi 80,32 % di tahun 2013, kemudian mulai naik sebesar 104,36% pada tahun 2014, dan turun kembali menjadi 85,87% pada tahun 2016. Sedangkan APK SD dan SMA naik masing untuk SD dari 115,43% tahun 2010 menjadi 117,49% di tahun 2016, untuk SMA dari 45,45 % menjadi 104,82 % di tahun 2016.

#### 4. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka yang digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Pada tabel dibawah, menunjukkan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu tahun 2010 sampai dengan 2016. Angka dalam tabel tersebut menunjukkan kenaikan angka yang cukup berarti.

**Tabel 2.25**  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No.	Usia Sekolah/Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	7 – 12 Tahun / SD	%	95,46	92,41	93,04	94,59	98,17	94,99	82,17
2	13 – 15 Tahun / SMP		82,65	67,99	67,80	65,07	77,62	70,11	79,75
3	16 – 18 Tahun / SMA		33,22	47,14	48,28	55,84	64,10	59,26	36,43

*Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung, 2014*

#### 5. Angka Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (APT)

Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator untuk mengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yang berada pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut.

Pada Tabel 2.27, terlihat bahwa persentase jumlah penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mengalami kenaikan. Di tahun 2016 persentase masyarakat yang tidak pernah sekolah atau belum tamat SD dengan persentase sebesar 10,32%, ini berarti terdapat sebanyak 10,32% penduduk yang belum pernah sekolah atau tamat SD dari total seluruh masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian agar persentasenya menurun. Sedangkan penduduk yang menamatkan SD/ sederajat malah mengalami penurunan dari 29,76% ditahun 2011 menjadi 19,56% di tahun 2016.

Sementara penduduk yang menamatkan SLTP/ sederajat mengalami fluktuatif, pada tahun 2011 tercatat sebesar 12,64%, menurun menjadi 11,33% di tahun 2016. Yang lain, juga mengalami kenaikan seperti jumlah yang menamatkan pendidikannya untuk jenjang pendidikan SLTA/ sederajat dan Perguruan Tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah sudah lebih baik.

Walaupun mengalami kenaikan, yang perlu mendapat perhatian adalah persentasenya yang masih kecil, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Beberapa alasan penyebab seseorang untuk tidak/belum pernah sekolah atau

tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi diantaranya adalah karena biaya, bekerja/mencari nafkah, menikah/mengurus rumah tangga, merasa pendidikan sudah cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, cacat, dan lain-lain.

**Tabel 2.26**  
**Persentase Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**  
**Penduduk 10 tahun Ke atas di**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun (%)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	34,23	34,23	50,26	51,17	30,79	19,25	10,32
2	Tidak Punya Ijazah SD							
3	SD/MI	29,76	29,76	0,42	0,99	28,23	26,04	19,56
4	SLTP/ sederajat	12,64	12,64	19,97	22,18	15,04	23,75	11,33
5	SLTA/ sederajat	15,74	15,74	19,16	16,80	16,83	21,96	47,01
6	Perguruan Tinggi (D-I/II/III DIV/S-I S-2/3)	7,63	7,63	10,19	5,62	9,11	8,99	11,78

*Sumber: Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tana Tidung*

#### 6. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator ini berguna untuk menggambarkan keadaan social ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Dari data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.

**Tabel 2.27**  
**Angka Kematian Bayi**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2009-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	3,72	13,79	20,67	40,20	29,63	5	2	2

*Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tanan Tidung*

Angka kematian bayi di Kabupaten Tana Tidung pada kurun waktu 2009-2016 menunjukkan trend yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 40,20 per 1000 kelahiran hidup. Dua tahun terakhir angka kematian bayi di Kabupaten Tana Tidung mulai berkurang dan konsisten untuk tetap menjadi perhatian pemerintah.

#### 7. Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1000 kelahiran hidup di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu.

**Tabel 2.28**  
**Angka Kematian Balita**  
**di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun							
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	AKABA	Per 1.000 Kelahiran Hidup	Tad	tad	7,75	2,51	tad	0	5	2

*Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung*

Angka kematian balita di Kabupaten Tana Tidung di tahun 2011 tercatat sebesar 7,75 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurun angkanya di tahun 2016 menjadi 2.

#### 8. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal, dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

**Tabel 2.29**  
**Angka Kematian Ibu Melahirkan**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	516,8	502,51	0	3	0	1

*Sumber : IPM Kabupaten Tana Tidung*

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Tana Tidung, dari data 2009 cenderung naik menjadi 516 dan 502 per 100.000 kelahiran hidup, namun tahun 2016 menurun mencapai angka 1 di tahun 2016.

#### 9. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Variabel dalam meningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal seperti penanganan terhadap kehamilan beresiko, cakupan pertolongan persalinan, jumlah tenaga medis dan kesehatan lainnya, angka kesakitan, kondisi geografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap sarana kesehatan hingga latar belakang pendidikan masyarakat.

**Tabel 2.30**  
**Angka Harapan Hidup**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,09	70,26	70,47	70,68	70,80	70,81	71,31

*Sumber : IPM Kabupaten Tana Tidung,*

Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Tana Tidung sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 cenderung selalu meningkat. Peningkatan Angka Harapan



Hidup ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang selama ini dilakukan pemerintah dengan dukungan berbagai kalangan/instansi terkait yang memiliki relevansi atas AHH yang relatif baik. Hal ini merupakan salah satu wujud dari hasil-hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah, disertai semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

#### 10. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut pada waktu yang sama.

**Tabel 2.31**  
**Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

No.	Uraian	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Gizi Buruk	1,40	0,81	0,35	0,30	0,86	1,04	0,67

*Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tana Tidung*

Persentase gizi buruk di Kabupaten Tana Tidung berada pada angka yang rendah yaitu tidak mencapai 1 % di tahun 2011-2014. Namun di tahun 2014 menjadi 1,04% dan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,67 %, hal ini berarti penanganan pencegahan gizi buruk di Kabupaten Tana Tidung sudah baik dan terjadi perbaikan.

#### 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kegiatan penduduk dalam bidang ekonomi dapat diukur dengan proporsi penduduk yang masuk ke pasar kerja, yang dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada kurun tahun 2010-2016, tenaga kerja tiap sektor relative stabil. Sektor pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sementara, sektor pertambangan, perdagangan dan jasa relative mengalami fluktuatif.

**Tabel 2.32**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,87	41,85	62,82	58,48	58,74	60,24	67,68
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	12,02	6,67	8,80	2,22	2,40	2,58	5,02

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung*

Berdasarkan tabel 2.32 TAPK Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2016 adalah sebesar 67,68%. Artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 67-68 orang yang tersedia untuk memproduksi atau dengan kata lain berpotensi untuk bekerja.

### **2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dengan indikator jumlah grup kesenian, jumlah gedung. Data situs yang ditangani serta pengelolaan pemuda dan olahraga meliputi jumlah olahraga dan jumlah gedung olahraga. Adapun capaian indikator belum optimalnya pengelolaan grup kesenian serta belum terkelolanya gedung kebudayaan/balai adat yang ada di seluruh kecamatan. Pembangunan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan buday daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah ditengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Berdasarkan data yang ada jumlah grup kesenian di Kabupaten Tana Tidung berjumlah 25 di tahun 2017 dan data ini menunjukkan bahwa ada 10 group kesenian di antara 10.000 penduduknya.

## **2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi

tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2.3.1 Fokus Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 dan Pasal 12 bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar dan meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Untuk dapat melihat tataran pelaksana dari fokus Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar dengan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan per urusan dapat dilihat pada tabel 2.33

**Tabel 2.33**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2010-2016**

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Pendidikan</i>								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	18,87	47,63	64,25	31,13	80,76	53,67	60
1.2	Angka Partisipasi Sekolah								
	SD	%	tad	96,92	99,58	99,62	98,17	97,06	97,09
	SMP	%	tad	84,02	94,97	97,70	96,58	87,24	100
1.3	Angka Partipasi Kasar								
	SD	%	115,43	105,91	110,24	113,72	115,24	115,65	117,49
	SMP	%	105,42	99,67	93,89	80,32	104,36	82,39	85,87
1.4	Angka Partipasi Murni								
	SD	%	95,46	92,41	93,04	94,59	98,17	94,99	82,17
	SMP	%	82,65	67,99	67,80	65,07	77,62	70,11	79,75
1.5	Angka Putus Sekolah								
	SD	%	0,45	0,76	0	0,1	0	0,15	0,07
	SMP	%	2,17	9,03	5,05	0,32	0	0	0
1.6	Angka Kelulusan								
	SD	%	tad	11,97	100	100	100	100	100
	SMP	%	tad	29,08	100	100	100	100	100
1.7	Angka Melanjutkan								
	Dari SD ke SMP	%	100	100	100	100	100	104,28	90,71
	Dari SMP ke SMA	%	100	100	97,41	97,41	109	106,87	100,69
1.8	Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik								
	SD	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	SMP	%	100	100	100	100	100	100	100
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah pendidikan Dasar								
	SD	Per 10.000 jumlah penduduk 7 sd 12 tahun	111,43	112,51	176,24	104,49	93,26	98,11	83,28
	SMP	Per 10.000 jumlah penduduk 13 sd 15 tahun	86,77	107,53	43,53	73,80	63,04	57,51	58,31
1.10	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar								
	SD	Per 10.000 penduduk	1.675,42	1.210,36	1.172,86	1.210,55	1.195,07	1.377,63	1.458,18
	SMP	Per 10.000 penduduk	1.125,49	1.146,57	1.038,25	1.036,72	1.118,72	1.231,38	1.298,70
1.11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	40,91	48,21	87,59	87,59	68,19	34,54	64
2	<i>Kesehatan</i>								
2.1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	Tad	100	72,83	72,83	73,91	70	73,33
2.2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90,40	100	86,46	86,46	90,74	85,59	103,48
2.3	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	%	21,74	60,87	73,91	73,91	52,17	79,31	82,75
2.4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	%	54,55	18,60	40	40	11,11	35,71	35,71
2.6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	0	100	100	100	100	109,09
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	91,77	70,63	82,15	11,87	0	80,89	86,31
2.8	Cakupan kunjungan bayi	%	65,83	100,79	98,03	98,03	100,7	100	108,78
2.9	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 penduduk		18,70	17,91	17,22	16,04	14,15	9,01
2.10	Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0,92	0,79	0,88	0,79	0,73	0,82	0,81
2.11	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0	0,46	0,43
2.12	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	7,96	10,21	10,13	8,80	7,30	8,86	7,49
3	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>								
3.1	Proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik	%	tad	tad	35,79	35,79	65,56	86,30	96,95
3.2	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	tad	tad	100	100	100	83,90	83,90
3.3	Persentase rumah tangga bersantitas	%	0	0	0	0	0	4,27	4,27
3.4	Persentase areal kawasan kumuh	%	0	0	0	0	0	0	0,01
3.5	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	0	0	24,86	24,86	24,86	24,86	25,56

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	tad	Tad	13,11	13,11	13,11	87,25	86
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	tad	Tad	0	0	0	87,19	93,29
4.3	Persentase pemukiman kumuh	%	tad	Tad	0	0	0	4,27	0,01
5	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>								
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	tad	Tad	2,4	2,28	8,03	6,69	6,69
5.2	Persentase konflik yang terselesaikan	%	tad	Tad	tad	100	100	100	100
6.	<i>Sosial</i>								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	tad	Tad	54,52	54,52	54,52	95,5	95,45

Sumber : BPS, LPPD KTT 2010-2016 dan Hasil Analisa

### 2.3.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian; belum dapat dilaksanakan karena perangkat daerah yang bertanggungjawab tidak ada
16. Kebudayaan

17. Perpustakaan; belum dapat dilaksanakan karena belum ada Perpustakaan Daerah

18. Kearsipan

Untuk dapat melihat tataran pelaksana dari fokus Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar dengan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan per urusan dapat dilihat pada tabel 2.34

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>1</i>	<i>Tenaga Kerja</i>								
1.1	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	%	tad	tad	33,32 %	33,32 %	55,04 %	57,20 %	77,45 %
1.2	Pencari kerja yang ditempatkan	%	tad	22,56 %	12,67 %	12,67 %	1,08 %	21,21 %	2,54 %
<i>2</i>	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	tad	68,98	68,98	68,98	47,57	40,73	42,12
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	15	15	15	15	10	10	10
2.3	Angka melek huruf anak perempuan usia 15 tahun keatas	%	tad	26,68	26,68	26,68	95,58	92,27	89,69
2.4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,33	41,85	33,17	30,93	30,89	35,04	34,04
<i>3</i>	<i>Pangan</i>								
3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg Per 1.000 penduduk	tad	159,15	169,27	112,11	119,86	95,70	69,93
<i>4</i>	<i>Pertanahan</i>								
4.1	Persentase luas lahan bersertifikasi	%	0	0	0	0	tad	0,19	7,23
4.2	Penyelesaian kasus tanah negara	%	0	0	0	0	100	100	100
4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	0	0	0	0	100	6,67	0
<i>5</i>	<i>Lingkungan Hidup</i>								
5.1	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	tad	tad	91,69	91,69	91,69	46,69	46,69
5.2	Kebersihan Pasar		tad	tad	100	100	100	100	100
5.3	TPS per satuan penduduk	Per 1.000 penduduk	tad	tad	0,08	0,08	0,06	0,02	2,3
5.4	Penegakan Lingkungan Hidup	%	tad	tad	0	0	0	100	100
<i>6</i>	<i>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>								
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0	0	0	0	0,66	0,73	0,79
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Nilai	0	0	0	0	0,60	0,69	0,79
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Nilai	0	0	0	0	0,72	0,70	0,63
6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.5	Cakupan Penerbitan KTP	%	0	0	0	0	65,64	72,62	79,00
6.6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	0	0	0	0	60,26	69,12	79,03
6.7	Cakupan penerbitan akta lahir	%	0	0	0	60,26	69,12	79,03	63,01
6.8	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1.000 penduduk	tad	533,38	496,15	496,15	289,65	404,22	465,60

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>								
7.1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7.2	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.3	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
8	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,98	7,59	4,42	11,16	7,45	7,32	7,29
8.2	Prevalensi peserta KB aktif/Ratio Akseptor KB	%	tad	tad	65,39	65,39	47,90	72,67	59,13
8.3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	tad	tad	69,56	55,17	51,72	71,875	31,25
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	16,67	42,99	39,67	26,97	tad	tad	tad
9	<i>Perhubungan</i>								
9.1	Angkutan Darat	%	tad	tad	tad	tad	tad	16	0,397
10	<i>Komunikasi dan Informatika</i>								
10.1	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	<i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	tad	86	80,65	80,65	81,81	84,6	78,57
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	tad	100	100	94,17	100	100	92,71
12	<i>Penanaman Modal</i>								
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)								
12.2	Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp							
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja						2,41	69	
12.4	Realisasi Investasi PMDN/PMA	Rp							
13	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>								
13.1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Per 1.000 penduduk	tad	0	0,08	0,06	0,09	1,42	1,40
13.2	Lapangan olahraga	Per 1.000 penduduk	tad	1,82	0,27	0,22	0,32	1,63	1,61
14	<i>Statistik</i>								
14.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku PDRB	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	<i>Kebudayaan</i>								
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	tad	tad	1	1	1	4	4
15.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	tad	tad	1	1	1	4	4
15.3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lestari	%	tad	tad	40	0	0	100	100
16	<i>Kearsipan</i>								
16.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	%	tad	tad	100	100	100	100	100
16.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	tad	tad	0	0	0	28	28

Sumber : BPS, LPPD KTT 2010-2016 dan Hasil Analisa

### 2.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung meliputi :

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

Untuk dapat melihat tataran pelaksana dari fokus Urusan Pemerintah Pilihan dengan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan per urusan dapat dilihat pada tabel 2.35

**Tabel 2.35**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2010-2016**

No	Fokus/Urusan/Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pariwisata								
1.1	Kunjungan Wisata	Orang	0	0	0	0	0	9.700	10.500
1.2	Rata-rata Lama Menginap	Hari	tad	tad	tad	tad	tad	1,41	1,30
2	<i>Pertanian</i>								
2.1	Kontribusi sektor pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB ADHB	%	1,28	1,34	1,41	1,38	1,44	1,59	1,75
2.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	tad	4,15	4,15	3,16	3,48	5,44	3,57
3	<i>Perdagangan</i>								
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	3,67	3,83	4,01	4,03	4,03	4,37	4,76
4	<i>Perindustrian</i>								
4.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	2,20	2,07	2,18	2,11	2,16	2,26	2,28
4.2	Pertumbuhan Industri	%	tad	tad	42	42,86	33,33	48,39	28,94
5	<i>Transmigrasi</i>								
5.1	Persentase transmigran swakarsa	%	tad	100	100	14,81	13,33	14,12	0,5
6	<i>Kelautan dan Perikanan</i>								
6.1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB	%	3,60	3,70	3,73	3,19	3,16	3,21	3,20
6.2	Produksi perikanan	%	tad	275,3	706,63	90,77	71,90	36,21	95,23
6.3	Konsumsi ikan	%	tad	95	95	79,87	83,31	83,31	98,79
6.8	Nilai Tukar Nelayan	%	tad	tad	tad	tad	tad	tad	tad

Sumber : BPS, LPPD KTT 2010-2016 dan Hasil Analisa

### 2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dibentuk sebagai untuk melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi

1. Administrasi Pemerintahan



2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
6. Penelitian dan Pengembangan, belum dapat dilaksanakan karena perangkat daerah yang bertanggungjawab tidak ada

Untuk dapat melihat tataran pelaksana dari Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah dengan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan per fungsi dapat dilihat pada tabel 2.36

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan**  
**Pemerintahan Tahun 2010-2016**

No	Urusan dan Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	<i>Administrasi Pemerintahan</i>								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
1.2	Nilai Lakip	Nilai	tad	tad	tad	tad	tad	C	C
1.3	Peringkat LPPD	Status	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
1.4	Persentase Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	%	Non E-proc	Non E-proc	Non E-proc	Non E-proc	Non E-proc	Non E-proc	83,0
1.5	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesesuaian dan kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
2	<i>Perencanaan Pembangunan</i>								
2.1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.3	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.4	RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.5	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Pejabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	-	-	-	-	-	-	-
3	<i>Keuangan</i>								
3.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Disalmer	Disalmer	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3.2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	33,25	44,85	52,53	42,45	44,75	34,36	22,87
3.3	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	76,84/ 23,16	82,96/ 17,04	81,02/ 18,98	81,23/ 18,77	80,01/ 19,99	66,13/ 33,87	69,72/ 30,28
3.4	Persentase Bagi hasil kabupaten/desa	%	3,69	2,21	3,20	2,91	2,48	3,87	5,07

No	Urusan dan Indikator	Satuan	Tahun						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.5	Penetapan APBD	Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	<i>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</i>								
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0	0	0				
3.3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	0	0	0	15	17	20	15
3.4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	0	0	0	94	192	226	205
5	<i>Pengawasan</i>								
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	25,04	23,69	27,79	39,07	35,18	40,29	55,63
5.2	Jumlah temuan BPK	Keg	25	26	31	13	10	10	9
6	<i>Sekretariat Dewan</i>								
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan pada DPRD	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS, LPPD KTT 2010-2016 dan Hasil Analisa

## 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variable aspek daya saing terdiri dari

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Untuk fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani. Adapun rincian indikator dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Non Pangan per Kapita; menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Rata-rata pengeluaran per kapita se tahun diperoleh dari Susenas Modul Kabupaten Tana Tidung yang dikonstansikan dengan tahun dasar 2012=100, selanjutnya rata-rata pengeluaran per kapita konstan disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas

daya beli. Pengeluaran yang telah dibagi dengan paritas daya beli disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

**Tabel 2.37**  
**Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

Jenis Pengeluaran	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp (Juta)	3,375	4,143	6,390	6,585	6,696	6,807	6,919
Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp (Juta)	2,674	4,596	4,743	3,659	6,819	8,135	7,759

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa*

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Kabupaten Tana Tidung, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2010-2016 terus mengalami peningkatan tahun 2010 Rp.3,375 juta dan meningkat tahun 2016 menjadi Rp.6,919 juta. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang diterima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain-lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk pengeluaran penduduk Kabupaten Tana Tidung untuk non pangan tahun 2010 sebesar Rp.2,674 juta dan meningkat hingga di tahun 2015 menjadi Rp.8,135 juta dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi Rp.7,759 juta.

2. Produktivitas total daerah; Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah yang merupakan jumlah PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam satu tahun.

**Tabel 2.38**  
**Produktivitas Total Daerah Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

Indikator	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHB	Rp (Juta)	2.836.228,99	3.139.066,58	3.198.462,58	3.519.107,27	3.796.198,44	3.997.971,67	4.222.231,19
Angkatan Kerja	Jiwa	7.218	7.767	7.226	7.903	8.004	9.424	10.287
Produktivitas Total Daerah	Nilai	392,94	404,15	442,63	445,29	474,29	424,23	410,44

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa

Nilai Tukar Petani (NTP)/Nelayan(NTN)/Pembudidayaan Ikan (NTPN); merupakan indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani/nelayan dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani/nelayan baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika nilai lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika Nilai lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Indikator ini dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani/nelayan dan yang dibayar (Ib) petani/nelayan. Berdasarkan data yang ada di tahun 2017 bahwa Nilai Tukar Petani (NTP)/Nelayan(NTN)/Pembudidayaan Ikan (NTPN) yaitu 98, 115/98,2 dan data ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani masih relatif baik karena mendekati nilai 100 dan untuk nilai nelayan khususnya nilai tukar nelayan telah mencapai nilai yang baik sebagai bentuk tingkat kesejahteraan nelayan yang ada di Kabupaten Tana Tidung.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Adapun rincian indikator dari fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat disajikan sebagai berikut

**Tabel 2.39**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

Indikator	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	Km/Unit	205,648	131,739	0,043	0,025	248,09	0,055	0,073
Jumlah orang melalui dermaga per tahun	Orang	63.431	50.882	73.316	71.023	61.869	53.005	40.798
Jumlah barang melalui dermaga per tahun	Ton	1.645,15	105	0	723	160.202	142.907	95.492
Luas wilayah produktif	%	0	0	4,11	8,23	14,39	8,23	6,17
Luas wilayah industri	%	0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah kebanjiran	%	0	0	0,006	0,011	0,020	0,011	0,008
Luas wilayah kekeringan	%	0	0	0	0	0	0	0
Luas wilayah perkotaan	%	0	0	0,032	0,064	0,113	0,064	0,048
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang	Unit	1	1	1	1	3	3	3
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/hotel	Unit	0	0	0	10	13	14	10
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	%	19,14	13,11	10,86	9,93	16,27	15,53	14,90
Rasio ketersediaan daya listrik	%	Tad	tad	0,061	0,056	0,45	0,037	0,704
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	10,66	15,99	25,04	32,71	40,13	45	48

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, dan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Untuk Kabupaten Tana Tidung adapun tingkat capaian kinerja berdasarkan fokus iklim berinvestasi dapat dilihat pada tabel

**Tabel 2.40**  
**Perkembangan Capaian Kinerja Fokus Berinvestasi**  
**di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010 sd 2016**

Uraian	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	tad	tad	tad	13,17	9,80	17,36	7,23
Jumlah Demonstrasi	Kasus	0	0	0	1	0	1	0
Lama Proses Perijinan	Hari	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7	3-7
Pajak Daerah	Rp (Juta)	0,00	69,16	98,56	202,35	2.312,79	1.992,84	2.228,14
Retribusi Daerah	Rp (Juta)	0,00	188,21	132,02	175,62	199,47	1.996,18	272,16
Pajak Daerah	Jenis	12	12	12	12	12	12	12
Retribusi Daerah	Jenis	2	2	2	2	2	2	2

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa*

#### **2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3; Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk

**Tabel 2.41**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010 sd 2016**

Uraian	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	Jiwa	1.353	1.567	1.762	2.044	1.227	1.467	1.420
Jumlah Penduduk	Jiwa	15.202	16.356	17.079	18.985	20.400	21.891	23.497
Rasio Lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 penduduk	890,01	958,06	1.031,68	1.076,64	601,47	670,14	604,33

Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa

2. Rasio Ketergantungan; digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk

yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 2.42**  
**Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2012-2016**

Uraian	Satuan	Tahun						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penduduk < 15 tahun + > 64 tahun	Jiwa	5.459	5.479	5.576	5.382	6.630	8.606	7.854
Jumlah Penduduk	Jiwa	15.202	16.356	17.079	18.985	20.400	21.891	23.497
Rasio Ketergantungan	%	35,91	33,50	32,65	28,35	32,50	39,31	33,43

*Sumber : BPS Kabupaten Tana Tidung dan Hasil Analisa*





## **BAB 3**

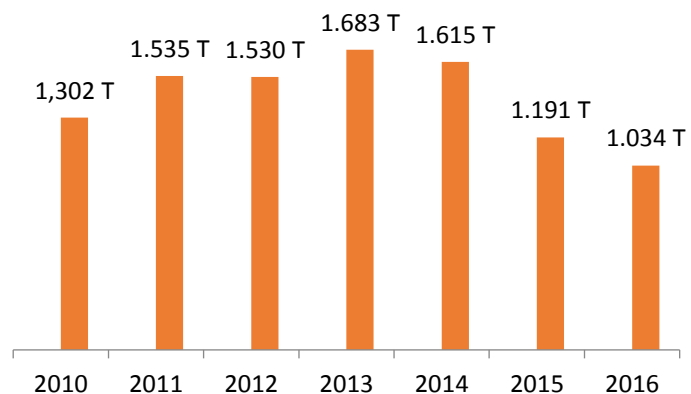
### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan dalam perencanaan mengingat kemampuan keuangan daerah menjadi dasar sejauh mana sasaran pembangunan akan ditargetkan. Sebagai upaya untuk dapat memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun di masa lalu.

##### **3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perkembangan APBD Kabupaten Tana Tidung tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah. Adapun gambaran APBD Kabupaten Tana Tidung berdasarkan rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.1 dan gambar 3.1 dibawah ini :



**Gambar 3.1**  
**Perkembangan APBD**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan APBD Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun Anggaran 2010-2016**

URAIAN	JUMLAH (Rp)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>PENDAPATAN</b>	879.344.381.916,00	876.795.698.911,00	893.794.569.430,00	901.980.277.586,00	940.618.091.607,00	468.857.060,356,46	624.657.486.346,89
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	18.063.000.000,00	21.055.669.332,00	12.718.169.332,00	12.441.169.332,00	15.917.148.000,00	22.432.412.100,00	15.413.000.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	16.000.000,00	48.500.000,00	44.500.000,00	665.000.000,00	1.020.000.000,00	1.402.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	0,00	10.000.000,00	523.000.000,00	523.000.000,00	325.000.000,00	775.000.000,00	211.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	2.866.669.332,00	2.866.669.332,00	2.866.669.332,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18.063.000.000,00	18.163.000.000,00	9.280.000.000,00	9.280.000.000,00	9.927.148.000,00	15.657.412.100,00	8.800.000.000,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	783.554.569.271,00	675.090.761.314,00	748.259.431.178,00	741.891.123.454,00	843.654.019.606,00	387.858.963,094,00	556.153.431.681,94
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	601.553.242.271,00	524.423.761.314,00	607.292.389.178,00	606.924.081,454,00	639.238.592.607,00	206.134.691.084,00	115.324.567.681,94
Dana Alokasi Umum	162.056.107.000,00	144.500.470.000,00	133.386.322.000,00	133.386.322.000,00	204.415.427.000,00	171.596.612,000,00	341.441.271.000,00
Dana Alokasi Khusus	19.945.220.000,00	6.166.530.000,00	7.580.720.000,00	7.580.720.000,00	0,00	10.118.660.000,00	99.387.593.000,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	77.726.812.645,00	180.649.268.265,00	132.816.968.920,00	141.647.984.800,00	81.046.924.000,00	58.565.685.162,46	53.091.054.664,95
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.240.022.915,00	63.586.868.265,00	60.772.787.000,00	69.690.205.000,00	72.034.434.000,00	30.438.766.981,46	10.324.557.342,23
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	3.087.181.920,00	3.000.779.000,00	4.409.991.000,00	17.437.950.000,00	25.109.620.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.486.789.730,00	117.062.400.000,00	68.957.000.000,00	68.957.000.000,00	2.561.000.000,00	8.159.000.000,00	10.589.000.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.500.000,00	2.529.968.181,00	7.067.877.322,72
<b>BELANJA</b>	1.302.279.596.990,00	1.535.354.011.935,00	1.530.026.468.080,00	1.683.419.145.533,74	1.615.085.556.005,23	1.191.539.735.385,34	1.034.060.943.136,13
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	301.650.258.424,00	261.691.732.699,00	290.402.979.269,00	316.021.551.967,74	322.840.407.128,23	403.560.843.056,34	313.157.561.191,13
Belanja Pegawai	197.666.858.424,00	191.198.232.699,00	197.015.056.269,00	206.852.828.967,74	230.760.247.128,23	292.901.842.906,00	229.124.260.361,13
Belanja Hibah	26.014.000.000,00	23.426.500.000,00	36.362.723.000,00	40.478.723.000,00	37.047.000.000,00	51.511.811.150,00	25.243.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	22.869.400.000,00	7.067.000.000,00	2.025.200.000,00	7.690.000.000,00	6.989.240.000,00	7.000.000.000,00	3.350.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa	48.100.000.000,00	34.000.000.000,00	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00	40.043.920.000,00	46.147.189.000,00	52.440.300.830,00
Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.000.000.000,00	3.000.000.000,00
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.000.629.338.566,00	1.273.662.279.236,00	1.239.623.488.811,00	1.367.397.593.566,00	1.292.245.148.877,00	787.978.892.329,00	720.903.381.945,00
Belanja Pegawai	38.224.626.637,00	40.568.194.808,00	51.219.524.400,00	54.176.285.750,00	32.921.259.750,00	36.053.880.750,00	36.619.887.475,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Belanja Barang dan Jasa	231.793.898.578,00	273.852.278.371,00	289.071.663.261,00	364.999.604.056,00	367.749.743.020,00	300.595.238.417,00	222.589.707.692,00
Belanja Modal	730.610.813.351,00	959.241.806.057,00	899.332.301.150,00	948.221.703.760,00	891.574.146.107,00	451.329.773.162,00	461.693.786.778,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(422.935.215.074,00)	(658.558.313.024,00)	(636.231.898.650,00)	(781.438.867.947,74)	(674.467.464.398,23)	(722.682.675.028,88)	(409.403.456.789,24)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>							
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	432.955.235.074,00	688.558.313.024,00	656.231.898.650,00	803.748.867.947,74	714.547.645.762,23	722.682.675.028,88	409.403.456.789,24
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	432.955.235.074,00	688.558.313.024,00	656.231.898.650,00	803.748.867.947,74	714.547.645.762,23	722.682.675.028,88	409.403.456.789,24
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	22.310.000.000,00	40.080.181.364,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	30.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	80.181.364,00	0,00	0,00
Pembayaran Iuran PSDH	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	422.955.235.074,00	658.558.313.024,00	636.231.898.650,00	781.438.867.947,74	674.467.464.398,23	722.682.675.028,88	409.403.456.789,24
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD, APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2010-2016

Penjelasan selengkapnya mengenai setiap komponen Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dilihat ada uraian berikut ini :

### **A. Pendapatan Daerah**

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel 3.2

Berdasarkan pada tabel tabel 3.2, maka masih banyaknya permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendapatan daerah, yaitu :

1. Struktur pendapatan menunjukkan bahwa sumber pendapatan masih bergantung pada pusat dan provinsi dan selama tahun 2010-2016 terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,69 persen dan dapat dikatakan bahwa APBD Kabupaten Tana Tidung masih belum mandiri;
2. Besaran PAD yang masih relatif kecil dan rendahnya kontribusi pada pendapatan bila dibandingkan dengan unsur pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
3. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan terhadap pendapatan daerah;
4. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam pelayanan;
5. Sarana dan prasarana pendukung dalam pengembangan potensi dan sumber-sumber pendapatan yang masih terbatas.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2010-2016**

No	URAIAN	REALISASI (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	<b>PENDAPATAN</b>	871.399.487.000,00	1.058.534.670.000,00	1.182.963.511.000,00	1.042.988.240.009,58	1.097.248.161.256,25	499.217.648.738,25	745.589.054.349,35	(2,57)
1.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	24.465.675.000,00	86.635.381.000,00	28.752.880.000,00	34.702.545.892,58	45.762.381.288,25	34.374.862.154,56	20.990.208.701,61	(2,53)
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	69.164.000,00	98.558.000,00	202.350.312,00	2.312.793.108,00	1.992.842.098,00	2.228.144.237,42	100,27
1.1.2	Retribusi Daerah	0,00	188.217.000,00	132.022.000,00	175.625.100,00	199.469.000,00	1.996.185.582,00	272.165.900,00	7,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	305.838.000,00	2.866.669.000,00	4.371.433.000,00	5.728.155.960,71	7.788.184.419,63	0,00	6.376.331.417,50	83,58
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	24.159.837.000,00	83.511.331.000,00	24.150.867.000,00	28.596.414.519,87	35.461.934.760,62	30.385.834.474,56	12.113.567.146,69	(10,89)
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	774.727.160.000,00	864.312.818.000,00	997.442.171.000,00	867.673.922.767,00	964.584.829.343,00	414.263.408.654,00	671.589.899.451,00	(2,36)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	60.453.795.000,00	43.634.898.000,00	37.000.736.000,00	726.706.880.767,00	760.169.402.343,00	234.571.868.654,00	239.699.675.322,00	25,87
1.2.2	Dana Alokasi Umum	219.755.383.000,00	149.340.893.000,00	143.330.124.000,00	133.386.322.000,00	204.415.427.000,00	171.596.612.000,00	341.441.271.000,00	7,64
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	3.837.000.000,00	2.650.500.000,00	1.849.959.000,00	7.580.720.000,00	0,00	8.094.928.000,00	90.439.953.129,00	88,14
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	72.206.652.000,00	107.586.471.000,00	156.768.460.000,00	140.611.771.350,00	86.900.950.625,00	50.579.377.929,69	53.017.946.196,74	(5,03)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.877.122.000,00	51.095.885.000,00	51.684.535.000,00	68.578.992.350,00	73.934.007.625,00	22.608.431.705,33	15.061.682.166,62	(8,04)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.736.000.000,00	9.427.593.000,00	2.622.341.000,00	3.000.779.000,00	10.405.943.000,00	2.712.737.800,00	26.930.160.000,00	23,16
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	39.593.530.000,00	28.245.293.000,00	102.461.584.000,00	69.032.000.000,00	2.561.000.000,00	6.231.500.000,00	10.589.000.000,00	(19,77)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	18.817.700.000,00	0,00	0,00	0,00	19.026.708.424,36	437.104.030,12	(84,76)

Sumber : BPKAD, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tana Tidung

## **B. Belanja Daerah**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Komponen Belanja terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi, Kab/kota dan Pemerintah Desa lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
2. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Berdasarkan pada tabel 3.3 dapat dilihat terhadap pertumbuhan realisasi belanja selama tahun 2010-2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan realisasi total belanja daerah selama 6 tahun yaitu sebesar 5,73%. Peningkatan belanja daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah;
2. Realisasi Belanja tidak langsung cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,27%. Hal ini disebabkan meningkatnya unsur belanja pegawai, belanja hibah walaupun belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan mengalami penurunan. Dengan pertumbuhan ini, sangat wajar terjadi karena perkembangan pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonomi baru yang masih banyak mengalami perkembangan dalam belanja aparatur dan bantuan keuangan ke desa;

3. Persentase realisasi belanja langsung cenderung meningkat yaitu rata-rata pertumbuhan sebesar 5,09 persen karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal;
4. Terjadinya kenaikan porsi realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

### **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung selama lima tahun.

Berdasarkan pada tabel 3.4 dapat diketahui pertumbuhan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2010 -2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah selama 6 tahun yaitu sebesar 10,96 persen, hal ini dipengaruhi oleh unsur penerimaan pembiayaan yang cenderung naik dan tinggi, sedangkan unsur pengeluaran yang cenderung menurun;
2. Pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan unsur sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun naik sebesar 9,35 persen. Tentu angka ini cukup sangat besar mengingat berarti kemampuan penyerapan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat kecil;
3. Anggaran pengeluaran pembiayaan dalam penyertaan modal tiap tahunnya mengalami fluktuatif seiring dengan kemampuan daerah.

### **3.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu Pemerintah Daerah yang terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada waktu tertentu. Dengan adanya Laporan Neraca Daerah dapat dijelaskan posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tahun tertentu. Dengan penyajian tabel 3.5 Neraca Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2010-2016 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal tersebut terlihat pertumbuhan aset tetap Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu tersebut yaitu sebesar 36,99 persen, atau secara nominal rata-rata penambahan aset tetap kurang lebih Rp 1.817.152.042.662,21.

Pertumbuhan jumlah kewajiban mengalami penurunan hingga di tahun 2016 angka yang menjadi nihil yang berarti Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak mempunyai tanggungan baik itu utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Sedangkan untuk ekuitas dana yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah mengalami pertumbuhan sebesar 22,01 persen atau rata-rata secara nominalnya Rp. 2.424.441.757.070,89 dan nilai merupakan aset daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung



**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	184.433.777.851,00	207.416.404.242,00	13.627.578.853,00	237.699.125.588,00	238.787.384.925,00	287.579.223.540,16	280.767.262.744,00	7,27
Belanja Pegawai	109.200.707.338,00	132.488.848.675,00	155.408.970.663,00	156.727.330.993,00	153.348.836.063,00	195.716.993.488,20	209.394.727.233,00	11,49
Belanja Hibah	4.000.000.000,00	14.139.680.000,00	19.183.060.625,00	36.634.463.626,00	35.697.952.300,00	43.585.811.150,00	19.768.000.000,00	30,58
Belanja Bantuan Sosial	21.797.418.250,00	12.243.555.625,00	5.051.895.625,00	4.558.020.625,00	4.481.830.000,00	1.846.800.000,00	1.794.000.000,00	(34,10)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa	47.373.863.065,00	46.913.269.942,00	3.599.999.940,00	39.779.310.344,00	39.258.766.562,00	45.014.716.701,96	49.810.535.511,00	0,84
Belanja Tidak Terduga	2.061.789.198,00	1.631.050.000,00	383.652.000,00	0,00	6.000.000.000,00	1.414.902.200,00	0,00	(7,25)
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	473.452.115.724,00	567.269.897.330,00	825.248.887.516,00	892.185.970.038,20	808.475.391.509,18	524.671.540.269,15	637.458.474.981,00	5,09
Belanja Pegawai	26.399.806.634,00	23.412.679.570,00	23.659.707.850,00	34.233.125.589,00	22.643.895.401,18	25.904.593.179,00	29.994.957.491,00	2,16
Belanja Barang dan Jasa	152.945.018.703,00	162.969.427.271,00	174.589.736.566,00	224.498.385.603,20	246.696.932.401,18	207.844.791.928,15	188.806.198.365,00	3,58
Belanja Modal	294.107.290.387,00	380.887.790.489,00	626.999.443.100,00	633.454.458.846,00	539.134.563.858,00	290.922.155.162,00	418.657.319.125,00	6,07
<b>BELANJA</b>	657.885.893.575,00	774.686.301.573,00	1.038.876.466.369,00	1.129.885.095.626,20	1.047.262.776.434,18	812.250.763.809,31	918.225.737.725,00	5,73

Sumber : BPKAD, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tana Tidung

**Tabel 3.4**  
**Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

URAIAN	REALISASI (Rp)							Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	714.547.645.762,23	722.682.767.860,30	409,094.977,627,24	9,35
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	714.547.645.762,23	722.682.767.860,30	409,094.977,627,24	9,35
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	20.100.000,00	0,00	30.000.000.000,00	2.285.400,731,89	40.076.522.190,42	0,00	0,00	1.155,45
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.100.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	40.076.522.190,42	0,00	0,00	4.365,26
Pembayaran Pokok Utang dan Iuran PSDH	0,00	0,00	0,00	2.285.400.731,89	76.522.190,42	0,00	0,00	(96,65)
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	219.441.639.000,00	432.955.235.000,00	657.901.510.000,00	801.444.502.378,89	724.456.508.393,88	722.682.767.860,30	409,094.977,627,24	10,96

Sumber : BPKAD, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tana Tidung

**Tabel 3.5**  
**Pertumbuhan Neraca Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

NO	URAIAN	REALISASI							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	ASET								
1.1	ASET LANCAR								
1.1.1	Kas	432.955.235.074,40	688.558.312.023,90	801.948.867.947,74	714.547.827.126,23	724.456.689.757,88	237.868.187.284,93	237.868.187.284,93	(9,52)
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	5.564.146.000,00	6.114.636.000,00	8.917.418.800,00	7.256.943.200,00	22.606.009.535,00	27.821.752.502,30	27.821.752.502,30	30,84
1.1.4	Piutang Lain-lain	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Persediaan	4.800.643.135,00	8.184.031.002,00	7.247.458.910,00	48.903.869.630,00	30.897.290.523,00	23.833.561.889,57	23.833.561.889,57	30,68
1.1.6	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(708.671.404,16)	(708.671.404,16)	0,00
1.1.7	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.242.240,00	172.242.240,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	443.320.024.209,40	702.861.379.025,90	818.113.745.657,74	770.708.639.956,23	777.959.989.815,88	288.987.072.512,64	288.987.072.512,64	(6,90)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG								
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	30.100.000.000,00	30.000.000.000,00	60.100.000.000,00	60.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	22,22
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	30.100.000.000,00	30.000.000.000,00	60.100.000.000,00	60.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	100.100.000.000,00	22,22
1.3	ASET TETAP								
1.3.1	Tanah	2.573.767.000,00	22.471.074.541,00	30.398.542.563,47	54.581.359.663,47	77.485.621.763,47	82.039.761.963,47	82.039.761.963,47	78,27
1.3.2	Peralatan dan Mesin	92.110.013.503,73	125.179.908.475,73	163.046.198.226,73	187.568.358.362,25	203.756.411.906,28	224.019.824.252,82	224.019.824.252,82	16,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	56.293.365.978,21	89.161.386.347,21	143.842.978.959,61	210.750.134.467,90	239.373.094.908,60	746.729.867.654,56	746.729.867.654,56	53,99
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	155.717.179.043,29	167.188.008.071,29	239.390.562.825,21	424.757.850.610,09	910.477.833.851,09	1.784.182.660.231,25	1.784.182.660.231,25	50,27
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2.764.541.600,00	6.657.267.180,00	11.189.231.565,00	41.474.847.737,00	39.688.297.179,00	11.289.868.502,00	11.289.868.502,00	26,49

NO	URAIAN	REALISASI							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	97.270.678.000,00	405.498.806.620,19	858.501.213.279,95	1.186.665.911.445,07	1.118.733.401.222,37	345.719.276.104,25	345.719.276.104,25	23,59
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(516.233.032.839,23)	(516.233.032.839,23)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	406.729.545.125,23	816.156.451.235,42	1.446.368.727.419,97	2.105.798.462.285,78	2.589.514.660.830,81	2.677.748.225.869,12	2.677.748.225.869,12	36,99
1.4	DANA CADANGAN								
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA								
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.999.553.581,00	9.931.881.080,12	11.201.727.389,36	13.586.242.950,29	15.708.590.077,95	8.147.206.048,34	8.147.206.048,34	18,16
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.521.959,00	99.521.959,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	224.000.000,00	493.427.400,00	3.167.046.000,00	8.394.453.557,86	8.394.453.557,86	3.647,52
1.5.5	Aset Lain-lain	62.652.122.810,00	2.608.327.132,00	1.050,00	1.050,00	35.729.068.734,29	36.113.344.520,56	36.113.344.520,56	(8,79)
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.582.113.057,99)	(4.582.113.057,99)	0,00
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.437.200.066,78)	(2.437.200.066,78)	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	65.651.676.391,00	12.540.208.212,12	11.201.727.389,36	14.079.671.400,29	54.604.704.812,24	45.735.212.960,99	45.735.212.960,99	(5,86)
	JUMLAH ASET	945.801.245.725,63	1.561.558.038.473,44	2.336.008.201.517,07	2.950.686.773.642,30	3.522.179.355.458,93	3.112.570.511.342,75	3.112.570.511.342,75	22,01
2	KEWAJIBAN								
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK								

NO	URAIAN	REALISASI						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	(1.000,00)	0,00	181.364,00	181.364,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	57.283.000,00	272.612.091,00	5.173.527.199,86	2.645.658.749,90	0,00	0,00	258,33
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	57.282.000,00	272.612.091,00	5.173.708.563,86	2.645.840.113,90	0,00	0,00	258,34
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
2.2.1	Utang Dalam Negeri	62.652.122.810,00	1.984.105.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,83)
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	62.652.122.810,00	1.984.105.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,83)
	JUMLAH KEWAJIBAN	62.652.122.810,00	2.041.387.220,00	272.612.091,00	5.173.708.563,86	2.645.840.113,90	0,00	0,00	(54,67)
3	EKUITAS DANA								
3.1	EKUITAS DANA LANCAR								
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	432.955.235.074,40	688.558.313.023,90	801.948.867.947,74	714.547.645.762,23	724.456.508.393,88	0,00	0,00	13,73
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	5.564.146.000,00	6.119.036.000,00	8.917.418.800,00	7.256.943.200,00	22.606.009.535,00	0,00	0,00	41,97
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	4.800.643.135,00	8.184.031.002,00	7.247.458.910,00	48.903.869.630,00	30.897.290.523,00	0,00	0,00	59,28

NO	URAIAN	REALISASI							RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3.1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	(57.283.000,00)	(272.612.091,00)	(5.173.527.199,86)	(2.645.658.749,90)	0,00	0,00	258,33
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	443.320.024.209,40	702.804.097.025,90	817.841.133.566,74	765.534.931.392,37	775.314.149.701,98	0,00	0,00	15,00
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI								
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	30.100.000.000,00	30.000.000.000,00	60.100.000.000,00	60.100.000.000,00	100.100.000.000,00	0,00	0,00	35,04
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	406.729.545.125,23	816.156.451.235,42	1.446.368.727.419,97	2.105.798.462.285,78	2.589.514.660.830,81	0,00	0,00	58,85
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	65.651.676.391,00	12.540.208.212,12	11.425.728.439,36	14.079.671.400,29	54.604.704.812,24	0,00	0,00	(4,50)
3.2.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(62.652.122.810,00)	(1.984.105.220,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(96,83)
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	439.829.098.706,23	856.712.554.227,54	1.517.894.455.859,33	2.179.978.133.686,07	2.744.219.365.643,05	0,00	0,00	58,05
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN								
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI						RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016
3.4	KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4.1	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.570.511.342,75	3.112.570.511.342,75	0,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.570.511.342,75	3.112.570.511.342,75	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	883.149.122.915,63	1.559.516.651.253,44	2.335.735.589.426,07	2.945.513.065.078,44	2.949.857.165.238,54	3.112.570.511.342,75	3.112.570.511.342,75	23,41
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	945.801.245.725,63	1.561.558.038.473,44	2.336.008.201.517,07	2.950.686.773.642,30	2.951.897.017.452,30	3.112.570.511.342,75	3.112.570.511.342,75	22,01

Sumber : BPKAD, Laporan Realisasi APBD Kabupaten Tana Tidung

### **3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2010-2016**

Bertitik tolak pada kondisi-kondisi sebelumnya, adapun kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

1. Mengintegrasikan PAD dan menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang ada;
2. Menerapkan sistem pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat;
3. Melaksanakan evaluasi dan pemuktahiran data secara berkala dan berkesinambungan;
4. Menerapkan sistem informasi yang akurat dan valid dalam menentukan pajak dan retribusi;
5. Memberikan pelatihan bagi aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Memenuhi belanja mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN
4. Untuk pengalokasian Belanja Perangkat Daerah dilakukan rasionalisasi dengan hanya melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pembiayaan antara lain :

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

- dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

### **3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Dalam mengefektifkan dan mengefisiensi alokasi dana, dilakukan tahapan analisis untuk mengetahui proporsi penggunaan anggaran pada pengelolaan keuangan di masa lalu. Analisis proporsi penggunaan anggaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Rata-rata proporsi realisasi belanja anggaran terhadap anggaran belanja daerah selama tahun 2010-2016 adalah sebesar 65,40%.
2. Persentase realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan meningkatnya unsur belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan, walaupun belanja tak terduga terjadi penurunan.
3. Prosentase realisasi belanja langsung cenderung meningkat karena kenaikan unsur belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal.
4. Terjadinya penurunan porsi realisasi belanja tidak langsung dan kenaikan porsi realisasi belanja langsung menggambarkan bahwa semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
5. Total belanja kebutuhan aparatur cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,02%. Kenaikan ini karena terjadi kenaikan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk memenuhi kebutuhan aparatur dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
6. Belanja tidak langsung untuk kebutuhan aparatur cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,66 %. Kenaikan ini karena adanya kenaikan belanja untuk gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS serta



belanja untuk pemungutan pajak daerah, walaupun belanja untuk penerimaan anggota/pimpinan dan operasional DPRD cenderung menurun. Belanja gaji/tunjangan adalah unsur yang dominan dari belanja tidak langsung untuk kebutuhan aparatur.

7. Belanja langsung untuk kebutuhan aparatur cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,96 %. Kenaikan ini karena adanya kenaikan semua unsur belanja langsung antara lain: honorarium PNS, beasiswa pendidikan PNS, sosialisasi/kursus/bimtek/pelatihan PNS, pakaian dinas, dan perjalanan dinas. Belanja perjalanan dinas dan belanja honorarium PNS adalah 2 (dua) unsur belanja yang besar jumlah dana-nya dari belanja langsung untuk kebutuhan aparatur.

Proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2011, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 33,46 persen, menurun menjadi 26,77 persen tahun 2012, dan di tahun 2013 naik kembali sebesar 28,81 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Tana Tidung masih belum memberikan pelayanan yang optimal bagi publik.

### **3.2.2 Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berikut tabel 3.7-3.10 merupakan tabel berkenaan dengan defisit riil anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 3.6**  
**Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

No	Uraian	Jumlah						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi Pendapatan	871.399.487.000,00	1.058.534.670.000,00	1.182.963.511.000,00	1.042.988.240.009,58	508.675.625.000,00	499.217.648.738,25	745.589.054.349,35
	Dikurangi Realisasi							
2	Belanja Daerah	657.885.893.575,00	774.686.301.573,00	1.038.876.466.369,00	1.129.885.095.626,20	1.047.262.776.434,18	812.250.763.809,31	918.225.737.725,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	803.729.902.110,74	722.682.767.860,30	409.094.977.627,24
	Defisit Riil	(26.028.045.575,00)	(149.106.866.573,00)	(543.814.465.369,00)	(890.626.757.727,36)	(1.342.317.053.544,92)	(1.035.715.882.931,36)	(581.731.661.002,89)

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017

**Tabel 3.7**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Kabupatn Tana Tidung Tahun 2010-2016**

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL (%)						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	714.547.645.762,23	722.682.767.860,30	409.094.977.627,24
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017

**Tabel 3.8**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2016**

NO	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	871.399.487.000,00	1.058.534.670.000,00	1.182.963.511.000,00	1.042.988.240.009,58	508.675.625.000,00	499.217.648.738,25	745.589.054.349,35
	Dikurangi realisasi:							
2.	Belanja Daerah	657.885.893.575,00	774.686.301.573,00	1.038.876.466.369,00	1.129.885.095.626,20	1.047.262.776.434,18	812.250.763.809,31	918.225.737.725,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	803.729.902.110,74	722.682.767.860,30	409.094.977.627,24
A	Defisit riil	(26.028.045.575,00)	(149.106.866.573,00)	(543.814.465.369,00)	(890.626.757.727,36)	(1.342.317.053.544,92)	(1.035.715.882.931,36)	(581.731.661.002,89)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan							
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	714.547.645.762,23	722.682.767.860,30	409.094.977.627,24
5.	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-		
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-	-	-	-		
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-		
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-		
9.	Penerimaan Piutang Daerah		-	-	-	-		
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	239.541.639.000,00	432.955.235.000,00	687.901.510.000,00	803.729.902.110,74	714.547.645.762,23	722.682.767.860,30	409.094.977.627,24
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	213.513.593.425,00	283.848.368.427,00	144.087.044.631,00	(86.896.855.616,62)	(627.769.407.782,69)	(313.033.115.071,06)	(172.636.683.375,65)

Sumber : Hasil Analisa Data, 2017

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Kabupaten Tana Tidung seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. SILPA yang terdapat pada APBD Kabupaten Tana Tidung sebagian besar berasal dari tertundanya belanja langsung program dan kegiatan pada pemerintah daerah. Hasil evaluasi terhadap jumlah SILPA tersebut diharapkan dapat diperkecil untuk rencana kedepan.

### **3.3 KERANGKA PENDANAAN**

Kerangka pendanaan dibuat secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektivitas kinerja aparatur maupun efisien anggaran pendanaan pemerintah daerah. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah maka diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### **3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Realisasi Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun ke depan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun masa lalu. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan meliputi Proyeksi Pendapatan serta proyeksi belabnja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **A. Proyeksi Pendapatan**

Dalam proyeksi pendapatan lima tahun mendatang, dapat dilihat pertumbuhan rata-rata per tahun menurun sebesar 2,62%, sehingga untuk proyeksi pendapatan, diasumsikan bahwa proporsi dana perimbangan akan berkurang sampai dengan, begitu pula dengan bagi hasil pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi juga akan menurun, dikarenakan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan kondisi kapasitas keuangan global. Sehingga dalam proyeksi pendapatan untuk 5 tahun akan datang diperkirakan perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada perencanaan dan

penganggaran setiap tahunnya. Selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel 3.10

### **B. Proyeksi Belanja Daerah**

Proyeksi belanja daerah secara umum merupakan rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dengan mengalokasikan sumberdayanya. Selain itu proyeksi belanja ini juga merupakan perhitungan untuk pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2017-2021. Untuk informasi tentang belanja daerah dapat dilihat pada tabel 3.10

**Tabel 3.9**  
**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PROYEKSI (Rp)		
			2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	(2,57)	774.200.063.251,55	670.277.664.744,12	795.351.495.665,33	625.929.499.130,44	816.502.928.079,11	840.286.587.332,40	864.070.246.585,70
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	(2,53)	28.350.748.083,56	46.293.059.365,93	34.067.915.746,90	28.510.000.000,00	39.785.083.410,24	46.050.041.646,45	52.314.999.882,66
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100,27	4.913.903.120,28	2.965.000.000,00	6.922.213.806,07	2.965.000.000,00	8.930.524.491,85	11.164.651.243,33	13.398.777.994,80
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,66	134.105.907,43	745.000.000,00	416.177.340,70	745.000.000,00	698.248.773,97	1.048.165.926,12	1.376.339.987,33
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	83,58	8.000.000.000,00	10.800.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(10,89)	15.302.739.055,84	31.783.059.365,93	18.729.524.600,13	16.800.000.000,00	8.156.310.144,42	6.837.224.477,00	5.518.138.809,57
<b>1.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	(2,36)	686.461.987.916,44	561.658.364.254,00	700.900.133.033,70	544.077.384.000,00	715.338.278.150,96	729.924.071.050,94	744.509.863.950,93
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	(14,31)	130.620.161.837,17	121.714.647.702,00	133.691.772.319,35	102.167.225.000,00	136.763.382.801,52	138.773.387.890,52	142.975.590.001,52
1.2.1	Dana Alokasi Umum	(9,02)	441.827.684.320,72	383.419.407.552,00	451.415.019.977,70	394.725.005.000,00	461.002.355.634,69	471.189.383.846,26	480.376.412.057,82
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	88,14	114.014.141.758,56	56.524.309.000,00	115.793.340.736,65	47.185.154.000,00	117.572.539.714,75	119.961.299.314,16	121.157.861.891,61
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	(5,03)	59.387.327.251,54	62.326.241.124,19	60.383.446.884,73	53.342.115.130,44	61.379.566.517,91	64.312.474.635,01	67.245.382.752,09
1.3.1	Hibah	(8,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	(19,77)	13.994.909.950,20	10.366.031.124,19	12.712.205.728,37	6.382.340.370,44	11.429.501.506,55	10.218.774.619,86	9.008.047.733,17
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	(2,57)	33.919.572.744,82	30.836.210.000,00	39.780.171.718,29	34.235.379.000,00	45.640.770.691,76	51.877.640.922,35	58.114.511.152,93
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(2,53)	11.472.844.556,53	21.124.000.000,00	7.891.069.438,06	10.000.000.000,00	4.309.294.319,60	2.216.059.092,80	122.823.865,99
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	5,73	858.164.736.131,29	986.735.958.995,71	874.343.832.105,20	705.929.499.130,44	889.022.928.079,11	905.326.587.332,40	921.630.246.585,70
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7,27	302.897.235.258,06	303.753.628.566,48	323.200.150.290,82	313.886.290.530,44	342.003.065.323,57	362.414.999.516,76	382.826.933.709,95
2.1.1	Belanja Pegawai	11,49	208.610.385.622,02	208.248.381.616,48	234.268.438.550,98	215.646.888.530,44	259.926.491.479,95	286.850.932.602,66	313.775.373.725,38
2.1.2	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	30,58	10.500.000.000,00	14.975.000.000,00	10.500.000.000,00	10.464.800.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	(34,10)	1.500.000.000,00	3.130.834.750,00	1.500.000.000,00	1.850.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa	(7,25)	82.286.849.636,04	75.899.412.200,00	75.431.711.739,83	83.924.602.000,00	68.576.573.843,62	62.064.066.914,10	55.551.559.984,57
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	(34,10)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5,09	555.267.500.873,23	682.982.330.429,23	551.143.681.814,39	392.043.208.600,00	547.019.862.755,54	542.911.587.815,64	538.803.312.875,75
2.2.1	Belanja Pegawai	2,16	31.313.654.016,00	32.804.161.140,00	31.081.096.117,27	22.108.813.093,00	30.848.538.218,55	30.616.856.912,03	30.385.175.605,51
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,58	220.899.029.661,35	183.989.300.601,23	219.258.473.303,98	155.964.403.155,00	217.617.916.946,61	215.983.544.420,98	214.349.171.895,34
2.2.3	Belanja Modal	6,07	303.054.817.195,88	466.188.868.688,00	300.804.112.393,13	213.969.992.352,00	298.553.407.590,38	296.311.186.482,63	294.068.965.374,90
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(85.464.672.879,74)	(316.458.294.251,59)	(78.992.336.439,87)	(80.000.000.000,00)	(72.520.000.000,00)	(65.040.000.000,00)	(57.560.000.000,00)

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN (%)	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	PROYEKSI (Rp)		
			2017		2018		2019	2020	2021
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,35	85.464.672.879,74	316.458.294.251,59	78.992.336.439,87	80.000.000.000,00	72.520.000.000,00	65.040.000.000,00	57.560.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	9,35	85.464.672.879,74	316.458.294.251,59	78.992.336.439,87	80.000.000.000,00	72.520.000.000,00	65.040.000.000,00	57.560.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Untuk kurun waktu lima tahun mendatang tahun 2017 hingga tahun 2021, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung diharapkan akan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah.

Berdasarkan data dalam kurun waktu 2010-2016, daya serap anggaran pada Belanja Langsung rata-rata hanya mampu menyerap 65,40 persen dari anggaran. Tentu saja hal ini tidak dapat dikatakan dari efektivitas dan efisiensi anggaran sebesar 34,60 persen. Sedangkan untuk rincian jenis belanja pegawai pada belanja tidak langsung terserap 71,98 persen dan 65,53 persen pada belanja langsung. Sedangkan belanja barang dan jasa terserap 66,92 persen dan belanja modal terserap 61,73 persen. Maka berdasarkan data tersebut diatas SiLPA akan diperkirakan sebesar 15 persen pada setiap tahunnya. Apabila SiLPA pada akhir tahun terealisasikan diatas 15 persen maka akan diprioritaskan pada dana cadangan penyertaan modal, penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan jaminan sosial.

Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapnya secara indikatif tersaji dalam tabel berikut :



**Tabel 3.10**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2016-2021**

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	774.200.063.251,55	795.351.495.665,33	816.502.928.079,11	840.286.587.332,40	864.070.246.585,70
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran*	85.464.672.879,74	78.992.336.439,87	72.520.000.000,00	65.040.000.000,00	57.560.000.000,00
	<b>Total penerimaan</b>	858.164.736.131,29	874.343.832.105,20	889.022.928.079,11	905.326.587.332,40	921.630.246.585,70
	Dikurangi:					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	302.897.235.258,06	323.200.150.290,82	342.003.065.323,57	362.414.999.516,76	382.826.933.709,95
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	555.267.500.873,23	551.143.681.814,39	547.019.862.755,54	542.911.587.815,64	538.803.312.875,75

Sumber : Analisis Data, 2017

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam kelompok prioritas. Kapasitas riil keuangan daerah dialokasikan ke berbagai program kegiatan sesuai urutan prioritas berdasarkan visi, misi dan program pembangunan kepala Daerah. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III menempatkan alokasi setelah Prioritas I dan Prioritas II terpenuhi kebutuhannya.

### **Prioritas I**

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) calon Kepala daerah sebagaimana dijanjikan pada kampanye pemilukada. Selain itu untuk memenuhi amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah sebagai contoh bidang pendidikan mendapat alokasi dana 20 % dari belanja daerah.

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Prioritas II**

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar.

### **Prioritas III**

Prioritas III merupakan program ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan program rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Program prioritas III untuk memenuhi kebutuhan kinerja dari aparatur dalam meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Program prioritas III merupakan program-program yang bersifat rutin seperti pemenuhan administrasi perkantoran.



## **BAB 4**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

#### **4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada dasarnya merupakan kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang paling penting adalah aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan pembangunan manusia yang terkendala akibat minimnya pelayanan dasar baik itu pelayanannya maupun infrastruktur penunjangnya yang termasuk ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik dan memiliki daya saing. Secara umum, kesenjangan harapan yang menjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum dapat mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki;
2. Belum mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki;
3. Belum maksimal dalam memanfaatkan peluang; dan
4. Belum mampu mengantisipasi ancaman.

Gambaran kondisi wilayah dan keuangan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, merupakan dasar bagi perumusan permasalahan Kabupaten Tana Tidung. Selanjutnya permasalahan pembangunan Kabupaten Tana Tidung dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional maupun nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan gambaran umum kondisi wilayah, hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor dapat dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang meliputi: permasalahan kesejahteraan masyarakat yang dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum menunjukkan perkembangan yang berarti.
2. Tingginya tingkat kemiskinan.
3. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
5. Tingginya tingkat pengangguran.
6. Rendahnya minat investasi.
7. Belum maksimalnya layanan pendidikan disemua jenjang pendidikan.
8. Rendahnya daya saing lulusan.
9. Belum optimalnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi belajar.
10. Belum terpenuhinya ketersediaan tenaga guru yang kompeten untuk sekolah unggulan.
11. Ketiadaan balai latihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
12. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat karena kurang tersedianya dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan.
13. Kapasitas dan kualitas rumah sakit dan Puskesmas yang belum memadai.
14. Belum selesainya pembangunan jalan.
15. Belum selesainya pembangunan pelabuhan.
16. Kurang akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih/air minum dan sanitasi
17. Masih terbatasnya pasokan listrik dan sering kali terjadi pemadaman.
18. Terbatasnya jaringan infrastruktur telekomunikasi.
19. Kurang memadainya pasar tradisional.
20. Proses pembangunan infrastruktur sering kali dibenturkan dengan masalah pengadaan lahan (dominan Kawasan Budidaya Kehutanan).

21. Sulit untuk melakukan penataan ruang dan wilayah, mengingat wilayah Kabupaten Tana Tidung sebagian besar merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
22. Belum tertata dan terkendalinya alih fungsi lahan.
23. Belum tuntasnya batas wilayah kabupaten.
24. Masih terbatasnya kemampuan aparatur di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
25. Masih terbatasnya data dukung penyusunan dokumen perencanaan.
26. Belum semua dokumen perencanaan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah oleh SKPD.
27. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
28. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum perairan(mahalnya biaya transportasi *speed boat*).
29. Kurang layaknya pelabuhan-pelabuhan untuk layanan transportasi perairan (*speed boat*).
30. Meningkatnya kegiatan pertambangan yang berpotensi mencemari lingkungan.
31. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
32. Rendahnya kesadaran dunia usaha dan masyarakat tentang arti penting lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
33. Lemahnya pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
34. Terancamnya keanekaragaman hayati(*bio diversity*).
35. Peran regulasi sangat minim dalam melindungi kelestarian lingkungan hidup.
36. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/ CSR*).
37. Kurangnya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pembangunan.
38. Kurangnya pengelolaan terhadap kegiatan transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah (suku).
39. Belum efektifnya penegakkan hukum dan keamanan.
40. Rendahnya indeks demokrasi.

41. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
42. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil
43. Besarnya arus transmigrasi yang memerlukan pengelolaan kependudukan dengan baik.
44. Belum tertata dan terkendalinya migrasi penduduk
45. Mengingat posisi Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian/dekat dengan perbatasan Negara, sering kali dijadikan daerah transit bagi penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang yang datang dari wilayah/Negara lain (*drug trafficking*).
46. Maraknya penyakit sosial masyarakat yang ditandai dengan banyaknya konsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.
47. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang ke Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari berbagai suku, berpotensi menimbulkan konflik sosial.
48. Meningkatnya akses sosial globalisasi informasi.
49. Masih rendahnya fasilitas umum dan fasilitas social.
50. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.
51. Ketiadaan balai latihan kerja yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi.
52. Masih rendahnya daya saing angkatan kerja dalam seleksi Aparatur Sipil Negara dan Karyawan badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta.
53. Rendahnya tenaga kerja lokal yang diterima dalam seleksi Aparatur Sipil Negara.
54. Rendahnya ketersediaan kesempatan dan lapangan pekerjaan.
55. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang sistem pelatihan kerja.
56. Pelayanan perizinan usaha yang belum melembaga, yang ditandai dengan belum optimalnya pelayanan perizinan melalui kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
57. Minimnya promosi daerah untu menarik minat investasi.
58. Tidak adanya regulasi yang mengatur rencana umum penanaman modal.

59. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah, terutama budaya lokal, hal ini ditandai dengan relatif sedikitnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya.
60. Derasnya arus modernisasi yang dapat mengikis budaya dan kearifan lokal.
61. Kurangnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal.
62. Kurangnya promosi kebudayaan daerah.
63. Minimnya kreativitas masyarakat dalam menggali potensi budaya yang ada sebagai sarana untuk menciptakan kegiatan perekonomian.
64. Minimnya regulasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam melakukan berbagai program kegiatan yang direncanakan, termasuk regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon peraturan perundang-undangan yang baru.
65. Ketidaksesuaian antara organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan dan tuntutan bebankerja.
66. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
67. Kurang kreatifnya SKPD dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah untuk meningkatkan PAD.
68. Terbatasnya kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah, yang ditandai dengan kurang profesionalnya kegiatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sulit mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
69. Ketiadaan peran BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan PAD
70. Tingginya ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.
71. Tingginya tingkat kerawanan pangan.
72. Belum beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat.
73. Belum terjaminnya tingkat keamanan pangan masyarakat.
74. Belum terwujudnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat.
75. Masih minimnya jumlah kelompok usaha ekonomi produktif dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

76. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
77. Akses masyarakat dalam perumusan pembangunan belum sesuai harapan.
78. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat antar SKPD.
79. Belum optimalnya partisipasi masyarakat perantauan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.
80. Masih terbatasnya infrastruktur telekomunikasi.
81. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan informasi.
82. Rendahnya tingkat produktivitas lahan dalam mendukung terciptanya kemandirian di bidang pangan.
83. Belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pertanian
84. Terbatasnya ketersediaan saprotan.
85. Mahalnya biaya distribusi hasil pertanian.
86. Terbatasnya lahan untuk pertanian dan sarana produksi pendukungnya.
87. Pengelolaan sumber daya alam mineral dan migas masih bersifat ekstraktif dan belum mengarah pada kegiatan hilirisasi.
88. Belum maksimalnya kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap PAD.
89. Pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.
90. Lemahnya pengelolaan kepariwisataan.
91. Kurangnya promosi potensi kepariwisataan.
92. Lemahnya pengelolaan potensi cagar budaya.
93. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting budaya sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan kepariwisataan.
94. Belum berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan kepariwisataan daerah.

## **4.2 ISU STRATEGIS**

Mengacu pada hasil identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat dinyatakan isu-isu



strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas guru sesuai kompetensi.
  - b. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - c. Pengalokasian anggaran untuk mendukung proses belajar-mengajar pada sekolah-sekolah unggulan.
  - d. Penerapan kebijakan bebas biaya pendidikan 12 tahun.
  - e. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi orang tuanya tidak mampu.
  - f. Regulasi tentang Sistem Pelatihan Kerja di Daerah.
  - g. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Swasta untuk penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, meliputi:
  - a. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
  - b. Kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan pada kegiatan pemrosesan (industrialisasi).
  - c. Investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah.
  - d. Regulasi (Peraturan Daerah) tentang CSR.
  - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan CSR (terbentuknya forum CSR).
  - f. Kemitraan antara pemerintah dan swasta (kerjasama pemerintah swasta).
  - g. Peran serta Perusda dalam pengelolaan sumber daya alam.
  - h. Kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
  - i. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.
  - j. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
  - k. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, meliputi:
  - a. Pengembangan kelembagaan kegiatan ekonomi ditingkat desa.

- b. Pengembangan dan pembangunan usaha-usaha ekonomi alternatif dan kreatif di pedesaan.
  - c. Pembukaan lapangan kerja melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).
  - d. Pengadaan Tenaga Pendamping Pedesaan.
  - e. Proyek padat karya.
  - f. Penyediaan sarana transportasi (subsidi transportasi) pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
  - g. Fasilitasi peningkatan pendapatan yang layak sesuai UMK/UMP.
4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal, meliputi:
- a. Kebijakan yang meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap budaya dan kearifan lokal.
  - b. Pembentukan dan fungsi balai-balai budaya.
  - c. Promosi dan pementasan budaya lokal di dalam dan luar negeri.
  - d. Dokumentasi karya dan pementasan budaya lokal.
  - e. Peran pimpinan/pemangku adat dalam dalam pengambilan kebijakan pembangunan budaya dan pariwisata.
  - f. Peran pimpinan/pemangku adat dalam memelihara dan melindungi budaya lokal.
  - g. Karakterisasi dan identifikasi budaya lokal dan keanekaragaman hayaticiri khas Tana Tidung.
  - h. Pengusulan hak kekayaan intelektual (Paten, Hak Cipta, Indikasi Geografis, perlindungan varietas tanaman, desain lokal, warisan budaya) yang terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal.
5. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, meliputi:
- a. Aksesibilitas wilayah-wilayah terisolir sesuai konsep pembangunan wilayah berorientasi transportasi (*Transit oriented development*/TOD), dengan prioritas realisasi prasarana: jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta, dll dengan melibatkan peran serta swasta.
  - b. Ketersediaan sarana prasarana pemerintahan.

- c. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan air bersih dan prasarana kesehatan lingkungan lainnya (sampah, mck, dll).
  - d. Jaminan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan akses mendapatkan BBM dan BBG.
  - e. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan pasar tradisional yang mampu menghadapi persaingan atau bersinergi dengan pasar modern.
  - f. Jaminan ketersediaan dan pengelolaan profesional jaringan *Information Communication Tecknology* (ICT).
  - g. Jaminan ketersediaan dan pendayagunaan ruang terbuka hijau (minimal 30% sesuai undang-undang RTH);
  - h. Jaminan Kapasitas jaringan kelistrikan.
  - i. Penyediaan dan pelengkapan sarana mitigasi dan penanggulangan bencana.
  - j. Penyediaan sarana rekreasi, taman bermain, dan sarana olah raga.
6. Pembukaan Lapangan Kerja, meliputi:
- a. Kebijakan strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (sertifikasi keahlian).
  - b. Implementasi kebijakan strategis peningkatan daya saing tenaga kerja lokal berbasis kompetensi (sertifikasi keahlian).
  - c. Penerimaan tenaga kerja lokal dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintah), Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta.
  - d. Asistensi penyiapan tenaga kerja lokal dalam seleksi penerimaan tenaga kerja.
  - e. Pelatihan kerja dan pendampingan serta penempatan tenaga kerja terampil dan kreatif.
7. Meningkatkan keunggulan daerah, meliputi:
- a. Proses belajar mengajar pada sekolah unggulan.
  - b. Jumlah guru kompeten dan fasilitas sekolah unggulan.
  - c. Ketersediaan pusat/balai latihan kerja berbasis kompetensi.
  - d. Daya saing produk-produk unggulan lokal

- e. Kehadiran industri pengolahan berbasis potensi unggulan lokal.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik, meliputi:
- a. Reformasi birokrasi.
  - b. Penataan kelembagaan SKPD.
  - c. Kebijakan strategis untuk penyiapan dokter, dokter spesialis dan tenaga medis, termasuk dengan sistem kontrak.
  - d. Penerapan kartu sehat bagi seluruh masyarakat tana tidung yang diselaraskan dengan program BPJS.
  - e. Peningkatan anggaran kesehatan masyarakat.
  - f. Penambahan kapasitas Puskesmas di masing-masing kecamatan.
  - g. Sistem pelayanan administrasi berbasis Informatika dan teknologi komunikasi.
  - h. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis elektronik.
  - i. Pembangunan fasilitas olah raga sosial dan budaya.
  - j. Fasilitasi ketersediaan akan pelayanan dasar.
9. Meningkatkan Jaminan Keamanan, meliputi:
- a. Kebijakan jaminan keamanan dengan berbagai pendekatan, baik yang bersifat persuasif maupun pencegahan dan penanggulangan melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu;
  - b. Kerjasama TNI dan Polri untuk pengamanan Jalur laut dan darat.
10. Meyelesaikan Batas Wilayah;
- Prioritas penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan cara dan upaya yang sesuai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengupayakan Kemandirian Pangan;
- a. Pencetakan sawah baru dan penyediaan sarana produksi pendukung.
  - b. Intensifikasi Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura.
  - c. Penyediaan tenaga penyuluh (pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan).
  - d. Sarana prasarana pengairan/irigasi/embung pertanian.
  - e. Penguatan permodalan dan kelembagaan petani.
  - f. Pengembangan komoditas perkebunan unggulan.
  - g. Pengembangan usaha ternak rakyat (ternak kecil dan unggas);

- h. Fasilitasi tersedianya sarana produksi peternakan (pengadaan bibit ternak, pupuk, pakan tambahan, obat-obatan serta alat dan mesin peternakan (alsinter)
- i. Pengembangan budi daya perikanan darat (kolam ikan), dan sungai (keramba).



## **BAB 5**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI DAN MISI**

Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk kurun waktu 2016 – 2021, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah otonom baru dan telah melangsungkan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Daerah Definitif, telah melakukan pembangunan pendahuluan yang artinya perlu didukung oleh pengembangan visi-misi yang sejalan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Dengan demikian visi-misi yang disusun merupakan kelanjutan dan pengembangan dari visi misi sebelumnya.
2. Pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong perbaikan kualitas kehidupan masyarakat untuk lebih berdaya saing pada semua aspek kehidupan.
3. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tana Tidung akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan semua sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.
4. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung memiliki posisi strategis dalam kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, maka program prioritas yang tersusun akan bermuara dan mengupayakan Kabupaten Tana Tidung menjadi pusat keunggulan (*Center of excellent*).
5. Indikator masyarakat Tana Tidung yang berdaya saing terletak pada kemandirian masyarakatnya dalam menghadapi persaingan kegiatan perekonomian dengan

tetap memperhatikan tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang;

6. Basis dari masyarakat Tana Tidung yang maju dan bersaing terletak pada persatuan dan kerukunan antar umat beragama, antar etnis maupun antar daerah, kesejahteraan yang berkualitas serta menjunjung tinggi kesadaran masyarakat majemuk, sehingga akan menjadikan Kabupaten Tana Tidung unggul dan mampu bersaing.

### **5.1.1 VISI**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa "*visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan*". Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Tana Tidung dan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah:

**"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendedayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan"**

Dengan memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Tana Tidung dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi baik itu di lingkup provinsi maupun lingkup nasional. Dalam rangka memperjelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, makna/pengertian visi tersebut sebagai definisi operasionalnya adalah berikut:

**Tabel 5.1**  
**Perwujudan Visi RPJMD**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung	bermakna melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pada periode sebelumnya untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung lebih baik lagi, dengan mengoptimalkan peran seluruh sumber daya yang ada.
Harmonisasi	dimaksudkan untuk mensinergikan antara optimalisasi daya guna sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kabupaten Tana Tidung. Sehingga diharapkan pemanfaatan sumber daya alam sepenuhnya dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sumber Daya Manusia	mengandung arti bahwa kemajuan Kabupaten Tana Tidung hanya akan dapat dicapai apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif, berdaya saing, mampu mandiri dalam segala hal dengan tetap memperhatikan tatanan kehidupan yang demokratis, berbudaya, religius, sehat dan cerdas, serta memiliki komitmen untuk maju dan berkembang guna mewujudkan Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah yang menjadi pusat unggulan ( <i>center of excellent</i> ).
Sumber Daya Alam	bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan dioptimalkan bagi pembangunan Kabupaten Tana Tidung melalui program-program yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek	mengandung arti bahwa pembangunan Kabupaten Tana Tidung senantiasa diarahkan pada penciptaan perekonomian yang melibatkan seluruh masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan mengoptimalkan Iptek sebagai salah satu sarana untuk mendukung program pembangunan yang telah ditetapkan.
Berkelanjutan	yang artinya kegiatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung tidak semata-mata untuk kepentingan saat ini akan tetapi memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk saling bersinergi dalam mengupayakan percepatan pembangunan yang tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.



### **5.1.2 MISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 berorientasi pada pembangunan dengan segenap sumber daya yang ada guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang pro rakyat dengan ciri khas budaya local yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Dalam rangka mewujudkan visi di atas menjadi ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 , sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.**
- 3. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.**
- 4. Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal.**
- 5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek.**
- 6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.**
- 7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.**
- 8. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.**
- 9. Mengembangkan agroindustri pertanian.**

9 (Sembilan) misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi ambiguitas dalam memahami masing-masing misi, maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut :

***Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.***

Bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ini sangat penting dalam rangka menjawab tantangan globalisasi, khususnya dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean, disamping itu mengingat Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang berdekatan dengan perbatasan antar Negara, sehingga keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing merupakan suatu keharusan, agar masyarakat Kabupaten Tana Tidung tetap menjadi pemain utama dalam kegiatan perekonomian di wilayahnya. Upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tercermin dalam program-program kegiatan yang mendorong dan menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan dalam arti kepentingan masyarakat secara keseluruhan ditempatkan pada posisi utama agar menjadi bagian dari pelaku aktif pembangunan melalui model perencanaan pembangunan partisipatif (*Participatory Planning Development Model*).

***Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan.***

Bahwa peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, merupakan upaya konkrit yang harus dilakukan Bupati Kabupaten Tana Tidung dalam memberdayakan masyarakat untuk turut berperan dan menjadi bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah pada satu sisi akan menciptakan lapangan kerja sekaligus sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, di sisi lain akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan program-program yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tana Tidung.

***Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.***

bahwa Bupati Kabupaten Tana Tidung wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Semua aspek yang terkait dengan program pembangunan daerah yang berorientasi pada terciptanya kegiatan perekonomian akan senantiasa melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari kegiatan dimaksud.

***Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal.***

bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen untuk mendorong agar budaya lokal tetap menjadi fondasi dalam pemanfaatan kepariwisataan yang diharapkan dapat

menciptakan dan berkembangnya ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya lokal yang harus di lestarikan. Melalui misi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wisata dan budaya lokal di era persaingan global seperti sekarang ini melalui kebijakan pemberdayaan potensi wisata dan budaya lokal.

***Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek.***

bahwa kegiatan perekonomian hanya akan tumbuh secara optimal apabila telah ditunjang dengan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Adapun salah satu faktor penting dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur adalah adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menunjang terselenggaranya kegiatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, merupakan kebutuhan mutlak. Oleh karenanya, pada misi kelima, Bupati Tana Tidung wajib memberikan perhatian pada sektor infrastruktur yang hasilnya bukan saja dapat dinikmati oleh generasi saat ini namun juga bagi generasi mendatang.

***Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas.***

Bupati Tana Tidung menyadari bahwa Kabupaten Tana Tidung sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), memiliki potensi yang sangat besar dan dapat terus digali yang sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu, guna mendorong masyarakat agar tetap kreatif dan inovatif dalam mencari berbagai potensi dan peluang yang ada, maka dalam misi keenam ditekankan pentingnya pengembangan kapasitas daya inovasi dan kreativitas untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

***Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.***

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kabupaten Tana Tidung menjadi daerah yang berdaya saing. Posisi Tana Tidung yang cukup strategis, berada di tengah-tengah antara wilayah yang perekonomiannya relatif maju dengan wilayah yang sedang berkembang di provinsi Kalimantan Utara merupakan potensi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Mengingat posisi tersebut, berdasarkan misi ketujuh, Bupati Tana Tidung telah memiliki konsep yang jelas yaitu menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara.

***Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.***

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana minimal wajib yang dibutuhkan masyarakat dan menjadi hak masyarakat atas dasar prinsip (standar

pelayanan minimum) terhadap semua layanan yang diperlukan masyarakat secara cepat, adil, murah, mudah, merata, dan diberikan dengan ramah.

***Mengembangkan agroindustri pertanian.***

Misi ini membuktikan bahwa Bupati Tana Tidung memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjadikan Kabupaten Tana Tidung sebagai kabupaten agroindustri modern, perdagangan modern (*Modern Business Society*) dan jasa (*Services*), dengan mendorong skala ekonomi, pertumbuhan, investasi, dan pemerataan, serta pemberdayaan ekonomi lokal berupa pemberian peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituang ke dalam 9 (sembilan) butir prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Perekonomian

1. Pengembangan Kemandirian Pangan
2. Pengembangan Budaya dan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal
3. Penguatan Daya Saing Tenaga dan Usaha Ekonomi

Prioritas Pendukung Kualitas SDM dan Perekonomian

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
4. Peningkatan Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik

## **5.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, maka tujuan dan sasaran umum pembangunan Kabupaten Tana Tidung untu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

### **5.2.1 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Menurunnya Tingkat Pengangguran.

### **5.2.2 MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintergrasinya dengan tata ruang wilayah kabupaten.

### **5.2.3 MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN RAKYAT.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
2. Berkurangnya tingkat kemiskinan;
3. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN;
4. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat.

#### **5.2.4 MENJADIKAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI FONDASI PEMANFAATAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF SERTA KONSERVASI NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA LOKAL.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Pengembangan Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis kearifan lokal***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah ;
2. Meningkatnya kelestarian kebudayaan kearifan lokal.

#### **5.2.5 MENINGKATKAN KUALITAS DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR BERBASIS IPTEK.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Melanjutkan pembangunan infrastruktur***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

#### **5.2.6 MENGEMBANGKAN KAPASITAS, DAYA INOVASI DAN KREATIVITAS.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Terwujudnya kontribusi sektor industri kreatif pada perekonomian daerah***, dengan sasaran pembangunan yaitu meningkatnya volume produktivitas industri kreatif

#### **5.2.7 MENGEMBANGKAN KABUPATEN TANA TIDUNG SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN DAN DAYA SAING DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Pengembangan pusat keunggulan daerah***, dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya kontribusi industri potensi lokal dalam perekonomian daerah.

### **5.2.8 MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG CEPAT, MUDAH, MURAH, ADIL DAN TRANSPARAN.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas;

### **5.2.9 MENGEMBANGKAN AGROINDUSTRI PERTANIAN.**

Dalam rangka pencapaian misi ini, maka tujuan pembangunan ditetapkan yaitu ***Terwujudnya Agroindustri***, dengan sasaran pembangunan :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat.

Secara keseluruhan kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran kinerja menentukan pembangunan Kabupaten Tana Tidung untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Berangkat dari tuntutan tersebut dapat dijabarkan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disajikan pada Tabel 5.2-5.4

**Tabel 5.2 Matriks Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>VISI</b> <b>"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan"</b>				
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;	1. Indeks Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah
			2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2. Angka Harapan Lama Sekolah
			3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	3. Angka Kelulusan
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan	2. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup;	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional
			5. terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.	5. Angka Harapan Hidup
			6. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	6. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	7. Berkurangnya tingkat kemiskinan;	7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			8. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	8. Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah
			9. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	9. Persentase Kesesuaian RTRW
4. Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal	4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal;	4. PDRB Sektor Pariwisata	10. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;	10. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
			11. Meningkatnya kelestarian kebudayaan kearifan lokal.	11. Tingkat Kemiskinan
5. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek	5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;	5. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	12. Meningkatnya kualitas infrastruktur;	12. Realisasi Investasi PMA dan PMDN
			13. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;	13. Indeks Desa Membangun (IDM)
6. Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas	6. Meningkatkan kontribusi Sektor Industri Kreatif	6. PDRB Sektor Industri Kreatif	14. Meningkatnya volume produktivitas industri kreatif pada perekonomian daerah	14. Jumlah Kunjungan Wisata
				15. Rata-rata Lama Tinggal



<b>VISI</b> <b>"Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmonisasi Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Ekonomi Pro Rakyat, Budaya Lokal Dan Iptek Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan"</b>				
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
7. Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara	7. Pengembangan pusat keunggulan daerah	7. PDRB Sektor Industri	15. Meningkatnya kontribusi industri potensi lokal dalam perekonomian daerah;	24. PDRB Sektor Industri
8. Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan	8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	8. Indeks Reformasi Birokrasi	16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	25. Indeks Kepuasan Masyarakat
			17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas;	26. Nilai Akuntabilitas Kinerja 27. Opini BPK terhadap LKPD
9. Mengembangkan agroindustri pertanian	9. Terwujudnya Agroindustri Pertanian;	9. PDRB Sektor Pertanian	18. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat;	28. Nilai Tukar Petani (NTP) 29. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTPN)
			19. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat.	30. Skor Pola Pangan Harapan

**Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

<b>VISI</b>									
<b>"MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG MELALUI HARMONISASI DALAM PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SUMBER DAYA ALAM, EKONOMI PRO RAKYAT, BUDAYA LOKAL DAN IPTEK MENUJU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN"</b>									
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	BASELINE 2015	KONDISI AWAL 2016	TARGET CAPAIAN				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	64,92	65,64	67,37	68,12	68,88	69,64	70,40
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	tad	tad	71,5	72,25	73	74	75
Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada kepentingan rakyat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	0,81	0,85	3,68	3,92	3,95	3,99	4,02
Menjadikan budaya lokal sebagai fondasi pemanfaatan kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta konservasi nilai-nilai luhur budaya lokal	Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal	PDRB Sektor Pariwisata	tad	tad	0,010	0,011	0,014	0,016	0,018
Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta infrastruktur berbasis Iptek	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukur	tad	tad	4	5	6	7	8
Mengembangkan kapasitas, daya inovasi dan kreativitas	Meningkatkan kontribusi Sektor Industri Kreatif	Pertumbuhan Industri Kreatif	tad	tad	0,002	0,010	0,020	0,025	0,03
Mengembangkan Kabupaten Tana Tidung sebagai pusat keunggulan dan daya saing di Provinsi Kalimantan Utara	Pengembangan pusat keunggulan daerah	PDRB Sektor Industri	2,26	2,4	2,46	2,52	2,58	2,64	2,71
Memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	Indeks Reformasi Birokrasi	tad	tad	C	CC	B	B	B
Mengembangkan agroindustri pertanian	Terwujudnya Agroindustri Pertanian;	PDRB Sektor Pertanian	35,75	36,34	37,92	39,56	41,28	43,07	44,94

**Tabel 5.4**  
**Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2015	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Target Capaian Tiap Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI 1</b>									
1	Rata-rata Lama Sekolah	Usia	7,85	8,11	8,24	8,37	8,5	8,63	8,77
2	Harapan Lama Sekolah	Usia	12,16	12,17	12,4	12,63	12,87	13,11	13,35
3	Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Rata-rata Ujian Nasional	%	0	61,86	55,15	57,91	60,80	63,84	67,04
5	Angka Harapan Hidup	Usia	70,81	71,31	71,52	71,73	71,95	72,16	72,37
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	2,58	2,57	2,56	2,5	2,46	2,34	2,2
<b>MISI 2</b>									
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	tad	tad	71,5	72,25	73	74	75
8	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	%	tad	tad	100	100	100	100	100
9	Persentase Kesesuaian RTRW	%	tad	tad	100	100	100	100	100
<b>MISI 3</b>									
10	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	0,81	0,85	3,68	3,92	3,95	3,99	4,02
11	Tingkat Kemiskinan	%	6,35	6,11	5,87	5,63	5,39	5,15	4,91
12	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	tad	tad	27 Milyar	28 Milyar	29 Milyar	30 Milyar	31 Milyar
13	Indeks Desa Membangun (IDM) (Berkembang)	Nilai	tad	tad	31,25	50	68,75	87,5	96,875
<b>MISI 4</b>									
14	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	tad	tad	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
15	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	1,41	1,41	1,45	1,5	1,75	1,9	2
16	Spending of Money	Rp	tad	tad	1 Milyar	2 Milyar	3 Milyar	4 Milyar	5 Milyar
17	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari	%	0	0	20	40	60	80	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2015	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Target Capaian Tiap Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MISI 5</b>									
18	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	%	0	0	80	82,5	85	87,5	90
19	Persentase Kecamatan yang terhubung dengan alat transportasi umum	%	0	0	20	40	60	80	100
20	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	%	25	65,625	75	81,25	87,5	93,75	100
21	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	0	0	20	25	50	75	100
22	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	0	0	100	100	100	100	100
<b>MISI 6</b>									
23	Persentase Peningkatan Volume Usaha Industri Kreatif	%	tad	tad	100	100	100	100	100
<b>MISI 7</b>									
24	PDRB Sektor Industri	%	2,26	2,4	2,46	2,52	2,58	2,64	2,71
<b>MISI 8</b>									
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	tad	tad	75,7	77	78,16	79,68	80,08
26	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	C	C	CC	B	B	B
27	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
<b>MISI 9</b>									
28	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	tad	tad	98	98,4	98,8	99,1	99,5
29	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTPN)	Nilai	tad	tad	115/ 98,2	122/ 112	123/ 113	124/ 114	125/ 115
30	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	tad	tad	93,5	76	78	82	87



## **BAB 6**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada uraian dibawah ini.

#### **6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi merupakan serangkaian upaya dalam bentuk proses untuk mencapai sasaran strategis pembangunan. Strategi dibuat harus memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, untuk itu yang menjadi penting dan dapat didasarkn jadi dasar atau pedoman adalah perencanaan pembangunan daerah atau fokus kepada strategi manajemen. Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mempunyai peran strategis dalam fungsi fasilitator yang mempunyai akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat serta sebagai regulator yang berfungsi sebagai regulasi dan administrasi perijinan serta dan konsultatif yang memberikan

bimbingan teknis, pembinaan dan petunjuk untuk aktifitas yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis dan pencapaian sasaran ini dibutuhkan kesatu tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindakan sehingga bisa saja satu tujuan dapat dirumuskan mencapai gabungan beberapa sasaran. Berdasarkan hal-hal tersebut strategi pembangunan Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dibuatkan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan disertai indikatornya pada tabel berikut



## Rencana Pusat Bisnis dan Perkantoran di Tideng Pale





**Tabel 6.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Angka Harapan Lama Sekolah 3. Angka Kelulusan 4. Nilai Rata-rata Ujian Nasional	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	5. Angka Harapan Hidup	Peningkatan jaminan kesehatan dan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat
	3. Menurunnya Tingkat Pengangguran	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan akses tenaga kerja kepada sumber daya produktif
2. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup;	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam penyelenggaraan sumber daya alam
	5. terselesaikannya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten.	8. Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah 9. Persentase Kesesuaian RTRW	Percepatan penyelesaian batas wilayah
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;	6. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	10. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Perluasan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah
	7. Berkurangnya tingkat kemiskinan;	11. Tingkat Kemiskinan	
	8. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	12. Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Peningkatan iklim investasi melalui kapasitas dan infrastruktur pendukung investasi serta adanya promosi investasi secara terpadu
	9. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	13. Indeks Desa Membangun (IDM)	Pengembangan lembaga/kegiatan perekonomian di tingkat desa serta Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan perlindungan bagi masa depan generasi muda melalui event olahraga yang berprestasi
4. Pengembangan Budaya dan Pariwisata berbasis kearifan lokal;	10. Meningkatnya Kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah;	14. Jumlah Kunjungan Wisata 15. Rata-rata Lama Tinggal 16. Spending of Money	Peningkatan Sektor Pariwisata dan kebudayaan secara intergratif dan berdaya saing global
	11. Meningkatnya kelestarian kebudayaan kearifan lokal.	17. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas serta pelestarian budaya melalui kearifan lokal

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur;	12. Meningkatnya kualitas infrastruktur;	18. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) 19. Persentase Kecamatan yang terhubung dengan alat transportasi umum 20. Persentase Jangkauan TIK	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian yang memadai dan handal
	13. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;	21. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 22. Luasan Kawasan Kumuh	Peningkatan kinerja penyediaan dan pengelolaan perumahan, air minum dan sanitasi
6. Perkuatan Peran Kapasitas Dalam Peningkatan Produktivitas Daerah;	14. Meningkatnya volume produktivitas industri kreatif pada perekonomian daerah	23. Persentase peningkatan volume usaha industri kreatif	Peningkatan perluasan lapangan kerja melalui stimulasi penguatan usaha ekonomi kreatif
7. Pengembangan pusat keunggulan daerah	15. Meningkatnya kontribusi industri potensi lokal dalam perekonomian daerah;	24. PDRB Sektor Industri	Peningkatan sektor industri pengolahan yang mempunyai potensi lokal sektor unggulan
8. Meningkatkan Pelayanan Publik;	16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;	25. Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
	17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas;	26. Nilai Akuntabilitas Kinerja 27. Opini BPK terhadap LKPD	Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik secara konsisten serta peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah
9. Terwujudnya Agroindustri Pertanian;	18. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat;	28. Nilai Tukar Petani (NTP) 29. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTPN)	Peningkatan usaha produksi dan nilai tambah pertanian dengan intensifikasi pertanian.
	19. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat.	30. Skor Pola Pangan Harapan	Pengamanan produksi untuk pertanian berkelanjutan



## 6.2 ARAH KEBIJAKAN

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan selama periode 5 (lima) tahun. Adanya strategi dapat membentuk tema-tema yang membentuk cerita atau skenario strategi yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam waktu 2016-2021. Adapun strategi pelaksanaan arah kebijakannya sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2017-2021**

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan				
	2017	2018	2019	2020	2021
S1.T1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk memenuhi hak seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dasar				
S2.T1	Peningkatan jaminan kesehatan dan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat				
S3.T1		Peningkatan daya saing tenaga kerja dan akses tenaga kerja kepada sumber daya produktif			
S4.T2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam				
S5.T2	Percepatan penyelesaian batas wilayah dengan penyesuaian rencana tata ruang				
S6.T3		Perluasan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah			
S7.T3					
S8.T3		Peningkatan iklim investasi melalui kapasitas dan infrastruktur pendukung investasi serta adanya promosi investasi secara terpadu			
S9.T3			Pengembangan lembaga/kegiatan perekonomian di tingkat desa		
			Peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan perlindungan bagi masa depan generasi muda melalui event olahraga yang berprestasi		
S10.T4	Peningkatan sektor pariwisata dan kebudayaan secara integratif dan berdaya saing global				
S11.T4		Peningkatan dan pengembangan kualitas dan pelestarian budaya melalui kearifan lokal			
S12.T5	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian yang memadai dan handal				
S13.T5		Peningkatan kinerja penyediaan dan pengelolaan perumahan, air minum dan sanitasi			
S14.T6		Peningkatan perluasan lapangan kerja melalui stimulasi penguatan usaha ekonomi kreatif			
S15.T7		Peningkatan inovasi daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan			
		Peningkatan penyelenggaraan usaha dengan sektor komoditas unggulan			

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan				
	2017	2018	2019	2020	2021
S16.T8	Peningkatan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan				
S17.T8		Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik secara konsisten; Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah			
S18.T10	Peningkatan usaha produksi dan nilai tambah pertanian dengan intensifikasi pertanian				
S19.T10	Pengamanan produksi untuk pertanian berkelanjutan				

Keterangan : S = Sasaran; T = Tujuan

Dari tabel di atas, strategi dirumuskan secara spesifik terhadap pembagian waktu. Dengan arah kebijakan, dapat dibagi sesuai dengan urutan-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun, dengan demikian berdasarkan pada strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan dengan tema pembangunan dan prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 6.3**  
**Rancangan Tema Pembangunan Per Tahun Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2017-2021**

Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
<b>Tahun 2017</b> Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Perekonomian Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Membangun perencanaan dan Penganggaran yang berorientasi pada program prioritas 4. Mendefinisikan OPD yang berorientasi pada efektivitas pencapaian Visi-Misi Bupati 5. Pembangunan Infrastruktur 6. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik
<b>Tahun 2018</b> Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Sejahtera di Bumi Upuntaka	1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pelayanan Umum 4. Urusan Pemerintahan	1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Pembangunan Infrastruktur 4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi terintegratif yang berorientasi hasil 5. Membangun sistem manajemen terkait pembangunan dengan berbasis hasil

Tema Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Profesionalitas ASN dan Perilaku Birokrasi</li> <li>7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang punya daya ungkit ekonomi dan ketahanan pangan</li> </ul>
<b>Tahun 2019</b> Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Layanan Dasar dan Infrastruktur Perekonomian Perdesaan yang Berorientasi Potensi Unggulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Pelayanan Umum</li> <li>4. Urusan Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan</li> <li>2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Melengkapi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar hingga ke desa</li> <li>4. Peningkatan Akses Antar Kawasan Perdesaan dan Pertanian</li> <li>5. Perencanaan akses destinasi pariwisata unggulan</li> <li>6. Pembangunan Infrastruktur Sistem Informasi Ekonomi dan Sosial dalam penguatan image Tana Tidung</li> <li>7. Infrastruktur Besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru</li> </ul>
<b>Tahun 2020</b> Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Pelayanan Umum</li> <li>4. Urusan Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan</li> <li>2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Mempercepat kemudahan akses modal investasi pembangunan yang berorientasi pada pertanian dan pariwisata</li> <li>4. Menjalankan sistem inovasi daerah untuk produk unggulan hingga wilayah perdesaan</li> <li>5. Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta</li> <li>6. Pemberdayaan kelompok usaha dan ekonomi kreatif</li> <li>7. Pengembangan dan pemasaran produk olahan</li> </ul>
<b>Tahun 2021</b> Pemerataan Pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Pelayanan Umum</li> <li>4. Urusan Pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan</li> <li>2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Membangun alternatif industri hasil pertanian dan pariwisata</li> <li>4. Peningkatan pengendalian pembangunan</li> <li>5. Perluasan pasar dan produk olahan hasil pertanian</li> <li>6. Jaminan sistem pasar yang berorientasi pada masyarakat</li> </ul>

### **6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dtuangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah beserta indikator kinerja hingga akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja awal pada periode perencanaan. Suatu program prioritas baik strategis maupun operasional, kinerja merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perhitungan pagu indikatif masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program pembangunan daerah (strategik) dan pagu indikatif untuk program-program yang berhubungan dengan pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan kerangka, sebagaimana telah disampaikan pada bab 3 dengan pembagiannya menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III.

Adapun rencana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif berdasarkan misi, tujuan, sasaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam jangka waktu 2016-2021 secara terperinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 6.4**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>MISI 1</b>															
	<b>Tujuan 1</b>															
	<b>Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>															
	Sasaran 1															
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan															
1.01	<b>Pendidikan</b>				169.333		159.721		154.270		159.635		156.615		799.574	
1.01 . 15	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	Persentase Lembaga PAUD berakreditasi B	40 %	50 %	4.955	70 %	2.640	80 %	2.500	90 %	3.390	100 %	3.100	100 %	16.585	DISDIK
		APK dan APM PAUD	65 %	70 %		75 %		80 %		85 %		90 %		90 %		
		Persentase Tenaga pendidik PAUD berkualifikasi S-1/D-IV	9,5 %	15,5 %		19 %		21,5 %		23 %		25 %		25 %		
		Rasio Jumlah Guru PAUD terhadap Murid	200 Per 1.000 Penduduk	200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		
		Rasio Kelas PAUD terhadap siswa didik	33,33 Per 1.000 Penduduk	35,71 Per 1.000 Penduduk		37,04 Per 1.000 Penduduk		40 Per 1.000 Penduduk		43,48 Per 1.000 Penduduk		50 Per 1.000 Penduduk		50 Per 1.000 Penduduk		
1.01 . 16	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar Berakreditasi B	50 %	50 %	145.298	70 %	132.145	90 %	115.925	90 %	112.835	100 %	103.430	100 %	609.633	DISDIK
		APK dan APM Pendidikan Dasar	9,7 Per 1.000 Penduduk	9,7 Per 1.000 Penduduk		9,75 Per 1.000 Penduduk		9,8 Per 1.000 Penduduk		9,85 Per 1.000 Penduduk		9,9 Per 1.000 Penduduk		9,9 Per 1.000 Penduduk		
		Angka Kelulusan Pendidikan Dasar	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Angka Melanjutkan	105,2 %	105,4 %		105,6 %		105,8 %		106 %		106,2 %		106,2 %		
		Angka Putus Sekolah	0 %	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional	62,03 %	55,15 %		57,91 %		60,8 %		63,84 %		67,04 %		67,04 %		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	303 Per 10.000 Penduduk	303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		
		Persentase Sekolah Negeri yang telah berakreditasi minimal B	77,7 %	81,3 %		84,8 %		94,7 %		98,2 %		100 %		100 %		
		Persentase Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	78,6 %	86,6 %		94,6 %		96,4 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase terlaksananya 3 Sekolah Terpadu yang berkonsep Boarding School	0 %	0 %		16,67 %		33,33 %		66,7 %		100 %		100 %		
1.01 . 18	<i>Program Pendidikan Non Formal</i>	Angka melek huruf usia >15 tahun ke atas	96,76 %	96,76 %	330	96,9 %	530	97,2 %	780	97,5 %	825	97,7 %	865	97,7 %	3.330	DISDIK
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan.	72,76 %	74,67 %		76,57 %		78,53 %		80,5 %		82,46 %		82,46 %		
		Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang aktif	66,67 %	66,67 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		
1.01 . 20	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	Persentase Tenaga pendidik berkualifikasi S-1/D-IV	67,7 %	67,7 %	2.010	74 %	2.095	77 %	3.385	81 %	2.655	84,5 %	3.555	84,5 %	13.700	DISDIK
		Persentase jumlah guru yang bersertifikasi	7,7 %	12,5 %		15 %		17,5 %		20 %		22,5 %		22,5 %		
		Rasio Jumlah Guru terhadap Murid	112,5 Per 1.000 Penduduk	112,5 Per 1.000 Penduduk		112,5 Per 1.000 Penduduk		112,5 Per 1.000 Penduduk		112,5 Per 1.000 Penduduk		112,5 Per 1.000 Penduduk		112,5 Per 1.000 Penduduk		
1.01 . 21	<i>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</i>	Indeks Kepuasan Minat/Budaya dan Kepuasan Masyarakat	0 %	0 %	0	100 %	111	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	111	BAGIAN ORHUM
1.01 . 22	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	Jumlah sekolah yang bersertifikat ISO	0 Sekolah	0 Sekolah	16.740	0 Sekolah	22.200	0 Sekolah	31.680	1 Sekolah	39.930	1 Sekolah	45.665	0 Sekolah	156.215	DISDIK
		Jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS)	38 Sekolah	38 Sekolah		38 Sekolah		39 Sekolah		39 Sekolah		40 Sekolah		40 Sekolah		
	Sasaran 2															
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
1.02	<b>Kesehatan</b>				81.250		80.826		80.771		82.528		82.732		408.107	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 %	100 %	3.507	100 %	3.265	100 %	3.008	100 %	2.985	100 %	4.090	100 %	16.855	DINKES
1.02 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %	7.026	100 %	7.239	100 %	10.019	100 %	10.249	100 %	9.213	100 %	43.746	DINKES
1.02 . 18	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Cakupan pengembangan obat asli Indonesia	20 %	30 %	170	40 %	207	50 %	228	60 %	241	60 %	259	60 %	1.105	DINKES
1.02 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan PIS PK	%	30 %	1.915	50 %	1.865	60 %	1.941	70 %	2.275	100 %	2.625	100 %	10.621	DINKES
		Persentase Rumah Tangga Yang berPHBS	%	40 %		65 %		75 %		75 %		85 %		85 %		
		Persentase Desa Siaga Aktif	%	50 %		75 %		75 %		75 %		80 %		80 %		
		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Srata Posyandu	%	50 %		75 %		85 %		95 %		100 %		100 %		
		Persentase Desa yang memanfaatkan dananya minimal 10% untuk UKBM	%	30 %		75 %		85 %		95 %		100 %		100 %		
		Persentase dunia usaha yang memanfaatkan dana CSR untuk prgram kesehatan	%	20 %		30 %		40 %		50 %		65 %		65 %		
		Persentase Gerakan Masyarakat Hidup sehat	%	50 %		75 %		85 %		95 %		100 %		100 %		
		Pengembangan media promosi kesehatan	Media	50 Media		50 Media		70 Media		80 Media		90 Media		90 Media		
		Penetapan kebijakan berwawasan kesehatan disemua tingkat pemerintahan	Kebijakan	1 Kebijakan		1 Kebijakan		1 Kebijakan		1 Kebijakan		1 Kebijakan		1 Kebijakan		
		Monitoring program Promosi Kesehatan		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali		
1.02 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil kurang energi kronik yang mendapat makanan tambahan	%	75 %	950	80 %	1.000	85 %	1.004	90 %	1.000	95 %	1.200	95 %	5.154	DINKES
		Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet tambah darah (TTd)	%	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		
		Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	50 %		60 %		70 %		80 %		90 %		90 %		
		Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini ( IMD)	%	60 %		65 %		70 %		75 %		80 %		80 %		
		Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		
		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah darah	%	50 %		60 %		70 %		75 %		80 %		80 %		
		Persentase Gizi Kurang dan Buruk ditangani	%	%		%		%		%		%		%		
1.02 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sanitasi Dasar memenuhi syarat	%	60 %	1.560	60 %	1.620	60 %	1.525	60 %	1.580	60 %	1.940	60 %	8.225	DINKES
		Persentase Lingkungan dan Kawasan sehat	%	50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		
		Persentase petugas Kesehatan Lingkungan	%	70 %		70 %		70 %		70 %		70 %		70 %		
		Jumlah Pos UKK Sektor Informal yang terbentuk	Pos UKK	2 Pos UKK		3 Pos UKK		5 Pos UKK		8 Pos UKK		10 Pos UKK		10 Pos UKK		
		Persentase Pembinaan kebugaran Jamaah Haji	%	30 %		50 %		50 %		80 %		100 %		100 %		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp				
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Persentase pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	%	30	%		50	%		80	%		100	%		100	%		
1.02 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	85 %	85 %	1.836	90 %	1.891	90 %	1.758	95 %	1.790	95 %	1.790	95 %	9.065	DINKES			
1.02 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	80 %	80 %	1.487	85 %	1.526	85 %	1.028	90 %	1.110	95 %	900	80 %	6.051	DINKES			
1.02 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar	100 %	100 %	11.754	100 %	5.502	100 %	6.729	100 %	6.958	100 %	13.788	100 %	44.731	DINKES			
1.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan rujukan	80 %	85 %	42.460	90 %	47.847	90 %	44.724	95 %	45.511	95 %	34.962	95 %	215.504	DINKES			
1.02 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Jumlah Sarana yang terpelihara sesuai dengan fungsinya	10 Jenis	10 Jenis	660	10 Jenis	747	10 Jenis	607	10 Jenis	724	10 Jenis	770	10 Jenis	3.508	DINKES			
1.02 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	2 %	2 %	4.705	100 %	4.747	100 %	4.682	747 %	4.540	100 %	7.390	100 %	26.064	DINKES			
1.02 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penurunan Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.220	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.370	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.518	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.805	2	Per 100.000 kelahiran hidup	17.478	DINKES
		Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup		10	Per 1.000 kelahiran hidup		10	Per 1.000 kelahiran hidup		10	Per 1.000 kelahiran hidup		10	Per 1.000 kelahiran hidup		
		Persentase Kunjungan Bumil K1	%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		
		Persentase Kunjungan Bumil K4	%	95	%		95	%		100	%		100	%		100	%		
		Deteksi Resiko Tinggi pada Ibu Hamil	%	90	%		95	%		100	%		100	%		100	%		
		Persentase Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	70	%		70	%		75	%		80	%		80	%		
		Persentase pertolongan Persalinan Oleh Nakes	%	90	%		95	%		100	%		100	%		100	%		
		Persentase Persalinan di Fasilitas	%	80	%		80	%		85	%		90	%		90	%		
		Persentase Pelayanan Nifas	%	95	%		95	%		100	%		100	%		100	%		
		Persentase PKM yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	90	%		90	%		95	%		100	%		100	%		
		Persentase PKM yang melaksanakan Orientasi P4K	%	80	%		85	%		85	%		90	%		90	%		
		Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	80	%		85	%		90	%		90	%		90	%		
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	85	%		90	%		90	%		95	%		95	%		
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	90	%		95	%		95	%		95	%		95	%		
		Angka kematian neonatus/bayi/anak balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	6	Per 1.000 kelahiran hidup		5,5	Per 1.000 kelahiran hidup		5	Per 1.000 kelahiran hidup		5	Per 1.000 kelahiran hidup		4	Per 1.000 kelahiran hidup		
		Sasaran 3																	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran																	
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>				123		300		85		612		485		1.605				
2.01 . 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Partisipasi angkatan kerja	60 Orang	60 Orang	44	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	450	60 Orang	150	300 Orang	644	DPMTKPTSP			
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	0 %	14,6 %		15 %		15 %		15 %		15 %		15 %					
		Jumlah BLK yang terbangun	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		1 Unit					

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	2,56 %	2,56 %	22	2,4 %	145	2,4 %	35	2,34 %	112	2,2 %	235	2,2 %	550	DPMTKPTSP
2.01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Kerja yang diselesaikan	100 %	100 %	57	100 %	155	100 %	50	100 %	50	100 %	100	100 %	412	
		Besaran LKS Bipartit yang dibentuk	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
	<b>MISI 2</b>															
	<b>Tujuan 2</b>															
	<b>Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup</b>															
	Sasaran 4															
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup															
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>				5.607		6.942		11.086		10.980		9.780		44.395	
2.05 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Yang tertangani	12.000 Meter Kubik	13.139 Meter Kubik	3.644	15.493 Meter Kubik	3.674	16.563 Meter Kubik	3.325	17.563 Meter Kubik	4.200	18.561 Meter Kubik	4.250	12.000 Meter Kubik	19.093	DLHP
2.05 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Lingkungan Amdal/RKL RPL dan SPPL yang diterbitkan	100 %	100 %	1.363	100 %	1.077	100 %	1.120	100 %	1.550	100 %	1.150	100 %	6.260	DLHP
		Persentase Pemegang Izin Lingkungan Yang mentaati kebijakan izin lingkungan dan izin PPLH	70 %	80 %		80 %		82 %		86 %		90 %		90 %		DLHP
		Persentase Sengketa Lingkungan Yang diselesaikan	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DLHP
		Indek Kualitas Air	40 Nilai	40 Nilai		41 Nilai		41 Nilai		42 Nilai		42 Nilai		42 Nilai		DLHP
		Indek Kualitas Udara	89,72 Nilai	89,72 Nilai		89,73 Nilai		89,74 Nilai		89,75 Nilai		90 Nilai		90 Nilai		DLHP
2.05 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Konservasi Yang Tertutup Vegetasi	0 Ha	0 Ha	0	50 Ha	367	50 Ha	1.580	50 Ha	1.550	50 Ha	900	100 %	4.397	DLHP
		Persentase Dokumen Lingkungan Yang dimanfaatkan	100 %	0 %		100 %		100 %		0 %		100 %		90 %		DLHP
2.05 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Lingkungan Yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1.420	100 %	2.400	0 %	2.000	90 %	5.820	DLHP
		Luas lahan yang direhabilitasi	0 Ha	0 Ha		0 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		100 %		DLHP
2.05 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata	0 Sekolah	5 Sekolah	600	5 Sekolah	347	0 Sekolah	2.600	5 Sekolah	280	5 Sekolah	280	5 Sekolah	4.107	DLHP
		Jumlah Dokumen Perencanaan /Pelaporan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
2.05 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang tersedia	0 %	0 %	0	35,69 %	1.477	35,69 %	1.041	35,69 %	1.000	35,69 %	1.200	35,69 %	4.718	DLHP
	Sasaran 5															
	Terselesainya penetapan batas wilayah desa dan kabupaten dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah kabupaten															
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				3.211		3.180		9.400		10.160		5.950		31.901	
1.03 . 33	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	20 %	25 %	281	0 %	0	45 %	4.250	60 %	3.750	80 %	2.850	80 %	11.131	DPUPRPKP
		Persentase Kesesuaian Pembangunan dengan RTRW	100 %	100 %	900	100 %	500	100 %	500	100 %	460	100 %	400	100 %	2.760	BAPPLITBANG
1.03 . 34	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase luas RTH publik	0 %	20 %	790	22 %	860	25 %	1.000	27 %	2.000	30 %	1.400	30 %	6.050	DPUPRPKP
1.03 . 35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase luas RTH publik	0 %	20 %	1.240	22 %	1.820	25 %	3.650	27 %	3.950	30 %	1.300	30 %	11.960	DPUPRPKP
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				350		362		314		334		284		1.644	
4.01 . 20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Tapal Batas	0 %	0 %	259	100 %	279	100 %	239	100 %	259	100 %	209	100 %	1.245	BAGIAN TAPEM
		Persentase kegiatan penataan Desa yang diselesaikan	0 %	80 %	16	81 %	8	0 %	0	0 %	0	0 %	0	81 %	24	TANA LIA



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		persentase jumlah penataan daerah otonomi baru	0 %	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	375	BETAYAU
3.03																		
3.03 . 20	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				2.765		2.639		1.111		1.181		1.135		8.832			
	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	7.960 Ton	7.962 Ton	1.657	7.965 Ton	1.489	7.970 Ton	471	7.975 Ton	551	7.980 Ton	550	7.980 Ton	4.718		DPPP	
		Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	0 Nilai	98 Nilai		112 Nilai		113 Nilai		114 Nilai		115 Nilai		115 Nilai				
3.03 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.139 Ton	1.150 Ton	1.000	1.155 Ton	1.000	1.205 Ton	590	1.225 Ton	580	1.245 Ton	535	1.245 Ton	3.705		DPPP	
		Nilai Tukar Nelayan	0 Nilai	115 Nilai		122 Nilai		123 Nilai		124 Nilai		125 Nilai		125 Nilai				
3.03 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Produk Hasil Produksi Perikanan Yang Dipromosikan	2 Jenis	25 Jenis	108	30 Jenis	150	35 Jenis	50	40 Jenis	50	40 Jenis	50	40 Jenis	408		DPPP	
3.05	<b>Pertanian</b>				4.840		4.787		2.973		2.948		3.013		18.560			
3.05 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Jenis Produk hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Dipromosikan	20 Jenis	20 Jenis	396	20 Jenis	215	25 Jenis	300	30 Jenis	250	35 Jenis	250	35 Jenis	1.411		DPPP	
3.05 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah Sawah Yang Tercetak pada skala kabupaten	350 Ha	25 Ha	2.280	13 Ha	2.315	15 Ha	730	50 Ha	750	50 Ha	750	153 Ha	6.825		DPPP	
3.05 . 19	Program peningkatan produksi	Jumlah Produksi Padi	1.989 Ton	2.000 Ton	661	1.747 Ton	719	1.887 Ton	500	2.027 Ton	500	2.167 Ton	558	2.167 Ton	2.938		DPPP	
		Jumlah Produksi Jagung	50 Ton	55 Ton		60 Ton		65 Ton		70 Ton		75 Ton		75 Ton				
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit	279 Ton	2.000 Ton		400 Ton		500 Ton		600 Ton		700 Ton		700 Ton				
		Jumlah Produksi Kelapa	2 Ton	300 Ton		4 Ton		5 Ton		6 Ton		7 Ton		7 Ton				
		Jumlah Produksi Lada	0,82 Ton	0,90 Ton		1,00 Ton		1,20 Ton		1,40 Ton		1,50 Ton		1,50 Ton				
3.05 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah PPL Pertanian Lapangan skala kabupaten	23 Orang	23 Orang	838	12 Orang	768	15 Orang	800	23 Orang	805	23 Orang	805	23 Orang	4.016		DPPP	
3.05 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak	150 Ekor	200 Ekor	358	220 Ekor	264	230 Ekor	220	250 Ekor	220	275 Ekor	220	1.175 Ekor	1.282		DPPP	
3.05 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan Populasi Ternak	1.052 Ekor	1.100 Ekor	306	1.150 Ekor	414	1.200 Ekor	324	1.250 Ekor	323	1.300 Ekor	330	1.300 Ekor	1.697		DPPP	
		Jumlah Produksi Daging	100 Ton	100 Ton		230 Ton		235 Ton		240 Ton		250 Ton		250 Ton				
		Jumlah Inseminasi Buatan	85 IB	150 IB		175 IB		200 IB		225 IB		250 IB		250 IB				
3.05 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Jenis Produk Hasil Produksi Peternakan Yang Dipromosikan	0 Jenis	0 Jenis	0	4 Jenis	92	4 Jenis	100	4 Jenis	100	4 Jenis	100	16 Jenis	392		DPPP	
1.06					1.125		1.107		762		749		852		4.594			
1.06 . 15	<b>Sosial</b>																	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi dan terverifikasi	0 %	100 %	271	100 %	257	100 %	235	100 %	220	100 %	323	100 %	1.306		DINSOSPMD	
		Persentase masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial di masyarakat	0 %	90 %	54	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	54		SESAYAP	
1.06 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentas Rekomendasi permohonan bantuan sosial dan hibah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	800	100 %	850	100 %	527	100 %	529	100 %	529	100 %	3.235		BAGIAN KESRA	
2.12					354		1.000		198		415		517		2.483			
2.12 . 15	<b>Penanaman Modal</b>																	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN	10 Rp (Milyar)	10 Rp (Milyar)	0	10 Rp (Milyar)	0	10 Rp (Milyar)	65	10 Rp (Milyar)	65	10 Rp (Milyar)	260	50 Rp (Milyar)	390		DPMTKPTSP	
2.12 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	26,5 Rp (Milyar)	26,5 Rp (Milyar)	127	26,5 Rp (Milyar)	500	26,5 Rp (Milyar)	35	26,5 Rp (Milyar)	125	26,5 Rp (Milyar)	117	132,5 Rp (Milyar)	903		DPMTKPTSP	
2.12 . 19	Program Peningkatan Pelayanan Penilaian	Rasio Bangunan Ber IMB (persen)	6,7 %	7 %	227	10 %	500	12 %	98	13 %	225	20 %	140	20 %	1.190		DPMTKPTSP	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Nilai	80 Nilai		85 Nilai		90 Nilai		95 Nilai		100 Nilai		100 Nilai		
	Sasaran 9															
	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat															
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				2.745		2.380		3.281		3.566		2.995		14.967	
2.07 . 15	<i>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>	Persentase Lembaga Yang Aktif	0 %	3,68 %	302	3,92 %	365	3,95 %	325	3,99 %	315	4,02 %	245	100 %	1.552	DINSOSPMD
		Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	0 %	100 %	0	100 %	50	100 %	163	100 %	50	100 %	50	65 %	313	SESAYAP HILIR
		Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat aktif	0 %	60 %	233	60 %	170	60 %	416	63 %	586	65 %	604	65 %	2.009	TANA LIA
		Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	0 %	0 %		0 %		20 %		40 %		60 %		60 %		
		Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	0 %	60 %	380	70 %	180	80 %	410	90 %	385	100 %	385	65 %	1.740	BETAYAU
2.07 . 16	<i>Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</i>	Persentase BUMDES yang Aktif	50 %	60 %	160	70 %	100	80 %	141	90 %	180	100 %	90	100 %	671	DINSOSPMD
2.07 . 17	<i>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</i>	Indeks Desa Membangun (Desa Berkembang)	0 %	31,25 %	592	50 %	636	68,75 %	640	87,5 %	990	96,875 %	490	96,875 %	3.348	DINSOSPMD
		Persentase Usulan MusrenbangCam yang terakomodir di tingkat kabupaten	0 %	60 %	64	75 %	91	76 %	16	77 %	25	78 %	25	78 %	221	SESAYAP
		Jumlah Desa yang di Bina	0 Desa	8 Desa	25	8 Desa	15	8 Desa	17	8 Desa	50	8 Desa	30	8 Desa	137	SESAYAP HILIR
		Persentase usulan murenbang kecamatan yang terakomodir di Tk. Kabupaten	0 %	32 %	13	40 %	15	48 %	12	56 %	12	64 %	12	64 %	63	TANA LIA
		Persentase usulan murenbang kecamatan yang terakomodir di Tk. Kabupaten	0 %	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	200	BETAYAU
		persentase usulan desa yang diakomodir di tingkat kab	0 %	80 %	97	80 %	40	80 %	118	80 %	118	80 %	118	64 %	491	MURUK RIAN
2.07 . 18	<i>Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0 %	60 %	230	70 %	352	80 %	304	90 %	255	95 %	265	96,875 %	1.406	DINSOSPMD
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkategori baik	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	300	SESAYAP HILIR
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkategori baik	0 %	60 %	75	65 %	75	70 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	375	BETAYAU
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkategori baik	0 %	60 %	0	65 %	0	70 %	155	100 %	155	100 %	285	100 %	595	MURUK RIAN
2.07 . 19	<i>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</i>	Perentase Masyarakat Desa yang di berdayakan	0 %	80 %	158	85 %	24	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	182	SESAYAP
		Jumlah Desa Yang di Bina	0 Desa	7 Desa	140	7 Desa	140	7 Desa	200	7 Desa	81	7 Desa	81	7 Desa	642	SESAYAP HILIR
		Persentase organisasi perempuan yang aktif di Kecamatan Tana Lia	0 %	75 %	150	80 %	40	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	190	TANA LIA
		persentase pkk desa yang aktif	0 %	100 %	85	100 %	47	100 %	150	100 %	150	100 %	100	80 %	532	MURUK RIAN
3.08	<b>Transmigrasi</b>				90		100		153		139		164		646	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp			
3.08 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah rata-rata pendapatan Transmigran	0 Rp/KK	1,6 Rp(Juta) /KK	90	1,8 Rp(Juta) /KK	100	2 Rp(Juta) /KK	153	2,2 Rp(Juta) /KK	139	2,3 Rp(Juta) /KK	164	2,3 Rp(Juta) /KK	646	DPMTKPTSP		
	<b>MISI 4</b>																	
	<b>Tujuan 4</b>																	
	<b>Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>																	
	Sasaran 10																	
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah																	
3.04	<b>Pariwisata</b>				7.343		5.918		5.198		3.450		4.376		26.285			
3.04 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0 %	10 %	5.993	10 %	3.513	10 %	2.898	10 %	1.200	10 %	2.626	50 %	16.230	DPPO		
3.04 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Unggulan yang dikembangkan	1 Obyek	1 Obyek	1.350	1 Obyek	2.405	1 Obyek	2.300	2 Obyek	2.250	2 Obyek	1.750	2 Obyek	10.055	DPPO		
	Sasaran 11																	
	Meningkanya kelestarian kebudayaan kearifan lokal																	
2.16	<b>Kebudayaan</b>				4.720		4.730		10.730		6.240		11.345		37.765			
2.16 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Organisasi/Lembaga/Pa guyuban Adat, Seni dan Budaya yang dibina rennan intensif	6 Buah	6 Buah	1.000	6 Buah	2.060	7 Buah	2.800	7 Buah	3.820	8 Buah	3.000	34 Buah	12.680	DISDIK		
		Jumlah Museum yang Didirikan	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		1 Unit		2 Unit				
		Jumlah Balai Adat yang Representatif	4 Unit	4 Unit		4 Unit		4 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit				
2.16 . 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar	10 %	20 %	1.220	20 %	1.505	40 %	1.315	60 %	1.200	100 %	1.225	100 %	6.465	DISDIK		
		Peningkatan dan pembangunan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		2 Unit		2 Unit		7 Unit				
2.16 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Grup Kesenian yang dibina	2 Grup	4 Grup	2.500	8 Grup	1.165	10 Grup	6.615	12 Grup	1.220	14 Grup	7.120	48 Grup	18.620	DISDIK		
		Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dalam dan luar daerah	1 Event	1 Event		1 Event		1 Event		1 Event		1 Event		5 Event				
		Persentase Seniman/Budayawan yang aktif	25 %	50 %		50 %		63 %		75 %		100 %		100 %				
	<b>MISI 5</b>																	
	<b>Tujuan 5</b>																	
	<b>Melanjutkan pembangunan infrastruktur</b>																	
	Sasaran 12																	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur																	
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				63.323		65.970		47.762		47.888		57.130		282.072			
1.03 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi jalan dalam kondisi baik	0,8 %	0,89 %	30.429	0,9 %	33.600	0,92 %	16.725	0,94 %	17.851	0,95 %	22.000	100 %	120.605	DPUPRPKP		
1.03 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	85 %	89 %	4.582	90 %	4.000	92 %	2.100	94 %	1.100	95 %	1.100	95 %	12.882	DPUPRPKP		
1.03 . 31	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	80 %	89 %	28.312	90 %	28.370	92 %	28.937	94 %	28.937	95 %	34.030	95 %	148.586	DPUPRPKP		
2.09	<b>Perhubungan</b>				740		0		675		500		400		2.315			
2.09 . 17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	0 %	65 %	740	100 %	0	100 %	675	100 %	0	100 %	0	400	100 %	2.315	DLHP	
		Persentase Kecamatan Yang terlayani Transportasi Umum Darat	0 %	0 %		0 %		40 %		60 %		80 %		80 %				
		Persentase Kecamatan Yang terlayani Transportasi Umum Sungai	40 %	40 %		40 %		60 %		60 %		60 %		60 %				
		Penghargaan sopir/motoris teladan	0 Orang	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		3 Orang		4 Orang		4 Orang				
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				3.638		1.417		1.637		1.637		1.637		9.966			

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.10 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Kepuasan terhadap Penyebaran Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada Masyarakat/ASN	0 %	100 %	3.319	100 %	964	100 %	1.300	100 %	1.050	100 %	1.050	100 %	7.683	DISKOMINFO
		Persentase Tesebarnya Informasi kepada Masyarakat	100 %	100 %	319	100 %	453	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	771	BAGIAN ORHUM
2.10 . 24	Program Infrastruktur Teknologi Informasi Jaringan TIK	Persentase pemeliharaan jaringan TIK di lingkungan pemerintaf	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	337	100 %	587	100 %	587	100 %	1.511	DISKOMINFO
	Sasaran 13	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman														
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan</b>				100		5.400		4.300		4.100		3.900		17.800	
1.04 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan layak huni	0 %	17,81 %	100	25 %	3.300	50 %	3.300	75 %	3.100	100 %	2.900	100 %	12.700	DPUPRPKP
1.04 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase rumah tinggal bersanitasi	80 %	83,89 %	0	84 %	2.100	85 %	1.000	86 %	1.000	87 %	1.000	87 %	5.100	DPUPRPKP
	<b>MISI 6</b>															
	<b>Tujuan 6</b>															
	<b>Meningkatnya kontribusi sektor industri kreatif</b>															
	Sasaran 14	Meningkatnya volume produktivitas industri kreatif pada perekonomian daerah														
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				160		369		52		300		300		1.181	
2.11 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (Terhadap seluruh UKM)	100 %	100 %	160	100 %	169	100 %	0	100 %	100	100 %	100	20 %	529	DPPKU
2.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan WUB/WUP	0 %	1 %	0	2 %	100	3 %	52	4 %	100	5 %	100	5 %	352	DPPKU
2.11 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Sistem Pendukung	5 %	10 %	0	12 %	100	14 %	0	16 %	100	20 %	100	20 %	300	DPPKU
	<b>MISI 7</b>															
	<b>Tujuan 7</b>															
	<b>Pengembangan pusat keunggulan daerah</b>															
	Sasaran 15	Meningkatnya kontribusi industri potensi lokal dalam perekonomian daerah														
3.07	<b>Perindustrian</b>				618		739		200		550		550		2.657	
3.07 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Berbasis Teknologi	0 %	0 %	0	0 %	0	2 %	0	4 %	100	6 %	100	6 %	200	DPPKU
3.07 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendapatkan fasilitas peningkatan daya saing	0 %	20 %	618	30 %	739	40 %	200	50 %	450	60 %	450	60 %	2.457	DPPKU
	<b>MISI 8</b>				7.900		6.622		8.085		9.615		9.842		42.064	
	<b>Tujuan 8</b>															
	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>															
	Sasaran 16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik														
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				0		0		-		375		325		700	
4.01 . 33	Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	375	100 %	325	100 %	700	BAGIAN ORHUM
	Sasaran 17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas														
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				0		0		545		485		410		1.440	
4.01 . 27	Program Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas Disusun Tepat Waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	545	100 %	485	100 %	410	100 %	1.440	BAGIAN ORHUM
4.02	<b>Pengawasan</b>				2.900		2.822		3.390		5.115		5.367		19.594	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2017		2018		2019		2020		2021				
					TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.02 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Persentase pengelolaan keuangan sesuai SAP	100 %	100 %	2.900	100 %	2.822	100 %	3.390	100 %	5.115	100 %	5.367	100 %	19.594	INSPEKTORAT	
4.03	<b>Perencanaan</b>				1.900		1.200		1.200		1.100		1.200		6.600		
4.03 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %	1.900	100 %	1.200	100 %	1.200	100 %	1.100	100 %	1.200	100 %	6.600	BAPPLITBANG	
4.04	<b>Keuangan</b>				3.100		2.600		2.950		2.540		2.540		13.730		
4.04 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP	100 %	0 %	2.100	0 %	1.500	90 %	1.800	92 %	1.395	94 %	1.395	100 %	8.190	BPKAD	
		Persentase atas hasil monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		Presentase Ketepatan waktu penetapan Perda & Perbup APBD	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
4.04 . 35	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase data Aset Daerah Yang Akurat sesuai dengan Pemanfaatan dan Peruntukannya	75 %	82 %	1.000	84 %	1.100	86 %	1.150	88 %	1.145	90 %	1.145	90 %	5.540	BPKAD	
	<b>MISI 9</b>																
	<b>Tujuan 9</b>																
	<b>Terwujudnya agroindustri pertanian</b>																
	Sasaran 18																
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian untuk kesejahteraan masyarakat																
3.03	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				2.657		2.489		1.061		1.131		1.085		8.423		
3.03 . 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	7.960 Ton	7.962 Ton	1.657	7.965 Ton	1.489	7.970 Ton	471	7.975 Ton	551	7.980 Ton	550	7.980 Ton	4.718	DPPP	
		Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	0 Nilai	98 Nilai		112 Nilai		113 Nilai		114 Nilai		115 Nilai		115 Nilai			
3.03 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.139 Ton	1.150 Ton	1.000	1.155 Ton	1.000	1.205 Ton	590	1.225 Ton	580	1.245 Ton	535	1.245 Ton	3.705	DPPP	
		Nilai Tukar Nelayan	0 Nilai	115 Nilai		122 Nilai		123 Nilai		124 Nilai		125 Nilai		125 Nilai			
3.05	<b>Pertanian</b>				353		0		0		0		0		353		
3.05 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	0 Nilai	98 Nilai	353	98,4 Nilai	0	98,8 Nilai	0	99,1 Nilai	0	99,5 Nilai	0	99,5 Nilai	353	DPPP	
	Sasaran 19																
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat																
3.05	<b>Pertanian</b>				271		188		105		100		100		764		
3.05 . 16	Program Peningkatan Ketahanan	Konsumsi Kalori Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1.847 Kkal 0 Nilai	1.878 Kkal 74 Nilai	271	1.909 Kkal 76 Nilai	188	1.940 Kkal 78 Nilai	105	1.971 Kkal 82 Nilai	100	2.000 Kkal 87 Nilai	100	1.847 Kkal 87 Nilai	764	DPPP	
	<b>TOTAL</b>				363.614		357.185		344.208		348.758		355.186		1.768.952		



## **BAB 7**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Indikasi rencana program pembangunan di Kabupaten Tana Tidung berisi program-program prioritas, khususnya program prioritas Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dana program pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaanya. Setelah program-program diketahui baik itu dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, kemudian dibuatkan alokasi pagu untuk setiap program, selanjutnya perhitungan pagu indikatif masing-masing program berhubungan dengan pemenuhan urusan pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung**  
**Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Realisasi 2016 (Rp)	Proyeksi (Rp)				
			2017*	2018*	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Kapasitas Riil Keuangan</b>	918.225.737.725,00	986.735.958.995,71	705.929.499.130,44	889.022.928.079,11	905.326.587.332,40	921.630.246.585,70
2	<b>Belanja</b>	918.225.737.725,00	986.735.958.995,71	705.929.499.130,44	889.022.928.079,11	905.326.587.332,40	921.630.246.585,70
2.1	Belanja Tidak Langsung	280.767.262.744,00	303.753.628.566,48	313.886.290.530,44	342.003.065.323,57	362.414.999.516,76	382.826.933.709,95
2.1.1	Belanja Pegawai	209.394.727.233,00	209.798.381.616,48	215.646.888.530,44	259.926.491.479,95	286.850.932.602,66	313.775.373.725,38
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	19.768.000.000,00	14.925.000.000,00	10.464.800.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.794.000.000,00	3.130.834.750,00	1.850.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	49.810.535.511,00	75.899.412.200,00	83.924.602.000,00	68.576.573.843,62	62.064.066.914,10	55.551.559.984,57
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	637.458.474.981,00	682.982.330.429,23	392.043.208.600,00	547.019.862.755,54	542.911.587.815,64	538.803.312.875,75
2.2.1	Belanja Pegawai	29.994.957.491,00	33.202.661.140,00	22.108.813.093,00	30.848.538.218,55	30.616.856.912,03	30.385.175.605,51
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.890.107.565,00	183.639.750.601,23	155.964.403.155,00	217.617.916.946,61	215.983.544.420,98	214.349.171.895,34
2.2.3	Belanja Modal	418.657.319.125,00	466.139.918.688,00	213.969.992.352,00	298.553.407.590,38	296.311.186.482,63	294.068.965.374,90

Sumber : Hasil Analisa, 2017

\*Merupakan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

**Tabel 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				426.466		434.214		412.524		412.416		403.335		2.088.956	
1.01	<b>Pendidikan</b>				175.683		165.381		168.070		174.860		172.955		856.949	
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan OPD	72 %	75 %	4.490	78 %	4.560	80 %	6.500	82 %	7.000	82 %	7.500	82 %	30.050	DISDIK
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan OPD	72 %	75 %	1.325	78 %	600	80 %	6.970	82 %	7.570	82 %	8.370	82 %	24.835	DISDIK
1.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan OPD	72 %	75 %	325	78 %	175	80 %	0	82 %	0	82 %	0	82 %	500	DISDIK
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan OPD	72 %	75 %	100	78 %	100	80 %	150	82 %	430	82 %	220	82 %	1.000	DISDIK
1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %	80 %	110	80 %	225	80 %	180	80 %	225	80 %	250	80 %	990	DISDIK
		Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD	C Nilai	B Nilai		B Nilai		A Nilai		A Nilai		A Nilai		A Nilai		
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Lembaga PAUD berakreditasi B	40 %	50 %	4.955	70 %	2.640	80 %	2.500	90 %	3.390	100 %	3.100	100 %	16.585	DISDIK
		APK dan APM PAUD	65 %	70 %		75 %		80 %		85 %		90 %		90 %		
		Persentase Tenaga pendidik PAUD ber kualifikasi S-1/D-IV	9,5 %	15,5 %		19 %		21,5 %		23 %		25 %		25 %		
		Rasio Jumlah Guru PAUD terhadap Murid	200 Per 1.000 Penduduk	200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		200 Per 1.000 Penduduk		
		Rasio Kelas PAUD terhadap siswa didik	33,33 Per 1.000 Penduduk	35,71 Per 1.000 Penduduk		37,04 Per 1.000 Penduduk		40 Per 1.000 Penduduk		43,48 Per 1.000 Penduduk		50 Per 1.000 Penduduk		50 Per 1.000 Penduduk		
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar berakreditasi B	50 %	50 %	145.298	70 %	132.145	90 %	115.925	90 %	112.835	100 %	103.430	100 %	609.633	DISDIK
		APK dan APM Pendidikan Dasar	9,7 Per 1.000 Penduduk	9,7 Per 1.000 Penduduk		9,75 Per 1.000 Penduduk		9,8 Per 1.000 Penduduk		9,85 Per 1.000 Penduduk		9,9 Per 1.000 Penduduk		9,9 Per 1.000 Penduduk		
		Angka Kelulusan Pendidikan Dasar	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Angka Melanjutkan	105,2 %	105,4 %		105,6 %		105,8 %		106 %		106,2 %		106,2 %		
		Angka Putus Sekolah	0 %	0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		0 %		
		Rata-Rata Nilai Ujian Nasional	62,03 %	55,15 %		57,91 %		60,8 %		63,84 %		67,04 %		67,04 %		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	303 Per 10.000 Penduduk	303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		303 Per 10.000 Penduduk		
		Persentase Sekolah Negeri yang telah berakreditasi minimal B	77,7 %	81,3 %		84,8 %		94,7 %		98,2 %		100 %		100 %		
		Persentase Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	78,6 %	86,6 %		94,6 %		96,4 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase terlaksananya 3 Sekolah Terpadu yang berkonsep Boarding School	0 %	0 %		16,67 %		33,33 %		66,7 %		100 %		100 %		
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf usia >15 tahun ke atas	96,76 %	96,76 %	330	96,9 %	530	97,2 %	780	97,5 %	825	97,7 %	865	97,7 %	3.330	DISDIK
		Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan.	72,76 %	74,67 %		76,57 %		78,53 %		80,5 %		82,46 %		82,46 %		
		Persentase Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang aktif	66,67 %	66,67 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %		
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga pendidik ber kualifikasi S-1/D-IV	67,7 %	67,7 %	2.010	74 %	2.095	77 %	3.385	81 %	2.655	84,5 %	3.555	84,5 %	13.700	DISDIK





KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp								
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp								
1.02 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu hamil kurang energi kronik yang mendapat makanan tambahan	%	75	%	950	80	%	1.000	85	%	1.004	90	%	1.000	95	%	1.200	95	%	5.154	DINKES	
		Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet tambah darah (TTd)	%	80	%		85	%		90	%		95	%		100	%		100	%			
		Persentase Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	%	50	%		60	%		70	%		80	%		90	%		90	%			
		Persentase bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini ( IMD)	%	60	%		65	%		70	%		75	%		80	%		80	%			
		Persentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	80	%		85	%		90	%		95	%		100	%		100	%			
		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah darah	%	50	%		60	%		70	%		75	%		80	%		80	%			
		Persentase Gizi Kurang dan Buruk ditangani	%		%			%			%			%			%			%			
1.02 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Sanitasi Dasar memenuhi syarat	%	60	%	1.560	60	%	1.620	60	%	1.525	60	%	1.580	60	%	1.940	60	%	8.225	DINKES	
		Persentase Lingkungan dan Kawasan sehat	%	50	%		50	%		50	%		50	%		50	%		50	%			
		Persentase petugas Kesehatan Lingkungan	%	70	%		70	%		70	%		70	%		70	%		70	%			
		Jumlah Pos UKK Sektor Informal yang terbentuk	Pos UKK	2	Pos UKK		3	Pos UKK		5	Pos UKK		8	Pos UKK		10	Pos UKK		10	Pos UKK			
		Persentase Pembinaan kebugaran Jamaah Haji	%	30	%		50	%		50	%		80	%		100	%		100	%			
		Persentase pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	%	30	%		50	%		50	%		80	%		100	%		100	%			
1.02 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	85	%	85	%	1.836	90	%	1.891	90	%	1.758	95	%	1.790	95	%	1.790	95	%	9.065	DINKES
1.02 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	80	%	80	%	1.487	85	%	1.526	85	%	1.028	90	%	1.110	95	%	900	80	%	6.051	DINKES
1.02 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan dasar	100	%	100	%	11.754	100	%	5.502	100	%	6.729	100	%	6.958	100	%	13.788	100	%	44.731	DINKES
1.02 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan rujukan	80	%	85	%	42.460	90	%	47.847	90	%	44.724	95	%	45.511	95	%	34.962	95	%	215.504	DINKES
1.02 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit	Jumlah Sarana yang terpelihara sesuai dengan fungsinya	10	Jenis	660	10	Jenis	747	10	Jenis	607	10	Jenis	724	10	Jenis	770	10	Jenis	3.508	DINKES		
1.02 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan	2	%	2	%	4.705	100	%	4.747	100	%	4.682	747	%	4.540	100	%	7.390	100	%	26.064	DINKES
1.02 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penurunan Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.220	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.370	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.518	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.565	2	Per 100.000 kelahiran hidup	3.805	2	Per 100.000 kelahiran hidup	17.478	DINKES	
		Penurunan Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup	10	Per 1.000 kelahiran hidup		
		Persentase Kunjungan Bumil K1	%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%			
		Persentase Kunjungan Bumil K4	%	95	%		95	%		100	%		100	%		100	%		100	%			

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Deteksi Resiko Tinggi pada Ibu Hamil	%	90	%	95	%	100	%	100	%	100	%	100	%	
		Persentase Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	70	%	70	%	75	%	75	%	80	%	80	%	
		Persentase pertolongan Persalinan Oleh Nakes	%	90	%	95	%	95	%	100	%	100	%	100	%	
		Persentase Persalinan di Fasyankes	%	80	%	80	%	85	%	85	%	90	%	90	%	
		Persentase Pelayanan Nifas	%	95	%	95	%	100	%	100	%	100	%	100	%	
		Persentase PKM yang melaksanakan kelas ibu hami	%	90	%	90	%	95	%	95	%	100	%	100	%	
		Persentase PKM yang melaksanakan Orientasi P4K	%	80	%	85	%	85	%	90	%	90	%	90	%	
		Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	80	%	85	%	90	%	90	%	90	%	90	%	
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	85	%	90	%	90	%	90	%	95	%	95	%	
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	90	%	95	%	95	%	95	%	95	%	95	%	
		Angka kematian neonatus/bayi/anak balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 kelahiran hidup	6	Per 1.000 kelahiran hidup	5,5	Per 1.000 kelahiran hidup	5	Per 1.000 kelahiran hidup	5	Per 1.000 kelahiran hidup	4	Per 1.000 kelahiran hidup	4	Per 1.000 kelahiran hidup	
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				149.136		164.744		142.145		134.496		126.278		716.800	
1.03.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase tingkat layanan administrasi dan operasional DPUPRP&KP	80 %	80 %	4.550	85 %	3.508	90 %	3.201	95 %	3.508	100 %	3.508	100 %	18.274	DPUPRPKP
1.03.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase bangunan negara dalam kondisi baik	90 %	92,25 %	28.212	94 %	22.567	96 %	27.875	98 %	28.583	100 %	28.583	100 %	135.819	DPUPRPKP
1.03.05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase aparatur yang handal	80 %	80 %	142	85 %	190	90 %	265	95 %	216	100 %	216	100 %	1.028	DPUPRPKP
1.03.06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80 %	100 %	0	100 %	0	100 %	42	100 %	42	100 %	42	100 %	126	DPUPRPKP
1.03.15	<i>Program pembangunan jalan dan jembatan</i>	Proporsi jalan dalam kondisi baik	0,8 %	0,89 %	30.429	0,9 %	33.600	0,92 %	16.725	0,94 %	17.851	0,95 %	22.000	100 %	120.605	DPUPRPKP
1.03.16	<i>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</i>	Persentase layanan drainase	100 %	100 %	4.035	100 %	4.400	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	11.435	DPUPRPKP
1.03.17	<i>Program pembangunan turap/talud/bronjong</i>	Persentase bangunan pengaman sungai yang terbangun	100 %	100 %	10.401	100 %	17.000	100 %	15.000	100 %	7.000	100 %	7.000	100 %	56.401	DPUPRPKP
1.03.18	<i>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</i>	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	85 %	89 %	4.582	90 %	4.000	92 %	2.100	94 %	1.100	95 %	1.100	95 %	12.882	DPUPRPKP
1.03.24	<i>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i>	Persentase penduduk berakses air minum	2 %	2,98 %	25.249	25 %	25.280	27 %	13.000	30 %	13.000	35 %	5.250	35 %	81.779	DPUPRPKP
1.03.29	<i>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</i>	Persentase bangunan layanan publik yang berfungsi baik	90 %	92,5 %	6.913	94 %	22.250	96 %	24.200	98 %	22.500	100 %	17.000	100 %	92.863	DPUPRPKP
1.03.30	<i>Program pembangunan infrastruktur pedesaan</i>	Persentase penduduk berakses air minum	2 %	2,98 %	3.101	25 %	400	27 %	400	30 %	600	35 %	600	35 %	5.101	DPUPRPKP
1.03.31	<i>Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</i>	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	80 %	89 %	28.312	90 %	28.370	92 %	28.937	94 %	28.937	95 %	34.030	95 %	148.586	DPUPRPKP
1.03.33	<i>Program Perencanaan Tata Ruang</i>	Persentase ketersediaan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	20 %	25 %	281	0 %	0	45 %	4.250	60 %	3.750	80 %	2.850	80 %	11.131	DPUPRPKP
		Persentase Kesesuaian Pembangunan dengan RTRW	100 %	100 %	900	100 %	500	100 %	500	100 %	460	100 %	400	100 %	2.760	BAPPLITBANG
1.03.34	<i>Program Pemanfaatan Ruang</i>	Persentase luas RTH publik	0 %	20 %	790	22 %	860	25 %	1.000	27 %	2.000	30 %	1.400	30 %	6.050	DPUPRPKP
1.03.35	<i>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>	Persentase luas RTH publik	0 %	20 %	1.240	22 %	1.820	25 %	3.650	27 %	3.950	30 %	1.300	30 %	11.960	DPUPRPKP

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>				3.100		8.400		5.082		5.272		4.787		26.641	
1.04 . 01	<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %	100 %	2.147	100 %	2.544	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	4.691	BPBD
1.04 . 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	Persentase Kepuasan ASN Terhadap ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	0 %	100 %	214	100 %	175	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	389	BPBD
1.04 . 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	Persentase peningkatan disiplin aparatur	0 %	100 %	79	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	79	BPBD
1.04 . 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	0 %	100 %	53	100 %	20	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	73	BPBD
1.04 . 15	<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	Cakupan ketersediaan layak huni	0 %	17,81 %	100	25 %	3.300	50 %	3.300	75 %	3.100	100 %	2.900	100 %	12.700	DPUPRPKP
1.04 . 16	<i>Program Lingkungan Sehat Perumahan</i>	Persentase rumah tinggal bersantasi	80 %	83,89 %	0	84 %	2.100	85 %	1.000	86 %	1.000	87 %	1.000	87 %	5.100	DPUPRPKP
1.04 . 18	<i>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</i>	Proporsi perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam	0 %	0 %	0	0 %	0	0,25 %	200	0 %	0	0 %	0	0,25 %	200	DPUPRPKP
		Persentase penanganan perumahan akibat bencana alam/sosial	0 %	0 %	228	100 %	201	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	429	BPBD
1.04 . 19	<i>Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</i>	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Rate Time) Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0 %	100 %	0	100 %	0	100 %	382	100 %	972	100 %	837	100 %	2.191	SATPOLPPPMK
1.04 . 20	<i>Program pengelolaan areal pemakaman</i>	Persentase areal tempat pemakaman umum yang terbangun	0 %	0 %	0	0 %	0	30 %	200	60 %	200	90 %	50	90 %	450	DPUPRPKP
1.04 . 43	<i>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</i>	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	0 %	100 %	280	100 %	60	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	340	BPBD
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				6.902		5.002		7.734		7.969		8.051		35.657	
1.05 . 01	<i>Program pelayanan administrasi perkantoran</i>	Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	65 %	70 %	1.704	75 %	2.188	100 %	1.455	100 %	1.590	100 %	1.590	100 %	8.527	SATPOLPPPMK
		Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1.163	100 %	962	100 %	962	100 %	3.087	BPBD
1.05 . 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Sarana Dan Prasarana Yang Layak Fungsi	100 %	100 %	764	100 %	537	100 %	142	100 %	162	100 %	192	100 %	1.797	SATPOLPPPMK
		Persentas Sarana Dan Prasarana Yang Layak Fungsi	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	254	100 %	155	100 %	155	100 %	564	BPBD
1.05 . 03	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Berdaya Guna	100 %	100 %	443	100 %	250	100 %	229	100 %	311	100 %	322	100 %	1.555	SATPOLPPPMK
		Persentase ASN yang sesuai dengan kompetensi	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	130	100 %	130	100 %	130	100 %	390	BPBD
1.05 . 04	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	159	100 %	41	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	200	SATPOLPPPMK
1.05 . 05	<i>Program Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah</i>	Persentase Pelanggaran PERDA Yang Di Tindak	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	145	100 %	185	100 %	256	100 %	586	SATPOLPPPMK
1.05 . 06	<i>Program Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat</i>	Persentase Pengembangan Kapasitas Satuan Linmas	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	266	100 %	139	100 %	140	100 %	545	SATPOLPPPMK

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1.05 . 07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan disusun tepat waktu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	30	100 %	40	100 %	45	100 %	115	SATPOLPPPMK
		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	25	100 %	25	100 %	25	100 %	75	BPBD
1.05 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan keamanan lingkungan	100 %	100 %	310	100 %	230	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	540	SATPOLPPPMK
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang diselesaikan	0 %	0 %	0	75 %	20	85 %	15	95 %	100	100 %	100	100 %	235	SESAYAP
		persentase Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang diselesaikan	0 %	100 %	0	100 %	0	100 %	107	100 %	108	100 %	108	100 %	323	MURUK RIAN
1.05 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum (K3)	100 %	100 %	200	100 %	100	100 %	351	100 %	351	100 %	368	100 %	1.370	SATPOLPPPMK
1.05 . 19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Peran Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	0 %	100 %	0	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100 %	5	100 %	20	SESAYAP HILIR
		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang diselesaikan	0 %	73 %	44	0 %	0	78 %	61	80 %	61	83 %	68	83 %	233	TANA LIA
1.05 . 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	785	100 %	984	100 %	984	100 %	2.753	BPBD
1.05 . 23	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	643	100 %	743	100 %	743	100 %	2.130	BPBD
1.05 . 36	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Presentase kasus/kejadian konflik yang ditangani	0 %	100 %	960	100 %	179	100 %	490	100 %	500	100 %	400	100 %	2.529	KESBANGPOL
1.05 . 38	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Angka Konflik Suku, Agama, Ras Dan Antar Galungan	0 %	100 %	0	100 %	281	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	281	SATPOLPPPMK
		Persentase terlaksananya Kegiatan Pengembangan wawasan Kebangsaan serta Kesatuan dan Persatuan bangsa	100 %	100 %	473	100 %	158	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	631	SESAYAP
		Jumlah Jenis Kegiatan yang akan Dilaksanakan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	258	2 Kegiatan	20	2 Kegiatan	578	2 Kegiatan	558	2 Kegiatan	558	2 Kegiatan	1.971	SESAYAP HILIR
		Persentase rangkaian keg keagamaan yg tercapai	0 %	85 %	297	90 %	190	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %	487	TANA LIA
		Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	0 %	60 %	466	65 %	200	70 %	400	80 %	400	85 %	390	100 %	1.856	MURUK RIAN
		Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	0 %	100 %	150	100 %	77	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	677	BETAYAU
		Persentase LSM, orang dan OKP yang dibina	0 %	100 %	129	100 %	50	100 %	70	100 %	70	100 %	120	100 %	439	KESBANGPOL
1.05 . 42	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pengawasan, pembinaan dan fasilitasi pemerintah dibidang politik	0 %	100 %	375	100 %	103	100 %	240	100 %	240	100 %	240	100 %	1.198	KESBANGPOL
1.05 . 43	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani	0 %	100 %	170	100 %	373	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	543	SATPOLPPPMK

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp			
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.06	<b>Sosial</b>				2.202		2.028		1.745		1.479		1.514			8.967		
1.06 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Administrasi	0 %	100 %	892	100 %	744	100 %	790	100 %	550	100 %	482	100 %		3.458	DINSOSPMD	
1.06 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase Tingkat Kepuasan terhadap tersedianya sarana dan prasarana aparatur	0 %	100 %	100	100 %	113	100 %	113	100 %	110	100 %	110	100 %		547	DINSOSPMD	
1.06 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	0 %	100 %	85	100 %	63	100 %	80	100 %	70	100 %	70	100 %		368	DINSOSPMD	
1.06 . 15	<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>	Persentase Data Kemiskinan yang tervalidasi dan diverifikasi	0 %	100 %	271	100 %	257	100 %	235	100 %	220	100 %	323	100 %		1.306	DINSOSPMD	
		Persentasemalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial di masyarakat	0 %	90 %	54	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	90 %		54	SESAYAP	
1.06 . 21	<i>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</i>	Persentas Rekomendasi permohonan bantuan sosial dan hibah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	800	100 %	850	100 %	527	100 %	529	100 %	529	100 %		3.235	BAGIAN KESRA	
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				29.631		30.234		41.924		39.504		43.874			185.166		
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>				123		300		85		612		485			1.605		
2.01 . 15	<i>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>	Jumlah Partisipasi angkatan kerja	60 Orang	60 Orang	44	60 Orang	0	60 Orang	0	60 Orang	450	60 Orang	150	300 Orang		644	DPMTKPTSP	
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	0 %	14,6 %		15 %		15 %		15 %		15 %		15 %				
		Jumlah BLK yang terbangun	0 Unit	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0 Unit		1 Unit				
2.01 . 16	<i>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</i>	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	2,56 %	2,56 %	22	2,4 %	145	2,4 %	35	2,34 %	112	2,2 %	235	2,2 %		550	DPMTKPTSP	
2.01 . 17	<i>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</i>	Persentase Kasus Kerja yang diselesaikan	100 %	100 %	57	100 %	155	100 %	50	100 %	50	100 %	100	100 %		412		
		Besaran LKS Bipartit yang dibentuk	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit				
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				368		370		372		310		425			1.845		
2.02 . 16	<i>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</i>	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	48,06 Indeks	60,5 Indeks	225	60,9 Indeks	135	70,5 Indeks	145	70,9 Indeks	105	80 Indeks	265	80 Indeks		875	DINSOSPMD	
2.02 . 18	<i>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</i>	Persentase Partisipasi Perempuan Dilembaga Pemerintah	42,12 %	40 %	143	40 %	235	40 %	227	40 %	205	40 %	160	40 %		970	DINSOSPMD	
		Persentase Perempuan yang menduduki Jabatan dalam pemerintahan	0 %	20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %				
		Cakupan PUG yang dibina	0 %	70,8 %		80 %		80,5 %		90,5 %		100 %		100 %				
2.04	<b>Pertanahan</b>				356		351		61		341		391			1.500		
2.04 . 15	<i>Program pembangunan sistem pendaftaran tanah</i>	Persentase Informasi Pertanahan yang akurat	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	130	100 %	130	100 %		260	BAGIAN TAPEM	
2.04 . 16	<i>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>	Persentase Telaahan atas Usulan Penetapan Lokasi Yang Masuk dan penyelesaiannya	100 %	100 %	356	100 %	351	100 %	29	100 %	112	100 %	141	100 %		989	BAGIAN TAPEM	
2.04 . 17	<i>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</i>	Persentase terselesaikannya Konflik Pertanahan	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	32	100 %	99	100 %	120	100 %		251	BAGIAN TAPEM	
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>				7.260		8.769		13.259		12.200		11.600			53.088		
2.05 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	0 %	80 %	1.480	85 %	1.637	88 %	1.764	90 %	762	95 %	862	95 %		6.505	DLHP	

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp		
2.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kepuasan terhadap sarana dan prasarana aparatur	0 %	80 %	73	85 %	90	88 %	351	90 %	350	95 %	850	95 %	1.714	DLHP	
2.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	0 %	45 %	100	58 %	100	65 %	50	70 %	100	75 %	100	75 %	450	DLHP	
2.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Program Pengembangan Kinerja	Perangkat Daerah	0 Nilai	0 Nilai	0	66 Nilai	0	70 Nilai	8	75 Nilai	8	80 Nilai	8	80 Nilai	24	DLHP	
2.05 . 15	Program Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Yang tertangani	12.000 Meter Kubik	13.139 Meter Kubik	3.644	15.493 Meter Kubik	3.674	16.563 Meter Kubik	3.325	17.563 Meter Kubik	4.200	18.561 Meter Kubik	4.250	12.000 Meter Kubik	19.093	DLHP	
2.05 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Lingkungan Amdal/RKL RPL dan SPPL yang diterbitkan	100 %	100 %	1.363	100 %	1.077	100 %	1.120	100 %	1.550	100 %	1.150	100 %	6.260	DLHP	
		Persentase Pemegang Izin Lingkungan Yang mentaati kebijakan izin lingkungan dan izin PPLH	70 %	80 %		80 %		82 %		86 %		90 %		90 %		DLHP	
		Persentase Sengketa Lingkungan Yang diselesaikan	0 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		DLHP	
		Indek Kualitas Air	40 Nilai	40 Nilai		41 Nilai		41 Nilai		42 Nilai		42 Nilai		42 Nilai		DLHP	
		Indek Kualitas Udara	89,72 Nilai	89,72 Nilai		89,73 Nilai		89,74 Nilai		89,75 Nilai		90 Nilai		90 Nilai		DLHP	
2.05 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Konservasi Yang Tertutup Vegetasi	0 Ha	0 Ha	0	0 Ha	367	50 Ha	1.580	50 Ha	1.550	50 Ha	900	100 %	4.397	DLHP	
		Persentase Dokumen Lingkungan Yang dimanfaatkan	100 %	0 %		100 %		100 %		0 %		100 %		90 %		DLHP	
2.05 . 18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen Lingkungan Yang dimanfaatkan	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	1.420	100 %	2.400	0 %	2.000	90 %	5.820	DLHP	
		Luas lahan yang direhabilitasi	0 Ha	0 Ha		0 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		100 %		DLHP	
2.05 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata	0 Sekolah	5 Sekolah	600	5 Sekolah	347	0 Sekolah	2.600	5 Sekolah	280	5 Sekolah	280	5 Sekolah	4.107	DLHP	
		Jumlah Dokumen Perencanaan /Pelaporan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
2.05 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang tersedia	0 %	35,69 %	0	35,69 %	1.477	35,69 %	1.041	35,69 %	1.000	35,69 %	1.200	35,69 %	4.718	DLHP	
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Cakil</b>				3.000		3.000		2.525		2.525		2.525		13.575		
2.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.325	100 %	1.345	100 %	1.050	100 %	1.024	100 %	1.050	100 %	5.794	DISDUKCAPIL	
2.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kepuasan terhadap sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	130	100 %	130	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	485	DISDUKCAPIL	
2.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	0	100 %	100	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	100	DISDUKCAPIL	
2.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Kepuasan ASN terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0 %	70 %	345	75 %	300	80 %	120	85 %	120	90 %	120	90 %	1.005	DISDUKCAPIL	
2.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	80 %	76	85 %	76	90 %	76	90 %	228	DISDUKCAPIL	
2.06 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan administrasi kependudukan	100 %	100 %	1.200	100 %	1.125	100 %	1.204	100 %	1.230	100 %	1.204	100 %	5.963	DISDUKCAPIL	
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>				2.745		2.380		3.281		3.566		2.995		14.967		
2.07 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga Yang Aktif	0 %	3,68 %	302	3,92 %	365	3,95 %	325	3,99 %	315	4,02 %	245	100 %	1.552	DINSOSPMD	

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase partisipasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan di kecamatan	0 %	100 %	0	100 %	50	100 %	163	100 %	50	100 %	50	65 %	313	SESAYAP HILIR
		Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat aktif	0 %	60 %	233	60 %	170	60 %	416	63 %	586	65 %	604	65 %	2.009	TANA LIA
		Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	0 %	0 %	0	0 %	20	0 %	40	40 %	60	60 %	60	60 %		
		Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	0 %	60 %	380	70 %	180	80 %	410	90 %	385	100 %	385	65 %	1.740	BETAYAU
2.07 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase BUMDES yang Aktif	50 %	60 %	160	70 %	100	80 %	141	90 %	180	100 %	90	100 %	671	DINSOSPMD
2.07 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Indeks Desa Membangun (Desa Berkembang)	0 %	31,25 %	592	50 %	636	68,75 %	640	87,5 %	990	96,875 %	490	96,875 %	3.348	DINSOSPMD
		Persentase Usulan MusrenbangCam yang terakomodir di tingkat kabupaten	0 %	60 %	64	75 %	91	76 %	16	77 %	25	78 %	25	78 %	221	SESAYAP
		Jumlah Desa yang di Bina	0 Desa	8 Desa	25	8 Desa	15	8 Desa	17	8 Desa	50	8 Desa	30	8 Desa	137	SESAYAP HILIR
		Persentase usulan murenbang kecamatan yang terakomodir di Tk. Kabupaten	0 %	32 %	13	40 %	15	48 %	12	56 %	12	64 %	12	64 %	63	TANA LIA
		Persentase usulan murenbang kecamatan yang terakomodir di Tk. Kabupaten	0 %	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	200	BETAYAU
		persentase usulan desa yang diakomodir ditingkat kab	0 %	80 %	97	80 %	40	80 %	118	80 %	118	80 %	118	64 %	491	MURUK RIAN
2.07 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0 %	60 %	230	70 %	352	80 %	304	90 %	255	95 %	265	96,875 %	1.406	DINSOSPMD
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkateori baik	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	300	SESAYAP HILIR
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkateori baik	0 %	60 %	75	65 %	75	70 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	375	BETAYAU
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkateori baik	0 %	60 %	0	65 %	0	70 %	155	100 %	155	100 %	285	100 %	595	MURUK RIAN
2.07 . 19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Perentase Masyarakat Desa yang di berdakikan	0 %	80 %	158	85 %	24	0 %	0	0 %	0	0 %	0	85 %	182	SESAYAP
		Jumlah Desa Yang di Bina	0 Desa	7 Desa	140	7 Desa	140	7 Desa	200	7 Desa	81	7 Desa	81	7 Desa	642	SESAYAP HILIR
		Persentase organisasi perempuan yang aktif di Kecamatan Tana Lia	0 %	75 %	150	80 %	40	0 %	0	0 %	0	0 %	0	80 %	190	TANA LIA
		persentase pkk desa yang aktif	0 %	100 %	85	100 %	47	100 %	150	100 %	150	100 %	100	80 %	532	MURUK RIAN
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1.057		1.840		2.151		2.160		2.450		9.658	
2.08 . 15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	100 %	100 %	1.057	100 %	1.840	100 %	2.151	100 %	2.160	100 %	2.450	100 %	9.658	DINKES



KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp				
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Angka Kelahiran pada Remaja Usia (15-19 Th)	0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun		0 Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun					
2.09	<b>Perhubungan</b>				740		1.231		1.741		2.800		3.400		9.912				
2.09 . 15	<i>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</i>	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	0 %	0 %	0	80 %	588	80 %	0	80 %	500	100 %	500	100 %	1.588	DLHP			
		Persentase Perencanaan Perhubungan Yang dimanfaatkan	100 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %		100 %		100 %					
2.09 . 16	<i>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</i>	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	0 %	0 %	0	80 %	160	0 %	0	85 %	200	90 %	100	90 %	460	DLHP			
2.09 . 17	<i>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</i>	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	0 %	65 %	740	100 %	0	100 %	675	100	0	500	100	0	400	100	0	2.315	DLHP
		Persentase Kecamatan Yang terlayani Transportasi Umum Darat	0 %	0 %		0 %		40 %		60 %		80 %		80 %					
		Persentase Kecamatan Yang terlayani Transportasi Umum sungai	40 %	40 %		40 %		60 %		60 %		60 %		60 %					
		Penghargaan sopir/motoris teladan	0 Orang	0 Orang		0 Orang	0	0 Orang		3 Orang		4 Orang		4 Orang					
2.09 . 18	<i>Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan</i>	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	60 %	0 %	0	0 %	0	80 %	201	85 %	1.100	90 %	1.800	90 %	3.101	DLHP			
2.09 . 19	<i>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</i>	Jumlah Angka Kecelakaan	0 Kecelakaan	15 Kecelakaan	0	14 Kecelakaan	483	13 Kecelakaan	865	12 Kecelakaan	500	11 Kecelakaan	600	11 Kecelakaan	2.448	DLHP			
		Persentase angkutan sungai yang Laik Layar	0 %	0 %		75 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		Persentase Kendaraan Yang lulus Uji Kir	0 %	0 %		30 %		50 %		80 %		100 %		100 %					
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				5.319		2.301		2.651		2.651		2.651		15.573				
2.10 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum	0 %	100 %	1.519	100 %	700	100 %	680	100 %	680	100 %	680	100 %	4.258	DISKOMINFO			
2.10 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase Kepuasan Penggunaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0 %	100 %	45	100 %	30	100 %	136	100 %	136	100 %	136	100 %	482	DISKOMINFO			
2.10 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	0 %	100 %	92	100 %	55	100 %	27	100 %	27	100 %	27	100 %	227	DISKOMINFO			
2.10 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	0 %	100 %	0	100 %	0	100 %	2	100 %	2	100 %	2	100 %	5	DISKOMINFO			
2.10 . 15	<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	Persentase Kepuasan terhadap Penyebaran Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada Masyarakat/ASN	0 %	100 %	3.319	100 %	964	100 %	1.300	100 %	1.050	100 %	1.050	100 %	7.683	DISKOMINFO			
		Persentase Tesebarnya Informasi kepada Masyarakat	100 %	100 %	319	100 %	453	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	771	BAGIAN ORHUM			
2.10 . 17	<i>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</i>	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi bidang komunikasi dan informasi	0 %	100 %	25	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	25	DISKOMINFO			
2.10 . 22	<i>Program Informasi Publik</i>	Jumlah layanan informasi dan saluran media	0 Jenis	0 Jenis	0	0 Jenis	0	5 Jenis	40	5 Jenis	40	5 Jenis	40	5 Jenis	120	DISKOMINFO			
2.10 . 23	<i>Program Aplikasi Informatika</i>	Persentase layanan aplikasi di lingkungan pemerintah	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	112	100 %	112	100 %	112	100 %	336	DISKOMINFO			
2.10 . 24	<i>Program Infrastruktur Teknologi Informasi Jaringan TIK</i>	Persentase pemeliharaan jaringan TIK di lingkungan pemerintah	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	337	100 %	587	100 %	587	100 %	1.511	DISKOMINFO			

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
2.10 . 25	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	Persentase Data dan Informasi Persandian yang diamankan	0 %	0 %	0 %	100 %	99	100 %	19	100 %	19	100 %	19	100 %	154	DISKOMINFO
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				160		433		92		400		400		1.485	
2.11 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (Terhadap seluruh UKM)	100 %	100 %	160	100 %	169	100 %	0	100 %	100	100 %	100	20 %	529	DPPKU
2.11 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Peningkatan WUUB/NWUP	0 %	1 %	0	2 %	100	3 %	52	4 %	100	5 %	100	5 %	352	DPPKU
2.11 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Sistem Pendukung	5 %	10 %	0	12 %	100	14 %	0	16 %	100	20 %	100	20 %	300	DPPKU
2.11 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	78 %	60 %	0	70 %	64	80 %	40	90 %	100	100 %	100	100 %	304	DPPKU
2.12	<b>Penanaman Modal</b>				1.787		2.600		2.032		1.519		1.621		9.559	
2.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1.312	100 %	1.490	100 %	1.659	100 %	989	100 %	989	20 %	6.438	DPMTKPTSP
2.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	47	100 %	70	100 %	146	100 %	85	100 %	85	20 %	433	DPMTKPTSP
2.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memperoleh peningkatan kapasitas	100 %	100 %	74	100 %	40	100 %	20	100 %	20	100 %	20	20 %	174	DPMTKPTSP
2.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen pemerintahan yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	29	DPMTKPTSP
2.12 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Minat Investasi PMA dan PMDN	10 Rp (Milyar)	10 Rp (Milyar)	0	10 Rp (Milyar)	0	10 Rp (Milyar)	65	10 Rp (Milyar)	65	10 Rp (Milyar)	260	50 Rp (Milyar)	390	DPMTKPTSP
2.12 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	26,5 Rp (Milyar)	26,5 Rp (Milyar)	127	26,5 Rp (Milyar)	500	26,5 Rp (Milyar)	35	26,5 Rp (Milyar)	125	26,5 Rp (Milyar)	117	132,5 Rp (Milyar)	903	DPMTKPTSP
2.12 . 19	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Rasio Bangunan Ber IMB (persen)	6,7 %	7 %	227	10 %	500	12 %	98	13 %	225	20 %	140	20 %	1.190	DPMTKPTSP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 Nilai	80 Nilai		85 Nilai		90 Nilai		95 Nilai		100 Nilai		100 Nilai		
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				1.771		1.412		1.557		2.926		2.250		9.916	
2.13 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi sosial, politik, budaya dan keagamaan	0 Orang	0 Orang	0	315 Orang	1.369	315 Orang	1.354	315 Orang	1.200	315 Orang	1.200	315 Orang	5.123	DPPO
2.13 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Jumlah Pemuda yang terlatih dalam peningkatan keahlian kewirausahaan	0 %	0 %	0	0 %	0	2 %	0	2 %	326	2 %	250	6 %	576	DPPO
2.13 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Persentase Peningkatan Partisipasi Aktif dalam event-event Olahraga	0 %	10 %	871	10 %	43	10 %	0	10 %	500	10 %	300	50 %	1.714	DPPO
2.13 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Layak Pakai	0 %	10 %	900	100 %	0	100 %	203	100 %	900	100 %	500	100 %	2.503	DPPO
2.14	<b>Statistik</b>				226		517		474		464		464		2.146	
2.14 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase data statistik yang terkumpul	0 %	100 %	0	100 %	152	100 %	49	100 %	49	100 %	49	100 %	299	DISKOMINFO
		Persentase penyusunan buku Indeks Harga Konsumen (IHK)	100 %	100 %	226	100 %	365	100 %	425	100 %	415	100 %	415	100 %	1.848	BAGIAN EKOBANG
2.16	<b>Kebudayaan</b>				4.720		4.730		10.730		6.240		11.345		37.765	
2.16 . 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Organisasi/Lembaga/Pa guyuban/Adat, Seni dan Budaya yang dibina dengan intensif	6 Buah	6 Buah	1.000	6 Buah	2.060	7 Buah	2.800	7 Buah	3.820	8 Buah	3.000	34 Buah	12.680	DISDIK



KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
3.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	80 %	82 %	233	84 %	63	86 %	229	88 %	170	90 %	150	90 %	845	DPPP
3.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Terdidik/Terlatih	20 Orang	4 Orang	40	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	4 Orang	0	20 Orang	40	DPPP
3.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase tersusunnya dokumen penyelenggaraan pemerintah tepat waktu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	11	100 %	11	100 %	11	100 %	32	DPPP
3.05 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	0 Nilai	98 Nilai	353	98,4 Nilai	0	98,8 Nilai	0	99,1 Nilai	0	99,5 Nilai	0	99,5 Nilai	353	DPPP
3.05 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Konsumsi Kalori	1.847 Kkal	1.878 Kkal	271	1.909 Kkal	188	1.940 Kkal	105	1.971 Kkal	100	2.000 Kkal	100	1.847 Kkal	764	DPPP
		Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	0 Nilai	74 Nilai		76 Nilai		78 Nilai		82 Nilai		87 Nilai		87 Nilai		
3.05 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Jenis Produk hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Yang Dinromosikan	20 Jenis	20 Jenis	396	20 Jenis	215	25 Jenis	300	30 Jenis	250	35 Jenis	250	35 Jenis	1.411	DPPP
3.05 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah Sawah Yang Tercetak pada skala kabupaten	350 Ha	25 Ha	2.280	13 Ha	2.315	15 Ha	730	50 Ha	750	50 Ha	750	153 Ha	6.825	DPPP
3.05 . 19	Program peningkatan produksi	Jumlah Produksi Padi	1.989 Ton	2.000 Ton	661	1.747 Ton	719	1.887 Ton	500	2.027 Ton	500	2.167 Ton	558	2.167 Ton	2.938	DPPP
		Jumlah Produksi Jagung	50 Ton	55 Ton		60 Ton		65 Ton		70 Ton		75 Ton		75 Ton		
		Jumlah Produksi Kelapa Sawit	279 Ton	2.000 Ton		400 Ton		500 Ton		600 Ton		700 Ton		700 Ton		
		Jumlah Produksi Kelapa	2 Ton	300 Ton		4 Ton		5 Ton		6 Ton		7 Ton		7 Ton		
		Jumlah Produksi Lada	0,82 Ton	0,90 Ton		1,00 Ton		1,20 Ton		1,40 Ton		1,50 Ton		1,50 Ton		
3.05 . 20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Jumlah PPL Pertanian Lapangan skala kabupaten	23 Orang	23 Orang	838	12 Orang	768	15 Orang	800	23 Orang	805	23 Orang	805	23 Orang	4.016	DPPP
3.05 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak	150 Ekor	200 Ekor	358	220 Ekor	264	230 Ekor	220	250 Ekor	220	275 Ekor	220	1.175 Ekor	1.282	DPPP
3.05 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan Populasi Ternak	1.052 Ekor	1.100 Ekor	306	1.150 Ekor	414	1.200 Ekor	324	1.250 Ekor	323	1.300 Ekor	330	1.300 Ekor	1.697	DPPP
		Jumlah Produksi Daging	100 Ton	100 Ton		230 Ton		235 Ton		240 Ton		250 Ton		250 Ton		
		Jumlah Inseminasi Buatan	85 IB	150 IB		175 IB		200 IB		225 IB		250 IB		250 IB		
3.05 . 23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Jenis Produk Hasil Produksi Peternakan Yang Dinromosikan	0 Jenis	0 Jenis	0	4 Jenis	92	4 Jenis	100	4 Jenis	100	4 Jenis	100	16 Jenis	392	DPPP
3.06	<b>Perdagangan</b>				2.042		4.838		6.372		5.325		5.325		23.902	
3.06 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	0 %	0 %	0	0 %	1.534	20 %	1.455	30 %	450	40 %	450	40 %	3.889	DPPKU
3.06 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik	40 %	40 %	1.576	40 %	2.301	60 %	3.717	70 %	3.850	80 %	3.850	80 %	15.294	DPPKU
3.06 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan Asongan yang Tertib Usaha	0 %	0 %	466	0 %	1.003	30 %	1.200	40 %	1.025	50 %	1.025	100 %	4.719	DPPKU
3.07	<b>Perindustrian</b>				2.276		2.729		1.014		1.753		1.753		9.525	
3.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Thdp Pelayanan Kantor	100 %	100 %	1.312	100 %	1.565	100 %	710	100 %	868	100 %	868	100 %	5.323	DPPKU
3.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100 %	100 %	316	100 %	276	100 %	62	100 %	225	100 %	225	100 %	1.104	DPPKU
3.07 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur	100 %	100 %	0	100 %	29	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	29	DPPKU
3.07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memperoleh peningkatan kapasitas	7 %	20 %	30	20 %	120	20 %	34	20 %	100	20 %	100	100 %	384	DPPKU

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
3.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	8	100 %	10	100 %	10	100 %	28	DPPKU
3.07 . 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Berbasis Teknologi	0 %	0 %	0	0 %	0	2 %	0	4 %	100	6 %	100	6 %	200	DPPKU
3.07 . 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang mendapatkan fasilitasi peningkatan daya saing	0 %	20 %	618	30 %	739	40 %	200	50 %	450	60 %	450	60 %	2.457	DPPKU
3.08	<b>Transmigrasi</b>				90		100		153		139		164		646	
3.08 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah rata-rata pendapatan Transmigran	0 Rp/KK	1,6 Rp(Juta) /KK	90	1,8 Rp(Juta) /KK	100	2 Rp(Juta) /KK	153	2,2 Rp(Juta) /KK	139	2,3 Rp(Juta) /KK	164	2,3 Rp(Juta) /KK	646	DPMTKPTSP
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>				76.161		63.408		71.065		73.861		74.865		359.359	
4.01	<b>Administrasi Pemerintahan</b>				42.083		33.717		39.588		38.574		38.568		192.529	
4.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	1.998	100 %	1.785	100 %	1.087	100 %	1.516	100 %	1.642	100 %	8.028	BAGIAN UMUM
		Perpsentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	100 %	100 %	950	100 %	940	100 %	800	100 %	784	100 %	780	100 %	4.254	BAGIAN TAPEM
		Indeks kepuasan masyarakat dan Aparatur terhadap kinerja penyelenggaraan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	1.534	100 %	1.569	100 %	1.413	100 %	1.482	100 %	1.613	100 %	7.611	BAGIAN KESRA
		Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	841	100 %	535	100 %	682	100 %	641	100 %	641	100 %	3.340	BAGIAN HUKUM
		Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Bagian Organisasi dan Humas	100 %	100 %	1.687	100 %	1.685	100 %	1.075	100 %	850	100 %	850	100 %	6.147	BAGIAN ORHUM
		Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	986	100 %	830	100 %	680	100 %	650	100 %	660	100 %	3.805	BAGIAN EKOBANG
		Persentase Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	5.136	100 %	4.530	100 %	3.013	100 %	2.013	100 %	2.013	100 %	16.704	SEKWAN
		Indeks Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Adm Perkantoran dan kenyamanan kantor	0 %	20 %	1.077	40 %	1.157	60 %	1.590	80 %	900	100 %	900	100 %	5.624	SESAYAP
		Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	1.166	100 %	1.044	100 %	997	100 %	1.341	100 %	1.351	100 %	5.899	SESAYAP HILIR
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perkantoran	0 %	80,75 %	810	80,76 %	880	80,77 %	1.275	80,78 %	928	80,79 %	1.198	80,79 %	5.091	TANA LIA
		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	543	100 %	543	100 %	543	100 %	543	100 %	538	100 %	2.710	BETAYAU
		Indeks Kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan dan perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	930	100 %	818	100 %	870	100 %	929	100 %	929	100 %	4.475	MURUK RIAN

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	798	100 %	571	100 %	989	100 %	938	100 %	950	100 %	4.246	KESBANGPOL
4.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	8.065	100 %	4.625	100 %	4.525	100 %	3.856	100 %	3.316	100 %	24.387	BAGIAN UMUM
		Persentase peningkatan pelayanan publik Bagian Tata Pemerintahan	100 %	100 %	45	100 %	56	100 %	24	100 %	45	100 %	45	100 %	215	BAGIAN TAPEM
		Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	134	100 %	51	100 %	110	100 %	38	100 %	178	100 %	510	BAGIAN KESRA
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	100 %	100 %	12	100 %	15	100 %	70	100 %	100	100 %	125	100 %	322	BAGIAN ORHUM
		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	430	100 %	376	100 %	62	100 %	212	100 %	62	100 %	1.142	BAGIAN EKOBANG
		Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	582	100 %	344	100 %	684	100 %	683	100 %	683	100 %	2.975	SEKWAN
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak Fungsi	100 %	10 %	165	15 %	50	20 %	123	25 %	325	30 %	325	30 %	988	SESAYAP
		Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	397	100 %	226	100 %	279	100 %	215	100 %	195	100 %	1.312	SESAYAP HILIR
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	0 %	80 %	337	83 %	75	85 %	560	87 %	777	90 %	526	90 %	2.274	TANA LIA
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	167	100 %	135	100 %	227	100 %	252	100 %	257	100 %	1.038	BETAYAU
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	182	100 %	55	100 %	275	100 %	275	100 %	205	100 %	992	MURUK RIAN
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	0 %	100 %	150	100 %	29	100 %	294	100 %	353	100 %	423	100 %	1.249	KESBANGPOL
4.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	945	100 %	925	100 %	357	100 %	645	100 %	890	100 %	3.762	BAGIAN UMUM
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	580	100 %	584	100 %	700	100 %	420	100 %	460	100 %	2.744	BAGIAN TAPEM
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	200	100 %	6	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	206	SEKWAN
		Indek Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	14	0 %	0	100 %	61	0 %	0	100 %	50	100 %	125	SESAYAP HILIR
		Persentase tingkat kepatuhan ASN terhadap ketepatan penerapan Seragam	0 %	0 %	0	83 %	23	0 %	0	0 %	0	0 %	0	83 %	23	TANA LIA
4.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	335	100 %	375	100 %	325	100 %	550	100 %	350	100 %	1.935	BAGIAN UMUM
		Persentase tingkat kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan	100 %	100 %	70	100 %	50	100 %	15	100 %	50	30 %	40	100 %	225	BAGIAN TAPEM
		Presentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100 %	100 %	32	100 %	30	100 %	450	100 %	452	30 %	180	100 %	1.144	BAGIAN KESRA
		Presentase ASN yang tepat fungsi sesuai dengan kompetensi	100 %	100 %	40	100 %	15	100 %	40	100 %	48	30 %	48	100 %	191	BAGIAN HUKUM

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	100 %	100 %	46	0 %	28	0 %	20	0 %	0	0 %	0	100 %	94	BAGIAN ORHUM
		Persentase aparatur memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa	0 %	60 %	102	60 %	80	60 %	150	60 %	30	0 %	170	100 %	532	BAGIAN EKOBANG
		Persentase Kelembagaan yang tepat Fungsi	0 %	40 %	8	0 %	0	50 %	30	70 %	100	100 %	100	100 %	238	SESAYAP
		Indek Kepuasan Masyarakat	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	100	100 %	100	100 %	80	100 %	280	SESAYAP HILIR
		Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 %	20 %	100	40 %	100	60 %	170	70 %	130	75 %	85	75 %	585	TANA LIA
		Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	0 %	100 %	50	100 %	50	100 %	50	100 %	50	30 %	50	100 %	250	BETAYAU
		Persentase aparatur yang disiplin di kantor Muruk Rian	0 %	100 %	50	100 %	40	100 %	110	100 %	50	100 %	50	100 %	300	MURUK RIAN
		Persentase ASN yang tepat fungsi sesuai dengan kompetensi	0 %	100 %	88	100 %	68	100 %	87	100 %	64	30 %	27	100 %	334	KESBANGPOL
4.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	101	100 %	209	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	310	BAGIAN ORHUM
		Persentase OPD dengan serapan anggaran diatas 85%	100 %	100 %	323	100 %	606	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	929	BAGIAN EKOBANG
		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	8	0 %	8	0 %	8	100 %	23	SEKWAN
		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun Tepat Waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	3	100 %	50	100 %	50	100 %	103	SESAYAP
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	85 %	7	87 %	8	90 %	8	90 %	22	TANA LIA
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	0 %	100 %	50	100 %	50	100 %	60	100 %	60	100 %	60	100 %	280	BETAYAU
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	15	100 %	15	100 %	15	100 %	45	MURUK RIAN
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	30	100 %	35	100 %	40	100 %	105	KESBANGPOL
4.01 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Kapasitas DPRD sesuai dengan fungsinya	100 %	100 %	3.182	100 %	3.120	100 %	2.365	0 %	2.368	0 %	2.368	100 %	13.402	SEKWAN
4.01 . 16	Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	3.657	100 %	2.290	100 %	3.016	100 %	2.843	100 %	3.280	100 %	15.086	BAGIAN UMUM
4.01 . 17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tingkat penataan Peraturan Perundang-Undangan	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	150	100 %	150	100 %	300	BAGIAN TAPEM
		Persentas produk hukum daerah yang telah disahkan dan yang telah didokumentasikan serta persentase pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	780	100 %	496	100 %	434	100 %	668	100 %	668	100 %	3.046	BAGIAN HUKUM
		Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan tugas dan fungsinya	0 %	100 %	34	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	34	BAGIAN ORHUM

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
4.01 . 18	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100 %	100 %	921	100 %	233	100 %	660	100 %	481	100 %	481	100 %	2.776	BAGIAN HUKUM
4.01 . 19	Program Pendukung Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100 %	100 %	433	100 %	566	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	999	BAGIAN EKOBANG
4.01 . 20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyelesaian Tapal Batas	0 %	0 %	259	100 %	279	100 %	239	100 %	259	100 %	209	100 %	1.245	BAGIAN TAPEM
		Persentase kegiatan penataan Desa yang diselesaikan	0 %	80 %	16	81 %	8	0 %	0	0 %	0	0 %	0	81 %	24	TANA LIA
		persentase Jumlah penataan daerah otonomi baru	0 %	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	75	100 %	375	BETAYAU
4.01 . 21	Program Penataan Kecamatan dan Desa	Persentase Pemerintahan Kecamatan dan Desa yang tepat fungsi dan tepat ukurannya	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	262	100 %	230	100 %	205	100 %	697	BAGIAN TAPEM
		Persentase Desa yang penyelenggaraan Pemerintahan berkateoori baik	0 %	0 %	0	0 %	0	28,57 %	224	57,14 %	500	100 %	500	100 %	1.224	SESAYAP
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPMD/K dan TP PKK) yang aktif	0 %	100 %	170	100 %	170	100 %	170	100 %	170	100 %	170	100 %	850	BETAYAU
4.01 . 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase OPD yang menginput laporan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung	0 %	0 %	0	100 %	42	100 %	51	100 %	51	100 %	51	100 %	195	BAGIAN EKOBANG
		persentase pemanfaatan teknologi informasi	0 %	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	1.000	BETAYAU
4.01 . 24	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persentase menurunnya tingkat kriminalitas dilingkungan masyarakat	0 %	100 %	100	100 %	75	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	775	BETAYAU
4.01 . 25	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui SPSE tepat waktu	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	671	100 %	591	100 %	591	100 %	1.853	BAGIAN EKOBANG
4.01 . 26	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Persentase OPD dengan serapan anggaran diatas 85%	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	886	100 %	966	100 %	966	100 %	2.818	BAGIAN EKOBANG
4.01 . 27	Program Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Akuntabilitas Disusun Tepat Waktu	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	545	100 %	485	100 %	410	100 %	1.440	BAGIAN ORHUM
4.01 . 30	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Tersebaranya Informasi kepada Masyarakat	100 %	0 %	0	0 %	0	100 %	490	100 %	390	100 %	490	100 %	1.370	BAGIAN ORHUM
4.01 . 31	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase kepuasan DPRD terhadap fasilitasi persidangan	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	4.030	100 %	4.030	100 %	4.030	100 %	12.089	SEKWAN
4.01 . 32	Program Profesionalisme bagi Aparat Hukum	Persentase Perangkat Daerah yang mendukung dan Peduli Hukum	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	38	100 %	35	100 %	35	100 %	108	BAGIAN HUKUM
4.01 . 33	Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi	0 %	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	375	100 %	325	100 %	700	BAGIAN ORHUM
4.02	<b>Pengawasan</b>				7.918		7.221		9.647		10.627		10.627		46.040	
4.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparaturnya terhadap pelayanan adm. Perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	2.800	100 %	1.886	100 %	3.466	100 %	1.897	100 %	1.897	100 %	11.946	INSPEKTORAT



KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
4.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	180	100 %	335	100 %	883	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	3.398	INSPEKTORAT
4.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumber daya aparatur yang tepat fungsi	100 %	100 %	200	100 %	180	100 %	250	100 %	350	0 %	0	100 %	980	INSPEKTORAT
4.02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan dokumen yang tepat waktu	75 %	100 %	60	100 %	50	100 %	30	100 %	20	100 %	20	100 %	180	INSPEKTORAT
4.02 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi yang dijadikan kebijakan dibidang hukum yang sesuai dengan kebijakan KDH	100 %	100 %	918	100 %	1.221	100 %	647	100 %	627	100 %	627	100 %	4.040	BAGIAN HUKUM
		Persentase pengelolaan keuangan sesuai SAP	100 %	100 %	2.900	100 %	2.822	100 %	3.390	100 %	5.115	100 %	5.367	100 %	19.594	INSPEKTORAT
4.02 . 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah AP/IP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 org	10 org	360	15 org	298	10 org	368	10 org	688	10 org	788	55 %	2.502	INSPEKTORAT
4.02 . 22	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentas Informasi tindak lanjut hasil temuan berbasis TI	0 %	0 %	100	0 %	100	0 %	213	100 %	250	100 %	250	100 %	913	INSPEKTORAT
4.02 . 23	Program Peningkatan Sistem Internal Pengendalian Pemerintah	Jumlah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah	1 regulasi	50 regulasi	300	50 regulasi	229	50 regulasi	300	100 regulasi	250	100 regulasi	250	350 regulasi	1.329	INSPEKTORAT
4.02 . 24	Program Pencegahan Korupsi	Penilaian WBK dan WBBM di lingkungan Pemerintahan Kabupaten	0 SKPD	0 SKPD	100	0 SKPD	100	0 SKPD	100	20 SKPD	430	25 SKPD	428	25 SKPD	1.158	INSPEKTORAT
4.03	<b>Perencanaan</b>				9.660		8.200		7.830		7.460		7.370		40.520	
4.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kenyamanan Kantor	100 %	100 %	1.900	100 %	1.800	100 %	1.050	100 %	1.000	100 %	1.000	100 %	6.750	BAPPLITBANG
4.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	100 %	100 %	400	100 %	400	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	1.400	BAPPLITBANG
4.03 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kedisiplinan ASN terhadap Aturan	100 %	100 %	0	100 %	100	100 %	0	100 %	100	100 %	0	100 %	200	BAPPLITBANG
4.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Tepat Fungsi	100 %	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	500	BAPPLITBANG
4.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	500	BAPPLITBANG
4.03 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase keterisian data dan informasi pembangunan daerah	30 %	60 %	900	70 %	850	80 %	600	90 %	600	100 %	600	100 %	3.550	BAPPLITBANG
4.03 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama yang terfasilitasi	0 %	100 %	100	100 %	80	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	480	BAPPLITBANG
4.03 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Wilayah perbatasan dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah	0 %	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	50	BAPPLITBANG
4.03 . 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan menjadi kota menengah dan besar yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah	100 %	100 %	800	100 %	700	100 %	250	100 %	250	100 %	350	100 %	2.350	BAPPLITBANG
4.03 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	0 %	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	500	BAPPLITBANG

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp	
4.03 . 21	<i>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	Persentase usulan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %	1.900	100 %	1.200	100 %	1.200	100 %	1.100	100 %	1.200	100 %	6.600	BAPPLITBANG
		Persentase Dokumen LPPD disusun tepat Waktu	100 %	100 %	240	100 %	240	100 %	400	100 %	220	100 %	220	100 %	1.320	BAGIAN TAPEM
		Persentase Laporan Renstra yang Disusun Tepat Waktu	0 %	100 %	820	0 %	730	0 %	930	0 %	900	0 %	850	100 %	4.230	BAGIAN ORHUM
4.03 . 22	<i>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</i>	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah	100 %	100 %	580	100 %	530	100 %	1.030	100 %	960	100 %	850	100 %	3.950	BAPPLITBANG
4.03 . 23	<i>Program Perencanaan Sosial dan Budaya</i>	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah	100 %	100 %	820	100 %	730	100 %	930	100 %	900	100 %	850	100 %	4.230	BAPPLITBANG
4.03 . 24	<i>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</i>	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pemerintah	100 %	100 %	890	100 %	530	100 %	830	100 %	820	100 %	840	100 %	3.910	BAPPLITBANG
4.04	<b>Keuangan</b>				10.500		8.270		8.300		8.300		8.300		43.670	
4.04 . 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Indeks Kepuasan masyarakat	90 %	95 %	3.680	95 %	2.500	95 %	2.700	95 %	3.063	95 %	3.053	95 %	14.997	BPKAD
4.04 . 02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	Persentase kepuasan pengguna sarana dan prasarana	90 %	95 %	800	95 %	290	95 %	300	95 %	300	95 %	300	95 %	1.990	BPKAD
4.04 . 05	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	Persentase Aparatur Yang tepat Fungsi	70 %	85 %	450	85 %	500	85 %	40	85 %	50	85 %	50	85 %	1.090	BPKAD
4.04 . 06	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintah yang disusun tepat waktu	0 %	0 %	10	0 %	10	90 %	10	92 %	10	94 %	10	100 %	50	BPKAD
4.04 . 17	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	Persentase laporan keuangan OPD sesuai dengan SAP	100 %	0 %	2.100	0 %	1.500	90 %	1.800	92 %	1.395	94 %	1.395	100 %	8.190	BPKAD
		Persentase atas hasil monitoring dana kas daerah atas pendapatan, pembiayaan, dan Realisasi Belanja	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Presentase Ketepatan waktu penetapan Perda & Perbup APBD	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase Program dan Kegiatan pada RKA SKPD sesuai dengan RENJA PD	100 %	100 %	500	100 %	270	90 %	300	92 %	300	94 %	300	100 %	1.670	BAPPLITBANG
4.04 . 33	<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	Persentase Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel	100 %	100 %	160	100 %	200	100 %	200	100 %	150	100 %	150	100 %	860	BPKAD
4.04 . 35	<i>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</i>	Persentase data Aset Daerah Yang Akurat sesuai dengan Pemanfaatan dan Perunikannya	75 %	82 %	1.000	84 %	1.100	86 %	1.150	88 %	1.145	90 %	1.145	90 %	5.540	BPKAD
4.04 . 36	<i>Program Pengelolaan Pendataan Pajak dan Retribusi</i>	Persentase Peningkatan OP dan OR	10 %	10 %	800	10 %	900	10 %	900	10 %	1.147	10 %	1.157	10 %	4.903	BPKAD
4.04 . 37	<i>Program Peningkatan dan Pengelolaan PAD</i>	Persentase peningkatan Penerimaan PAD	(39) %	10 %	1.000	10 %	1.000	10 %	900	10 %	740	10 %	740	10 %	4.380	BPKAD
4.05	<b>Kepegawaian</b>				6.000		6.000		5.000		8.000		9.000		34.000	

KODE	NAMA URUSAN, BIDANG, UNIT ORGANISASI, SUB UNIT ORGANISASI, PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2016	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)	TARGET	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100 %	100 %	1.800	100 %	1.800	100 %	1.000	100 %	1.800	100 %	1.800	100 %	8.200	BKPSDM
4.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	67	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	150	100 %	517	BKPSDM
4.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Tepat Fungsi	100 %	100 %	2.600	100 %	2.500	100 %	200	100 %	242	100 %	150	100 %	5.692	BKPSDM
4.05 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan	0 %	0 %	20	0 %	20	100 %	84	100 %	96	100 %	100	100 %	320	BKPSDM
4.05 . 14	Program Pendidikan Kedisiplinan	Persentase ASN tugas belajar	100 %	100 %	160	100 %	290	100 %	290	100 %	290	100 %	290	100 %	1.320	BKPSDM
4.05 . 15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif, transparan dan akuntabel	100 %	100 %	1.300	100 %	1.200	100 %	326	100 %	750	100 %	2.000	100 %	5.576	BKPSDM
4.05 . 16	Program Penataan dan Pelayanan ASN	Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	0 %	0 %	30	0 %	45	100 %	1.000	100 %	1.500	100 %	1.810	100 %	4.385	BKPSDM
4.05 . 17	Program Pengembangan ASN	Persentase pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk uji kompetensi	0 %	0 %	23	0 %	45	100 %	2.000	100 %	3.222	100 %	2.700	100 %	7.990	BKPSDM
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				0		0		700		900		1.000			
4.07 . 15	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Kegiatan Mendukung Sistem Inovasi Daerah	0 %	0 %	0	0 %	0	60 %	700	70 %	900	80 %	1.000	80 %	2.600	BAPPLITBANG
		Persentase hasil penelitian ekonomi, sosial dan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh stakeholders	0 %	0 %		0 %		30 %		50 %		60 %		70 %		
<b>TOTAL</b>					555.268		551.144		547.020		542.912		538.803		2.735.146	



## **BAB 8**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada akhir periode masa jabatan, dapat diukur melalui indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga tercermin pencapaian kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD.

Indikator kinerja daerah merupakan panduan bagi kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program-programnya. Oleh karenanya, secara implisit indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan target Bupati dan Wakil Bupati yang harus dikejar dan didukung Perangkat Daerah. Indikator kinerja RPJMD ini, pada dasarnya merupakan ekspektasi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Perangkat Daerah. Oleh karenanya indikator kinerja ini harus telah memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada.

Dengan mendasarkan pada rumusan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabuapten Tana Tidung dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur, yang kemudian ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah dipilih dan ditetapkan indikator kinerja utama pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subyek dan penerima

terbesar manfaatnya dari pembangunan yang ada di Kabupaten Tana Tidung sebagaimana yang disajikan dalam tabel 8.1

Sedangkan untuk penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Adapun Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung tersebut secara rinci disajikan pada tabel 8.2 dan tabel 8.3

**Tabel 8.1**  
**Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2015	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Target	Realisasi	Target Capaian Tiap Tahun			
					2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	64,92	65,64	67,37	66,26	68,12	68,88	69,64	70,40
2	Indeks Gini	Skala	0,23	0,26	0,27	0,26	0,24	0,21	0,18	0,15
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,35	6,11	5,87	6,63	5,63	5,39	5,15	4,91
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	0,88	0,98	3,68	3,86	3,92	3,95	3,99	4,02
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,58	2,64	2,41	5,32	2,26	2,17	2,11	2,07

**Tabel 8.2**  
**Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2015	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Target	Realisasi	Target Capaian Tiap Tahun			
					2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>MISI I</b>										
1	Rata-rata Lama Sekolah	Usia	7,85	8,11	8,24	8,23	8,37	8,5	8,63	8,77
2	Harapan Lama Sekolah	Usia	12,16	12,17	12,4	12,18	12,63	12,87	13,11	13,35
3	Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Rata-rata Ujian Nasional	%	0	61,86	46,8	46,8	49,14	51,6	54,18	56,89
5	Angka Harapan Hidup	Usia	70,81	71,31	71,52	71,33	71,73	71,95	72,16	72,37
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	2,58	2,57	2,56	5,32	2,5	2,46	2,34	2,2
<b>MISI II</b>										
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	tad	tad	71,5	71,5	72,25	73	74	75
8	Persentase Penyelesaian Tapal Batas Wilayah	%	tad	tad	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kesesuaian RTRW	%	tad	tad	100	100	100	100	100	100
<b>MISI III</b>										
10	Tingka Pertumbuhan Ekonomi	%	0,88	0,85	3,68	3,86	3,92	3,95	3,99	4,02
11	Tingka Kemiskinan	%	6,35	6,11	5,87	5,63	5,63	5,39	5,15	4,91
12	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rupiah	tad	tad	27 Milyar	27 Milyar	28 Milyar	29 Milyar	30 Milyar	31 Milyar
13	Indeks Desa Membangun (IDM) (Berkembang)	Indeks	tad	12,5	31,25	65,625	50	68,75	87,5	96,875
<b>MISI IV</b>										
14	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	tad	tad	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
15	Rata-rata Lama Tinggal	Hari	1,41	1,30	1,45	1,45	1,5	1,75	1,9	2
16	Spending of Money	Rp	tad	tad	1 Milyar	1 Milyar	2 Milyar	3 Milyar	4 Milyar	5 Milyar
17	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang lestari	%	0	0	20	20	40	60	80	100

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Baseline 2015	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2016	Target	Realisasi	Target Capaian Tiap Tahun			
					2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>MISI V</b>										
18	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	%	0	0	80	89,23	82,5	85	87,5	90
19	Persentase Kecamatan yang terhubung dengan alat transportasi umum	%	0	0	20	20	40	60	80	100
20	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	%	25	65,625	75	75	81,25	87,5	93,75	100
21	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	0	0	20	87,18	25	50	75	100
22	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	0	0		100	100	100	100	100
<b>MISI VI</b>										
23	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	tad	tad	1	1,25	1,675	2	2,2	2,5
<b>MISI VII</b>										
24	PDRB Sektor Industri	%	2,26	2,4	2,46	2,46	2,52	2,58	2,64	2,71
<b>MISI VIII</b>										
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Tad	tad	75,7	75,7	77	78,16	79,68	80,08
26	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	C	C	C	CC	B	B	B
27	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
<b>MISI IX</b>										
28	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	tad	tad	98	98	98,4	98,8	99,1	99,5
29	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTPN)	Nilai	tad	tad	115/ 98,2	115/ 98,2	122/ 112	123/ 113	124/ 114	125/ 115
30	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	tad	tad	93,5	71,5	76	78	82	87

**Tabel 8.3**  
**Proyeksi Capaian Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**  
**Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	0,85	3,68	3,68	3,92	3,95	3,99	4,02	4,02
1.2	Laju inflasi	%	4,23	3-4	0,28	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
1.3	PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rp	179,69	180,02	180,02	182,56	184,50	186	188,69	188,69
1.4	Indeks Gini	Indeks	0,26	0,27	0,26	0,24	0,21	0,18	0,15	0,15
1.5	Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (<40%)	%	24,40	23,86	23,82	23,73	23,70	23,69	23,50	2,50
1.6	Indeks Pembangunan Manusia	%	65,64	67,37	67,37	68,12	68,88	69,64	70,40	70,40
1.7	Angka Melek Huruf	%	94,74	94,74	93,8	96,99	98,15	99,29	100	100
1.7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,24	8,23	8,37	8,50	8,63	8,77	8,77
1.8	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,52	71,33	71,73	71,95	72,16	72,16	72,16
1.9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,67	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Prevalansi Balita Gizi Kurang	%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,64	2,41	5,32	2,26	2,17	2,11	2,07	2,07
1.12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	tad	75,7	75,11	77	78,16	79,68	80,08	80,08
1.13	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	2,82	10	4,12	10	10	10	10	10
1.14	Opini BPK	%	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.15	Skor Pola Pangan Harapan	%	tad	93,5	71,17	76	78	82	87	87
1.16	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	36,34	38,70	33,10	39,96	41,21	42,46	43,71	43,71
1.17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,76	4,97	4,88	5,18	5,39	5,59	5,80	5,80
1.18	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	2,40	2,46	2,28	2,52	2,58	2,63	2,69	2,69
1.19	Pertumbuhan Industri	%	12	23	23	28	38	48	58	58
<b>2. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
2.1	Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga per kapita	Rp	633.564	714.166	810.807	794.768	875.370	955.972	1.036.575	1.036.575
2.2	Pengeluaran Kosumsi Non Pangan Per Kapita	Rp	644.578	676.217	617.353	707.856	739.495	771.133	802.772	802.772
2.3	Nilai Tukar Petani	Poin	Tad	98	97,5	98,4	98,8	99,1	99,5	99,5
2.4	Persentase Desa Berstatus Swasebada terhadap total desa	%							100	100
2.7	Angka Kriminalitas yang tertangani	Per 10.000 Penduduk	7,23	0,42	0,42	0,40	0,36	0,33	0,31	0,31
2.8	Rasio Ketergantungan	%	66,56	66,57	60,66	66,58	66,58	66,59	66,59	66,59



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar</b>										
3.1.1	<i>Pendidikan</i>									
3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60	65	65	70	80	90	100	100
3.1.1.2	Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.3	Angka Partisipasi Kasar									
	SD	%	90,2	94,55	94,55	96	98	100	100	100
	SMP	%	84,5	86,10	86,1	95	98	100	100	100
3.1.1.4	Angka Partisipasi Murni									
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	80,20	81,4	81,4	86,3	91,2	96,1	98	98
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	57,52	62,2	62,2	68,8	75,4	82	85	85
3.1.1.5	Angka Partisipasi Sekolah									
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Per 1.000 Penduduk	90,18	94,55	94,55	95,50	96,45	97,41	98,39	98,39
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Per 1.000 Penduduk	84,55	86,10	86,10	87,82	89,58	91,37	93,20	93,20
3.1.1.6	Angka Putus Sekolah									
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.7	Angka Kelulusan									
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.8	Angka Melanjutkan (AM)									
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	105,2	105,4	105,4	105,6	105,8	106	107	107
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MT ke SMA/SMK/MA	%	100,69	107,5	107,5	107,8	108,1	108,4	108,5	108,5
3.1.1.9	Fasilitas Pendidikan									
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	72,5	75	75	77,5	100	100	100	100
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	86	90	90	95	100	100	100	100
3.1.1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah									
	SD/MI	Per 10.000 Penduduk 7 sd 12 tahun	67,90	75,00	75,00	82,10	89,30	100	100	100
	SMP/MTs	Per 10.000 Penduduk 7 sd 12 tahun	87,50	87,50	87,50	87,50	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1.11	Rasio guru/murid									
	SD/MI	Per 10.000 Penduduk	125	125	125	125	125	125	125	125
	SMP/MTs	Per 10.000 Penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.1.12	Rasio guru/murid pendidikan dasar	Per 10.000 Penduduk	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1	111,1
3.1.1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Per 1.000 Penduduk	125	125	125	125	125	125	125	125
3.1.1.14	Proporsi Murid Kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	65	68	68	70	72	74	76	76
3.1.1.15	Persentase Sekolah memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP									
	SD/MI	%	82,1	85,7	85,7	89,3	92,9	100	100	100
	SMP/MTs	%	75,0	87,5	87,5	100	100	100	100	100
3.1.1.16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	%	67,7	74	74	77	81	84,5	89	89
3.1.2	<i>Kesehatan</i>									
3.1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Per 1.000 kelahiran	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.3	Angka Kematian Balita	per 1.000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.4	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.5	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	73,33	100	70	100	100	100	100	100
3.1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	103,48	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.8	Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI)	%	82,75	100	71,88	100	100	100	100	100
3.1.2.9	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA	%	35,71	100	95	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	%	109,09	100	83,33	100	100	100	100	100
3.1.2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	86,31	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	108,78	100	88,3	100	100	100	100	100
3.1.2.14	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.15	Cakupan desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1.2.16	Cakupan Desa Siaga Aktif	%								
3.1.3	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>									
3.1.3.1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	96,95	80	89,23	85	90	95	100	100
3.1.3.2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	83,90	100	83,90	100	100	100	100	100
3.1.3.3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	4,97	5	4,97	15	25	35	50	50
3.1.3.4	Persentase areal kawasan kumuh yang tertangani	%	0,01	10	0,01	10	10	10	10	50
3.1.3.5	Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	2,56	3	3,72	5	10	15	20	20
3.1.4	<i>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</i>									
3.1.4.1	Persentase rumah layak huni	%	93,29	88	88	90	93	96	100	100
3.1.4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.1.4.3	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	86	80	83	85	80	95	100	100
3.1.5	<i>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>									
3.1.5.1	Persentase angka kriminalitas	%	7,23	7	7	6,8	6,5	5,8	4,9	4,9
3.1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.1.5.3	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	0	80	80	85	90	95	100	100
3.1.5.4	Persentase Penegakan PERDA	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.1.6	<i>Sosial</i>									
3.1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.1.6.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.1.6.1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan sosial	%	0	100	24,36	100	100	100	100	100
<b>3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>										
3.2.1	<i>Tenaga Kerja</i>									
3.2.1.1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	14	14,6	14,6	15	16	17	18	18

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1.2	Rasion Lulusan S1/S2/S3	Poin								
3.2.2	<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>									
3.2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	53,27 (2015)	48,01	48,03	48,11	48,45	48,75	49,05	49,05
3.2.2.2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	77,71 (2015)	77,37	77,37	77,52	77,67	77,82	77,97	77,97
3.2.3	<i>Pangan</i>									
3.2.3.1	Ketersediaan pangan utama	Kg/Org	69,33	69		70,61	75,43	80,14	84,75	84,75
3.2.3.2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Kkal/kp/hr Gr/kp/hr	tad/tad	2.036 / 57,8	2.036 / 57,8	2.077 / 59	2.118 / 60,2	2.159 / 61,3	2.210 / 62,5	2.210 / 62,5
3.2.4	<i>Pertanahan</i>									
3.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikasi	%	7,23	20	9,86	20	20	20	20	100
3.2.4.2	Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.4.3	Penyelesaian izin lokasi	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3.2.5	<i>Lingkungan Hidup</i>									
3.2.5.1	Indeks Kualitas Air	Poin	tad	40,00	40,00	40,50	41	41,50	42	42
3.2.5.2	Indeks Kualitas Udara	Poin	tad	89,72	89,72	89,73	89,74	89,75	89,76	89,76
3.2.5.3	Indeksi Kualitas Tutupan Lahan	Poin	tad	79	79	80	81	82	83	83
3.2.5.4	Timbulan sampah yang ditangani	M <sup>3</sup>	tad	13.139,38	13.139,38	15.493,03	16.562,68	18.561,28	20.561,28	20.561,28
3.2.5.5	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	tad	58,84	58,84	69,38	74,14	78,65	83,12	83,12
3.2.6	<i>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>									
3.2.6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Poin	0,79	0,80	0,87	0,85	0,9	0,92	0,95	0,95
3.2.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,79	0,80	0,83	0,85	0,90	0,95	0,95	0,95
3.2.6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,63	0,6	0,55	0,65	0,7	0,75	0,85	0,85
3.2.6.4	Cakupan Penerbitan KTP	%	79,00	80	87,37	85%	90%	92%	95%	95%
3.2.6.5	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	79,03	55	82,03	85	90	95	100	100
3.2.7	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>									
3.2.7.1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.7.2	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	97,37	100	100	100	100	100
3.2.8	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>									
3.2.8	Prevalensi peserta KB aktif	%	59,13	60	57,80	70	80	90	100	100
3.2.8	Rasio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa	%	3,2	100	3,2	100	100	100	100	100
3.2.8	Persentas Pemakaian Kontrasepsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.8	Angka Kelahiran pada Usia Remaja	Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.9	<i>Perhubungan</i>									
3.2.9.1	Persentase Layanan Angkutan Laut/Sungai	%	0	40	40	40	60	60	60	60
3.2.9.2	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0	20	20	40	60	80	100	100
3.2.9.1	Persentase Fasilitas Perhubungan yang berfungsi baik	%	0	60	60	70	80	85	90	90
3.2.10	<i>Komunikasi dan Informatika</i>									
3.2.10.2	Persentase masyarakat kecamatan yang melek informasi	%	0	40	40	50	60	70	80	80
3.2.10.2	Persentase Akses Masyarakat Kecamatan Terhadap Media Publik	%	0	20	20	40	60	80	100	100
3.2.11	<i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>									
3.2.11.1	Persentase koperasi aktif	%	60	60	60	70	80	90	100	100
3.2.11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	tad	90	90	90	90	90	90	90
3.2.12	<i>Penanaman Modal</i>									
3.2.12.1	Rasio daya serap tenaga kerja	%								
3.2.12.1	Persentase Pertumbuhan Realisasi PMDN/PMA	%	1,89	3,19	3,19	3,33	3,45	3,57	3,70	3,70
3.2.13	<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>									
3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	tad	5	10	10	15	20	25	25
3.2.13.2	Persentase wirausaha muda	%	tad	2	2	2	2	2	2	10
3.2.14	<i>Statistik</i>									
3.2.14.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.14.2	Buku PDRB	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.15	<i>Persandian</i>									
3.2.15.1	Persentase Informasi persandian yang diamankan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.16	<i>Kebudayaan</i>									
3.2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	0	1	1	0	1	0	0	2
3.2.16.1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lestari	%	0	20	20	40	60	80	100	100
3.2.17	<i>Perpustakaan</i>									
3.2.17.1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	tad	tad	tad	500	1.000	1.500	2.000	2.000
3.2.17.2	Indeks Minat Baca	Poin	tad	tad	tad					
3.2.18	<i>Kearsipan</i>									
3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2.18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>3.3 Layanan Urusan Pilihan</b>										
3.3.1	<i>Pariwisata</i>									
3.3.1.1	Kunjungan wisata	Orang	Tad	8.000	11.672	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.1.2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,30	1,45	1,45	1,50	1,75	1,90	2	2
3.3.1.1	PAD Sektor Pariwisata	%	Tad	0,010	0,010	0,011	0,014	0,016	0,018	0,018
3.3.2	<i>Pertanian</i>									
3.3.2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	36,24	38,70	33,10	39,96	41,21	42,46	43,71	43,71
3.3.2.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	3,57	3,60	3,47	3,85	4,25	4,5	5	5
3.3.2.3	Cakupan bina kelompok petani	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.3	<i>Perdagangan</i>									
3.3.3.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.4	<i>Perindustrian</i>									
3.3.4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.5	<i>Transmigrasi</i>									
3.3.5.1	Persentase pertumbuhan pendapatan transmigran	%	0,5	100	100	100	100	100	100	100
3.3.6	<i>Kelautan dan Perikanan</i>									
3.3.6.1	Produksi perikanan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.6.2	Konsumsi ikan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.6.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.3.6.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	8,54	37,86	37,86	38,39	40,05	40,72	41,38	41,38
3.3.6.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3.3.6.7	Nilai Tukar Nelayan	%	tad	115	120,73	122	123	124	125	125
<b>3.4 Penunjang Urusan</b>										
3.4.1	<i>Adminstrasi Pemerintahan</i>									
3.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	tad	C	C	C	B	B	B	B
3.4.1.2	Nilai LAKIP	Nilai	C	C	C	C	B	B	B	B
3.4.1.3	Nilai LPPD	Status	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.4.1.4	Persentase Penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan	%	83	85	85	87,5	90	95	100	100
3.4.1.5	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesesuaian dan kepentingan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.4.2	<i>Perencanaan Pembangunan</i>									
3.4.2.1	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2017	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4.2.2	Pejabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4.3	<i>Keuangan</i>									
3.4.3.1	Persentase SiLPA terhadap APBD	%	22,87	32	32	11	8	7	6	6
3.4.3.2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3.3	Persentase belanja pendidikan	%	20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%	>20%
3.4.3.4	Persentase belanja kesehatan	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3.4.3.5	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	69,72/30,28	69/31	69/31	56/44	62/38	60/40	58/42	58/42
3.4.3.6	Persentase Bagi hasil kabupaten/desa	%	5,07	5	5	5	5	5	5	5
3.4.3.7	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.4.4	<i>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</i>									
3.4.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.4.5	<i>Penelitian dan Pengembangan</i>									
3.4.5.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.4.5.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	tad	100	100	100	100	100	100	100
3.4.6	<i>Pengawasan</i>									
3.4.6.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	55,63	64,04	64,04	81	86	91	95	95
3.4.6.2	Level Maturitas SPIP	Poin	1	2	2	3	3	3	4	4
3.4.6.3	Level Kapabilitas APIP	Poin	1	1	1	2	3	3	4	4
3.4.7	<i>Sekretariat Dewan</i>									
3.4.7.1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	tad	tad	tad	75	78	79	80	80



## **BAB 9**

### **PENUTUP**

Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun sebagai bentuk adanya perubahan kebijakan nasional terhadap pembentukan perangkat daerah yang baru sehingga diperlukan untuk menyusun Perubahan RPJMD tersebut. Dokumen ini berisi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tana Tidung periode 2016-2021.

#### **9.1 PEDOMAN TRANSISI**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan nasional.
- 2) RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 antara lain disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini bertujuan utk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai



dengan akhir periode RPJMD dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tahun pertama masa kepemimpinannya.

- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

## **9.2 KAJIDAH PELAKSANAAN**

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini dengan sebaik-baiknya.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mulai tahun 2017 hingga 2021.
- 3) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- 4) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tana Tidung dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- 5) Bappeda dan Litbang Kabupaten Tana Tidung melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021.
- 6) Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021 agar disebarluaskan kepada masyarakat dan *stakeholders*.